BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Kebumen atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen.

Tujuan laporan keuangan adalah:

a. Menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen selama satu periode pelaporan;
b. Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan;
c. Untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan;
d. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
    1) Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan kaitannya dengan seluruh alokasi pengeluaran;
    2) Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
    3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
    4) Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
    5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman;
    6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan;
    7) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
c. Undang- Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
k. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jawa Tengah;
o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
s. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
t. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

u. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
v. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
w. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
x. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
y. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
z. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
aa. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
bb. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
ff. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
gg. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
hh. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
ii. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen;
jj. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
kk. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
ll. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen
2.2 Ekonomi Makro
2.3 Arah dan Kebijakan Umum APBD
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Perubahan Ekuitas
5.6 Laporan Arus Kas
5.7 Pengungkapan Lainnya

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

a. Letak Geografis

Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak diantara 7°27' – 7°50' lintang selatan dan 109°22' – 109°50' bujur timur. Wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai dan pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0 – 997,5 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas:

Sebelah utara	: Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo
Sebelah timur	: Kabupaten Purworejo
Sebelah selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah barat	: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 hektar yang terbagi dalam 26 kecamatan, terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan.

Gambar 1

Peta Kabupaten Kebumen



**) Sumber : Kebumen dalam Angka*

Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

b. Demografi

1) Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2019 sebesar 0,24 ,melambat dibandingkan baik pada tahun 2018 yang hanya sebesar 0,26, maupun jika

dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,28. Jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah sebesar 1.197.982. Sementara tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 sebanyak 935 jiwa per kilometer persegi, naik dari 933 jiwa per kilometer persegi di tahun 2018.

2) Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja (usia 15 tahun atau lebih) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebanyak 900.240 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 894.326 jiwa. Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sekitar 68,48 persen dimana hal tersebut menggambarkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Kebumen termasuk dalam angkatan kerja. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 65,53 persen. Kelompok penduduk bukan Angkatan kerja pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019 didominasi oleh penduduk yang mengurus rumah tangga yaitu sebesar 195.772 jiwa pada tahun 2018 dan turun menjadi 188.648 jiwa pada tahun 2019 Angkatan kerja terdiri atas dua kelompok yaitu kelompok pengangguran dan kelompok bekerja. Angkatan kerja yang bekerja tahun 2019 sebanyak 95,24 persen terhadap total angkatan kerja yang sebesar 616.494 jiwa. Sementara tingkat pengangguran terbuka persentasenya menurun dari 5,52 persen pada tahun 2018 menjdai 4,76 persen dari total angkatan kerja

c. Organisasi

Unsur Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati/Wakil Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan Pemerintahan Bupati/Wakil Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1) DPRD

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2019-2024 dengan Ketua H. Sarimun, S.Sy dan wakil ketua Fuad Wahyudi, Agung Prabowo, dan Yuniarti Widayaningsih.

2) Bupati/Wakil Bupati

Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2016-2021 dipimpin oleh K.H. Yazid Mahfudz dan Arif Sugiyanto, SH (menjabat Wakil Bupati sejak 2019).

3) Perangkat Daerah (PD)

Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas aparaturnya Kabupaten Kebumen melaksanakan kewenangan wajib yang terbagi dalam 22 Bidang Pemerintah, meliputi 56 Perangkat Daerah, terdiri dari: Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, 16 Dinas, 5 Badan, 1 Kantor, 26 Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman dan RSUD Prembun, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan susunan nomenklatur sebagai berikut.

Tabel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2020

No.	Kode SKPD	Nama SKPD
	1.01.	BIDANG PENDIDIKAN
1.	1.01.1	Dinas Pendidikan.
	1.02.	BIDANG KESEHATAN
2.	1.02.1	Dinas Kesehatan
3.	1.02.2	Rumah Sakit umum Daerah
	1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5.	1.03.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.04	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6..	1.04.1	Dinas Perumahan dan Kawasasn Permukiman dan Lingkungan Hidup
	1.05	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
7.	1.05.1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	1.05.2	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.06	BIDANG SOSIAL
9.	1.06.1	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.01	BIDANG TENAGA KERJA
10.	2.01.1	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.06	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
11.	2.06.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.07	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
12.	2.07.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.09	BIDANG PERHUBUNGAN
13.	2.09.1	Dinas Perhubungan
	2.10	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14.	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.12	BIDANG PENANAMAN MODAL
15.	2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.13	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
16.	2.13.1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan pariwisata
	2.18	BIDANG KEARSIPAN
17.	2.18.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	3.01	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
18.	3.01.1	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.03	BIDANG PERTANIAN
19.	3.03.1	Dinas Pertanian dan Pangan
	3.06	BIDANG PERDAGANGAN
20.	3.06.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4.01	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
21.	4.01.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22.	4.01.2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
23.	4.01.3	Sekretariat Daerah
24.	4.01.4	Sekretariat DPRD
25.	4.01.5	Kecamatan Kebumen
26.	4.01.6	Kecamatan Alian
27.	4.01.7	Kecamatan Karangsambung
28.	4.01.8	Kecamatan Prembun
29.	4.01.9	Kecamatan Mirit
30.	4.01.10	Kecamatan Kutowinangun
31.	4.01.11	Kecamatan Ambal
32.	4.01.12	Kecamatan Buluspesantren
33.	4.01.13	Kecamatan Pejagoan
34.	4.01.14	Kecamatan Klirong
35.	4.01.15	Kecamatan Petanahan
36.	4.01.16	Kecamatan Sruweng
37.	4.01.17	Kecamatan Karanganyar
38.	4.01.18	Kecamatan Karanggayam
39.	4.01.19	Kecamatan Adimulyo
40.	4.01.20	Kecamatan Kuwarasan
41.	4.01.21	Kecamatan Puring

No.	Kode SKPD	Nama SKPD
42.	4.01.22	Kecamatan Gombong
43.	4.01.23	Kecamatan Sempor
44.	4.01.24	Kecamatan Buayan
45.	4.01.25	Kecamatan Rowokele
46.	4.01.26	Kecamatan Ayah
47.	4.01.27	Kecamatan Sadang
48.	4.01.28	Kecamatan Poncowarno
49.	4.01.29	Kecamatan Padureso
50.	4.01.30	Kecamatan Bonorowo
	4.02	BIDANG PENGAWASAN
51.	4.02.1	Inspektorat
	4.03	BIDANG PERENCANAAN
52.	4.03.01	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4.04	BIDANG KEUANGAN
53.	4.04.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
54.	4.04.2	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	4.05	BIDANG KEPEGAWAIAN
55.	4.05.1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

d. Kebijakan Pembangunan

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1) Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen adalah “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a) Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;

b) Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;

c) Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;

d) Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;

e) Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;

f) Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus

mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;

g) Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

2) Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

a) Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;

b) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;

c) Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;

d) Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;

e) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan

f) Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung

dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

2.2 Ekonomi Makro

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2019 mencapai 27.944.041,19 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.946.813,43 juta rupiah (sebesar 7,49%) dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mencapai 25.997.227,76 juta rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan juga adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kebumen pada Tahun 2019 juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 19.825.062,62 juta rupiah, naik dari nilai 2018 sebesar 18.777.048,50 juta rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,58 persen, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,52 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 15,48 persen. Di era industri 4.0, lapangan lapangan usaha informasi komunikasi terasa sangat vital dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, 16 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dan 1 lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Sebelas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas rata-rata, sedangkan lima lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif namun lebih Analisis Ekonomi Daerah Kabupaten Kebumen 2020 30 rendah dari rata-rata. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel
LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN KEBUMEN MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,75	-5,84	0,43	3,10	-0,54
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	7,23	-5,82	0,12	2,76	-0,72
	1.1. Tanaman Pangan	13,08	-6,74	-2,25	2,75	-7,25
	1.2. Tanaman Hortikultura	6,32	-9,57	0,22	3,21	3,78

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
	1.3. Perkebunan	-0,88	-2,28	2,34	0,03	5,07
	1.4. Peternakan	-3,42	2,96	6,64	5,12	6,70
	1.5. Jasa Pertanian dan Perburuan	5,26	4,67	3,33	1,15	1,81
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-22,24	0,67	0,18	1,46	1,69
	3 Perikanan	21,16	-12,81	17,04	20,15	5,58
B	Pertambangan dan Penggalian	2,12	-1,22	4,01	3,18	3,24
C	Industri Pengolahan	4,91	9,55	5,68	5,59	7,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,18	7,97	6,23	6,76	7,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	2,33	2,40	0,23	4,67	4,43
F	Konstruksi	3,47	13,43	4,40	2,74	5,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	7,35	8,67	7,10	6,09	7,29
H	Transportasi dan Pergudangan	10,95	12,47	7,31	5,66	7,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,25	10,42	8,73	8,20	9,12
J	Informasi dan Komunikasi	9,44	13,62	15,72	17,09	15,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,93	6,76	5,03	2,18	4,62
L	Real Estate	6,84	7,37	3,87	3,21	6,82
M,N	Jasa Perusahaan	8,62	11,08	11,06	8,19	10,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,70	5,03	2,39	4,43	3,95
P	Jasa Pendidikan	8,24	7,02	7,99	9,72	8,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,73	9,73	8,86	9,49	9,36
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,81	11,98	11,02	9,33	10,78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN		**6,28**	**5,01**	**5,13**	**5,52**	**5,58**

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

b. Struktur Ekonomi

Besarnya aktivitas perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Kebumen didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, di antaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dominasi ketiga sektor tersebut masih terjadi di Tahun 2019, di mana peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 21,31 persen. Meskipun masih menjadi sektor penyumbang terbesar, namun peranan sektor ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (sebesar 22,66 persen di Tahun 2018). Lapangan usaha Industri Pengolahan menjadi sektor terbesar kedua dengan peranan sebesar 20,77 persen, mengalami sedikit kenaikan dari peranan Tahun 2018 (20,39 persen). Peringkat ketiga ditempati oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 15,35 persen (naik dari peranan Tahun 2018 sebesar 15,03 persen).

c. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk tengah tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Semakin besar nilai PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kebumen atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 17.537.009 rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2019 mencapai 23.325.927 rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

2.3 Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dimaksud, meliputi:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Sehubungan dengan prioritas pembangunan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan umum anggaran sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen yang sangat penting, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada

publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

Pokok kebijakan pendapatan diarahkan untuk :

1) penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah);
2) optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional; serta
3) penggalian dan optimalisasi potensi pendapatan lain yang sah.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilitasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

b. Belanja Daerah

1. Kebijakan Perencanaan Belanja daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, program pendukung operasional Perangkat Daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengalokasian anggaran pada program/kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah menggambarkan program-program strategis daerah, dengan skala prioritas dan arah kebijakan yang jelas. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, Pemerintah Daerah dapat menentukan dan melaksanakan kerjasama (*sharing*) untuk membiayai program strategis dan prioritas daerah yang telah ditetapkan. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kelancaran koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi dicerminkan melalui

kerjasama dalam wujud program *Budget Sharing*, kegiatan atau dana pendamping di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan lain-lain. Selain itu dilaksanakan juga koordinasi sinergis untuk upaya-upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan Belanja Daerah TA 2020 masih menggunakan nomenklatur Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, mengacu Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga. Arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2020, antara lain:

1) Belanja Pegawai

a. Mengalokasikan belanja gaji pokok dan tunjangan PNS yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas serta gaji keempat belas/ THR;

b. Mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 1,5% (satu koma lima perseratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

c. Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2020;

d. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

g. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD,

dibebankan pada APBD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah mendasari Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

i. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan alokasi paling tinggi sebesar 5%.

j. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik.

2) Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dialokasikan karena Pemerintah Daerah tidak melakukan pinjaman daerah.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dengan penganggaran yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah Nomor 40 Tahun 2017, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

4) Belanja Bagi Hasil

a. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

b. Penganggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pihak ketiga, merupakan belanja bagi hasil kepada Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai

Logending, dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor.

5) Belanja Bantuan Keuangan

a. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya bantuan Alokasi Dana Desa dialokasikan mendasari ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bantuan penerusan Dana Desa yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan kepada Desa Berinovasi, bantuan keuangan penyelenggaraan Pilkades, bantuan keuangan pembangunan kawasan perdesaan, dan bantuan operasional TPQ.

b. Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Implementasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik nantinya menunggu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

6) Belanja Tidak Terduga

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan untuk penyediaan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, maupun untuk penyediaan manakala terjadi kelebihan penyetoran pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya.

2.4 Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah TA.2020

Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 sebagai pengaturan lanjutan atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, berakibat adanya perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019. Perubahan asumsi dan kondisi eksisting pendapatan dan belanja daerah yang mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Adanya keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan keputusan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Covid 19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dimana Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 melalui penyesuaian pendapatan transfer ke daerah, penyesuaian pendapatan asli daerah, merasionalisasi belanja pegawai, dan merasionalisasi belanja barang dan jasa, belanja modal sekurang-kurangnya 50%, tetapi dalam pelaksanaannya rasionalisasi belanja daerah Kabupaten/Kota minimal 35%.

Ketentuan penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa, serta penyesuaian pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah APBD Nomor 14 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adanya perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah, Pemerintah Daerah Kebumen sudah melakukan penyesuaian dengan merubah sebanyak 5 (lima) kali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Data pergeseran/penyesuaian anggaran tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	APBD MURNI 2020	PERGESERAN I	PERGESERAN II	PERGESERAN III	PERGESERAN IV	PERGESERAN V
		PERDA NO. 14 TH 2019	PERBUP NO. 10 TH 2020	PERBUP NO. 17 TH 2020	PERBUP NO. 21 TH 2020	PERBUP NO. 30 TH 2020	PERBUP NO. 48 TH 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PENDAPATAN**	**2.878.556.768.000**	**2.918.200.266.000**	**2.918.200.266.000**	**2.918.200.266.000**	**2.584.855.399.000**	**2.624.532.615.000**
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**417.693.691.000**	**417.693.691.000**	**417.693.691.000**	**417.693.691.000**	**292.587.864.000**	**292.587.864.000**
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	110.640.014.000	110.640.014.000	110.640.014.000	110.640.014.000	84.997.000.000	84.997.000.000
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	33.639.811.000	33.639.811.000	33.639.811.000	33.639.811.000	22.385.473.000	22.385.473.000
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.030.679.000	13.030.679.000	13.030.679.000	13.030.679.000	13.243.497.000	13.243.497.000
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	260.383.187.000	260.383.187.000	260.383.187.000	260.383.187.000	171.961.894.000	171.961.894.000
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	**1.748.404.196.000**	**1.747.994.808.000**	**1.747.994.808.000**	**1.747.994.808.000**	**1.581.138.226.000**	**1.620.815.442.000**
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan	30.513.954.000	30.104.566.000	30.104.566.000	30.104.566.000	31.832.006.000	31.122.465.000
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.322.910.412.000	1.322.910.412.000	1.322.910.412.000	1.322.910.412.000	1.206.245.637.000	1.206.245.637.000
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	394.979.830.000	394.979.830.000	394.979.830.000	394.979.830.000	343.060.583.000	383.447.340.000
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH**	**712.458.881.000**	**752.511.767.000**	**752.511.767.000**	**752.511.767.000**	**711.129.309.000**	**711.129.309.000**
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	122.124.800.000	129.918.200.000	129.918.200.000	129.918.200.000	127.418.200.000	127.418.200.000
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	134.668.233.000	147.430.719.000	147.430.719.000	147.430.719.000	117.944.575.000	117.944.575.000
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi	45.787.636.000	45.787.636.000	45.787.636.000	45.787.636.000	41.243.665.000	41.243.665.000
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	-	19.497.000.000	19.497.000.000	19.497.000.000	19.497.000.000	19.497.000.000
1 . 3 . 7	Pendapatan Lainnya	409.878.212.000	409.878.212.000	409.878.212.000	409.878.212.000	405.025.869.000	405.025.869.000
2	**BELANJA**	**3.033.756.768.000**	**3.062.617.942.000**	**3.062.617.942.000**	**3.062.617.942.000**	**2.730.696.553.000**	**2.770.373.769.000**
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.888.463.325.000**	**1.890.443.487.000**	**1.890.443.487.000**	**1.888.223.137.000**	**1.947.934.533.000**	**1.952.004.548.000**
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.163.648.534.000	1.163.648.534.000	1.163.648.534.000	1.163.648.534.000	1.150.683.371.000	1.150.683.371.000
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	86.827.718.000	86.827.718.000	86.827.718.000	86.827.718.000	80.397.513.000	82.685.391.000
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	29.467.249.000	29.467.249.000	29.467.249.000	29.467.249.000	28.510.970.000	33.808.470.000
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada	13.696.177.000	13.696.177.000	13.696.177.000	13.696.177.000	13.696.177.000	13.696.177.000
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada	593.823.647.000	595.803.809.000	595.803.809.000	593.583.459.000	585.401.466.000	585.401.466.000
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	89.245.036.000	85.729.673.000
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**1.145.293.443.000**	**1.172.174.455.000**	**1.172.174.455.000**	**1.174.394.805.000**	**782.762.020.000**	**818.369.221.000**
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.277.118.000	119.110.950.000	118.087.252.000	118.091.552.000	110.950.658.000	110.950.658.000
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	692.333.376.000	690.689.932.000	692.541.065.000	699.557.115.000	483.715.842.000	492.281.203.000
2 . 2 . 3	Belanja Modal	344.682.949.000	362.373.573.000	361.546.138.000	356.746.138.000	188.095.520.000	215.137.360.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(155.200.000.000)**	**(144.417.676.000)**	**(144.417.676.000)**	**(144.417.676.000)**	**(145.841.154.000)**	**(145.841.154.000)**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**165.500.000.000**	**154.717.676.000**	**154.717.676.000**	**154.717.676.000**	**155.391.154.000**	**155.391.154.000**
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	164.000.000.000	153.217.676.000	153.217.676.000	153.217.676.000	153.891.154.000	153.891.154.000
3 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.300.000.000**	**10.300.000.000**	**10.300.000.000**	**10.300.000.000**	**9.550.000.000**	**9.550.000.000**
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi)	8.800.000.000	8.800.000.000	8.800.000.000	8.800.000.000	8.050.000.000	8.050.000.000
3 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	**155.200.000.000**	**144.417.676.000**	**144.417.676.000**	**144.417.676.000**	**145.841.154.000**	**145.841.154.000**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Adanya beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat yang mengalami perubahan, diantaranya pendapatan dari dana-dana transfer disesuaikan dengan penerimaan yang akan diterima dan sudah masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pendapatan pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan potensi yang ada, dan realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2020 disesuaikan ketentuan yang ada;
b. Berdasar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 (Audited) yang dituangkan pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebesar Rp.202.667.918.416,18. SiLPA tersebut dialokasikan untuk belanja yang sifatnya transitoris antara lain Belanja BOS sebesar Rp.8.505.648.494,00, Belanja BLUD RSUD Soedirman dan BLUD Puskesmas sebesar Rp. 43.835.359.000,00 serta belanja-belanja yang wajib didanai dari Sisa Dana DAK Fisik sebesar Rp.2.580.321.000,00, SiLPA Dana Insentif Daerah sebesar Rp.3.470.062.831,00, SiLPA DAU Tambahan untuk Kelurahan sebesar Rp.296.575.000,00 dan SiLPA DBHCHT sebesar Rp. 520.430.778,00;
c. Perubahan alokasi anggaran kegiatan yang bersumber dana transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dimana penganggarannya masuk pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, setelah sebelumnya dimasukan dengan merubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 maka penganggarannya harus disesuaikan pada RKPD Perubahan Tahun 2020;
d. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan sub unit BLUD UP3 Paru mendasari Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/264 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen, untuk pengelolaan keuangan masuk pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan;
e. Perubahan belanja program kegiatan baik antar organisasi, antar program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada Belanja Langsung; dan
f. Perubahan pada belanja tidak langsung adanya penambahan alokasi belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2020, dengan menggunakan protokol Covid 19 karena adanya pembatasan jumlah pemilih per TPS maksimal 500 orang.
g. Penyesuaian Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana non alam Covid 19 dan penyediaan anggaran untuk penanganan bencana alam yang tidak bisa diprediksikan sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TA 2020 ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam pelaksanaannya APBD-Perubahan mengalami pergeseran sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN APBD	PERGESERAN STLH PERUBAHAN	
		PERDA 10 TAHUN 2020	PERBUP NO. 86 TH 2020	PERBUP NO. 91 TH 2020
1	2	4		
1	**PENDAPATAN**	**2.670.926.408.000**	**2.687.656.143.000**	**2.703.567.185.000**
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**317.991.639.000**	**326.820.579.000**	**326.820.579.000**
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	89.697.000.000	89.697.000.000	89.697.000.000
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	23.587.096.000	23.587.096.000	23.587.096.000
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.243.497.000	13.243.497.000	13.243.497.000
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	191.464.046.000	200.292.986.000	200.292.986.000
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	**1.611.022.902.000**	**1.613.986.902.000**	**1.629.897.944.000**
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.335.926.000	36.335.926.000	36.335.926.000
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.206.245.637.000	1.206.245.637.000	1.206.245.637.000
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	368.441.339.000	371.405.339.000	387.316.381.000
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**741.911.867.000**	**746.848.662.000**	**746.848.662.000**
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	133.718.200.000	135.310.300.000	135.310.300.000
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	138.797.133.000	142.141.828.000	142.141.828.000
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.243.665.000	45.243.665.000	45.243.665.000
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	19.127.000.000	19.127.000.000	19.127.000.000
1 . 3 . 7	Pendapatan Lainnya	405.025.869.000	405.025.869.000	405.025.869.000
2	**BELANJA**	**2.865.544.326.000**	**2.882.274.061.000**	**2.898.185.103.000**
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.858.127.266.000**	**1.863.064.061.000**	**1.870.474.061.000**
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.125.594.486.000	1.130.531.281.000	1.137.941.281.000
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	83.175.383.000	83.175.383.000	83.175.383.000
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	34.248.370.000	34.248.370.000	34.248.370.000
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	13.696.177.000	13.696.177.000	13.696.177.000
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada	586.167.850.000	586.167.850.000	586.167.850.000
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	15.245.000.000	15.245.000.000	15.245.000.000
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**1.007.417.060.000**	**1.019.210.000.000**	**1.027.711.042.000**
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.754.228.000	110.067.517.000	110.067.517.000
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	594.088.917.000	595.761.273.000	604.262.315.000
2 . 2 . 3	Belanja Modal	302.573.915.000	313.381.210.000	313.381.210.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(194.617.918.000)**	**(194.617.918.000)**	**(194.617.918.000)**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**204.167.918.000**	**204.167.918.000**	**204.167.918.000**
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	202.667.918.000	202.667.918.000	202.667.918.000
3 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**9.550.000.000**	**9.550.000.000**	**9.550.000.000**
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.050.000.000	8.050.000.000	8.050.000.000
3 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	**194.617.918.000**	**194.617.918.000**	**194.617.918.000**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN	**-**	**-**	**-**

2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pendapatan

Estimasi pendapatan daerah didasarkan pada potensi dan perhitungan riil atas pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

Adapun estimasi Pendapatan Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp326.820.579.000,00 atau 12,09% dari total Pendapatan, yang terdiri dari:
   a) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp89.697.000.000,00 atau 3,32% dari total Pendapatan;
   b) Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp23.587.096.000,00 atau 0,87% dari total Pendapatan;
   c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp13.243.497.000,00 atau sebesar 0,49% dari total Pendapatan;
   d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp200.292.986.000,00 atau sebesar 7,41% dari total Pendapatan;
2) Pendapatan Transfer sebesar Rp2.241.436.306.000,00 atau sebesar 82,91% dari total pendapatan, yang terdiri dari:
   a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.629.897.944.000,00 atau sebesar 60,29% dari total Pendapatan.
   b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp450.269.534.000,00 atau 16,65% dari total Pendapatan;
   c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp142.141.828.000,00 atau sebesar 5,26% dari total Pendapatan;
   d) Bantuan Keuangan Rp19.127.000.000,00 atau 0,71% dari total Pendapatan;
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp135.310.300.000,00 atau sebesar 5,00% dari total Pendapatan.

b. Belanja

Belanja Daerah secara rinci diestimasikan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi sebesar Rp1.969.694.866.000,00 atau sebesar 85,70% dari total Belanja, yang terdiri dari:
   a) Belanja Pegawai sebesar Rp1.248.008.798.000,00 atau sebesar 54,30% dari total Belanja;
   b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp555.986.894.000,00 atau sebesar 24,19% dari total Belanja;
   c) Belanja Hibah sebesar Rp127.611.770.000,00 atau sebesar 5,55% dari total Belanja;

d) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp38.087.404.000,00 atau sebesar 1,66% dari total Belanja;

2) Belanja Modal sebesar Rp313.381.210.000,00 atau sebesar 13,64% dari total Belanja, yang terdiri dari:

a) Belanja Modal Tanah sebesar Rp.9.998.642.000,00 atau sebesar 0,43% dari total Belanja;

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp94.794.617.000,00 atau sebesar 4,12% dari total Belanja;

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.021.343.000,00 atau sebesar 2,00% dari total Belanja;

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp150.029.435.000,00 atau sebesar 6,53% dari total Belanja;

e) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebesar Rp12.547.173.000,00 atau sebesar 0,55% dari total Belanja;

3) Belanja Tak Terduga sebesar Rp15.245.000.000,00 atau sebesar 0,66% dari Total Belanja;

c. Transfer

Transfer dianggarkan sebesar Rp599.864.027.000,00, yang terdiri dari:

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp13.696.177.000,00 atau sebesar 2,28% dari total Transfer;

2) Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp586.167.850.000,00 atau sebesar 97,72% dari total Transfer.

d. Pembiayaan

Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih jumlah pendapatan dan belanja daerah. Pada APBD tahun 2020 pembiayaan dianggarkan sebesar Rp194.617.918.000,00 yang berarti sisa lebih perhitungan anggaran minimal diharapkan sebesar tersebut. Pembiayaan terdiri dari estimasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp204.167.918.000,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9.550.000.000,00.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas Anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD murni ditargetkan sebesar Rp2.878.556.768.000,00, dengan adanya pandemi Covid-19 pada APBD-Perubahan targetnya turun menjadi Rp2.703.567.185.000,00. Realisasi pendapatan di Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.762.987.014.628,80 atau 102,20%. Namun bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 yang sebesar Rp2.818.494.983.540,68 mengalami penurunan sebesar Rp55.507.968.911,88 atau 1,97%. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	(%)
1.	Pendapatan	2.703.567.185.000,00	2.762.987.014.628,80	59.419.829.628,80	102,20

Pendapatan Daerah tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel
Anggaran dan Realisasi Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	326.820.579.000,00	403.025.963.783,80	76.205.384.783,80	123,32
	Pajak daerah	89.697.000.000,00	100.877.584.517,00	11.180.584.517,00	112,46
	Retribusi Daerah	23.587.096.000,00	22.068.306.403,00	(1.518.789.597,00)	93,56
	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan	13.243.497.000,00	15.727.758.649,00	2.484.261.649,00	118,76
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.292.986.000,00	264.352.314.214,80	64.059.328.214,80	131,98
2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.241.436.306.000,00	2.223.453.074.285,00	(17.983.231.715,00)	99,20
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.629.897.944.000,00	1.624.225.405.094,00	(5.672.538.906,00)	99,65
	Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya	450.269.534.000,00	450.269.534.000,00	-	100,00
	Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya	142.141.828.000,00	130.966.524.602,00	(11.175.303.398,00)	92,14
	Bantuan keuangan	19.127.000.000,00	17.991.610.589,00	(1.135.389.411,00)	94,06
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	135.310.300.000,00	136.507.976.560,00	1.197.676.560,00	100,89
	Pendapatan Hibah	135.310.300.000,00	136.507.976.560,00	1.197.676.560,00	100,89
	Total	**2.703.567.185.000,00**	**2.762.987.014.628,80**	**59.419.829.628,80**	**102,20**

Dari tabel di atas dapat diketahui Target Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp326.820.579.000,00 dan terealisasi sebesar Rp403.025.963.783,80 atau sebesar 123,32%. Realisasi ini diperoleh dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp100.877.584.517,00 dari target sebesar Rp89.697.000.000,00 atau sebesar 112,46%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp22.068.306.403,00 dari target sebesar Rp23.587.096.000,00 atau sebesar 93,56%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp15.727.758.649,00 atau sebesar 118,76% dari target Rp13.243.497.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp264.352.314.214,80 dari target Rp200.292.986.000,00 atau sebesar 131,98%.

Pendapatan Transfer tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar Rp2.223.453.074.285,00 dari target sebesar Rp2.241.436.306.000,00 atau 99,20%. Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer dari pemerintah Pusat sebesar Rp1.624.225.405.094,00 atau 99,65%, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp450.269.534.000 atau 100%, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp130.966.524.602,00 atau 92,14% dan Bantuan Keuangan sebesar Rp17.991.610.589,00 atau 94,06%.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp136.507.976.560,00. Pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah yakkitu Hibah Dana BOS, Hibah Sanitasi dan Hibah IPDMIP.

Dilihat dari kontribusi masing-masing jenis pendapatan pada tahun 2020, Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 80,47% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyokong Pendapatan Daerah sebesar 14,58% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 4,94%.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah tahun anggaran 2020 pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp3.033.756.768.000,00 menjadi sebesar Rp2.298.321.076.000,00 pada APBD-Perubahan. Belanja Daerah terrealiasi 93,04% atau sebesar Rp2.138.449.904.280,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 turun sebesar 4,81%.

Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.839.460.030.013,00, Belanja Modal sebesar Rp288.801.049.018,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp10.188.825.249,00.

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dirinci sebagai berikut.

Tabel
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.969.694.866.000,00	1.839.460.030.013,00	93,39
	a. Belanja Pegawai	1.248.008.798.000,00	1.169.696.600.650,00	93,73
	b. Belanja Barang dan Jasa	555.986.894.000,00	512.619.955.329,00	92,20
	d. Belanja Hibah	127.611.770.000,00	122.828.836.872,00	96,25
	e. Belanja Bantuan Sosial	38.087.404.000,00	34.314.637.162,00	90,09
2.	Belanja Modal	313.381.210.000,00	288.801.049.018,00	92,16
	a. Belanja Tanah	9.988.642.000,00	8.217.772.363,00	82,27
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	94.794.617.000,00	89.087.259.542,00	93,98
	c. Belanja Gedung dan Bangunan	46.021.343.000,00	43.302.380.801,00	94,09
	d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.029.435.000,00	136.180.943.682,00	90,77
	e. Belanja Aset tetap Lainnya	12.547.173.000,00	12.012.692.630,00	95,74
3.	Belanja tak terduga	15.245.000.000,00	10.188.825.249,00	66,83
	a. Belanja Tak Terduga	15.245.000.000,00	10.188.825.249,00	66,83
	Jumlah Belanja	**2.298.321.076.000,00**	**2.138.449.904.280,00**	**93,04**

Berdasarkan data di atas, maka Belanja Daerah didominasi Belanja Operasi dengan proporsi 86,02% dari total Belanja Daerah, Belanja Modal sebesar 13,51% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,48%.

c. Transfer

Transfer dianggarkan sebesar Rp599.864.027.000,00 realisasinya sebesar Rp599.282.823.700,00 atau 99,90%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 Transfer mengalami kenaikan sebesar 6,44%.

Realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

Tabel
Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	13.696.177.000,00	13.527.756.700,00	98,77
	a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.677.560.000,00	9.657.463.900,00	99,79
	b. Transfer Bagi Hasil Pajak Pendapatan Lainnya	4.018.617.000,00	3.870.292.800,00	96,31
2.	Transfer Bantuan Keuangan	586.167.850.000,00	585.755.067.000,00	99,93
	a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	584.102.974.000,00	583.690.191.000,00	99,93
	b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.064.876.000,00	2.064.876.000,00	100,00
	Jumlah Transfer	**599.864.027.000,00**	**599.282.823.700,00**	**99,90**

Berdasarkan data dari tabel diatas realisasi Transfer tahun anggaran 2020 didominasi oleh Transfer Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp585.755.067.000,00 atau 97,74% dari realisasi Transfer. Sedangkan Transfer Bagi Hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp13.527.756.700,00 atau 2,26% dari realisasi Transfer.

d. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penerimaan Pembiayaan			
a.	Penggunaan SILPA	202.667.918.000,00	202.667.918.416,18	100,00
b.	Penerimaan Kembali Piutang	1.500.000.000,00	1.465.000.000,00	97,67
	Jml Penerimaan	204.167.918.000,00	204.132.918.416,18	99,98
2.	Pengeluaran Pembiyaan			
a.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	8.050.000.000,00	8.050.000.000,00	100,00
b.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
	Jml Pengeluaran	9.550.000.000,00	9.550.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	**194.617.918.000,00**	**194.582.918.416,18**	**99,98**

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Dari penjelasan komposisi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan di atas, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2020 sebesar Rp219.837.205.064,98.

2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

a. Pendapatan Daerah

Capaian pendapatan daerah TA 2020 sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19, sehingga untuk beberapa sektor pendapatan khususnya Pos Retribusi tidak bisa tercapai. Selain kondisi pandemi, kendala dalam pencapaian target pendapatan ini juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1) Pemungutan pendapatan daerah belum semua sektor memanfaatkan teknologi informasi, masih dilakukan secara manual.
2) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3) Pada kelompok penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah permasalahan yang selalu terjadi adalah kesulitan melakukan prediksi serta terlambatnya informasi atas penerimaan dan bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam dari pemerintah dan penerimaan dana bagi hasil dari provinsi;
4) Ketatnya persyaratan pencairan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan peningkatan penggalian potensi;
2) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pendapatan daerah;
3) Mempersiapkan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola pendapatan daerah melalui pelatihan, bimbingan teknik dan *in house training;*
4) Meningkatkan pengawasan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi.
5) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan alokasi Dana-dana Transfer.

b. Belanja Daerah

Capaian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 juga dipengaruhi oleh kondisi Covid-19, di mana beberapa kegiatan dilakukan refocusing untuk pendanaan penanganan Covid-19. Belanja Daerah terealisasi sebesar 93,04%, antara lain disebabkan :

1) Adanya kebijakan Pemerintah terhadap pembatasan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan penyebaran COVID-19.

2) Dana BTT hanya direalisasikan untuk penanganan COVID-19, sedangkan penyediaan untuk penanganan Bencana Alam tidak terserap, karena tidak terjadi bencana alam.

3) Penyediaan gaji untuk CPNS formasi 2019, tidak bisa direalisasikan anggarannya karena Pandemi Covid 19, pelaksanaan SKD dan SKB diundur sehingga proses pengangkatan CPNS SPMT 1 Januari 2021.

4) Penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan untuk P3K hasil seleksi Tahun 2019 belum bisa direalisasikan pada tahun 2020, karena SK pengangkatan P3K baru diproses per 1 Pebruari 2021, berdasarkan ketentuan Permendagri No.6 tahun 2021 yang terbit tanggal 21 Januari 2021.

5) Alokasi belanja peningkatan jalan sumber dana APBD provinsi yang teralokasi pada APBD Perubahan tidak dapat direalisasikan karena tidak cukup waktu.

6) Alokasi belanja insentif Nakes Bulan Desember belum dapat direalisasikan, karena hasil verifikasi dari Kementerian Kesehatan baru divalidasi di Bulan Pebruari 2021.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Aliran Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi rekening-rekening Entitas Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen selaku entitas akuntansi.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mengkonsolidasikan rekening-rekening yang merupakan entitas kekayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Yayasan dan Entitas terpisah lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 menggunakan nilai perolehan historis dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai

tukar kurs tengah Bank Indonesia. Angka-angka dalam laporan keuangan disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi akun yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Adapun aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.1.1. Aset Lancar

4.4.1.1.1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

1) Kas dan setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, dan uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Termasuk kas adalah:

1) pendapatan yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah;

2) penerimaan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;

3) penerimaan transitoris oleh Bendahara Umum Daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara maupun pihak lain sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;

4) potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;

5) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;

6) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang merupakan bagian dari entitas SKPD yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan; dan

7) hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Kas terdiri dari:
1) Kas di Kas daerah;
2) Kas di Bendahara Penerimaan;
3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah; dan
5) Kas Lainnya.

Termasuk dalam setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Pengakuan

1) Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Hibah Langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan daerah.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Penyajian

1) Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

2) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) rincian kas dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

2) rincian kas dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan seperti PPN/PPh yang dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum/Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian yang belum disetorkan dan lain-lain; dan

3) informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.1.1.2. Investasi Jangka Pendek

a. Definisi

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan berisiko rendah serta dimiliki dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek dapat berupa:
1) Deposito;
2) Surat Utang Negara; dan
3) Sertifikat Bank Indonesia.

b. Pengakuan

1) investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; dan
   b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

2) Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

c. Pengukuran

Pengukuran investasi jangka pendek sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut:
1) Deposito Berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
2) Surat Utang Negara dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar; dan
3) Sertifikat Bank Indonesia dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

d. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

e. Pengungkapan

Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK antara lain mengenai:
1) jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki;
2) penurunan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki; dan
3) perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (bila ada).

4.4.1.1.3. Piutang

a. Definisi

1) piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

2) piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu:

a) Piutang Pendapatan, meliputi:

(1) piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi daerah meliputi piutang pajak dan piutang retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Kebumen meliputi Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

(2) piutang berdasarkan perikatan perjanjian, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain atau adanya transaksi dibayar di muka; dan

(3) piutang transfer antar pemerintahan, adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul karena perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.

b) Piutang lainnya, meliputi:

(1) piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputus/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi; dan

(2) piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa lainnya selain peristiwa di atas, meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar di muka, dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan.

b. Pengakuan

1) Piutang Pendapatan:
   a) Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
      (1) telah diterbitkan Surat Ketetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan; dan
      (2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
   b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:
      (1) didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
      (2) jumlah piutang dapat diukur;
      (3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
      (4) belum dilunasi sampai akhir periode pelaporan.
   c) Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:
      (1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
      (2) Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden;
      (3) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
      (4) Piutang Dana Otonomi Khusus diakui apabila telah diterima alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur; dan
      (5) Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari provinsi diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
   d) Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat diakui apabila memenuhi kriteria:
      (1) Piutang Pendapatan Hibah diakui apabila telah diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah; dan
      (2) Piutang Pendapatan dana Darurat diakui apabila telah diterima alokasi dana Darurat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
2) Piutang lainnya:
   a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi diakui apabila telah memenuhi kriteria:
      (1) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak; atau
      (2) telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

   b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

      (1) Uang Muka belanja/Uang Muka yang harus dipertanggungjawabkan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran untuk pembayaran uang muka belanja/panjar kegiatan; dan

(2) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal Neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan/atau surat ketetapannya.

c. Pengukuran

1) Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

3) Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (*aging schedule*) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Tabel Piutang Pajak

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 2 tahun	30 %
2.	> 2 s/d 3 tahun	50 %
3.	> 3 s/d 5 tahun	75 %
4.	> 5 tahun	100 %

Tabel Piutang Retribusi Daerah

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 2 tahun	30 %
2.	> 2 s/d 3 tahun	50 %
3.	> 3 s/d 5 tahun	75 %
4.	> 5 tahun	100 %

Tabel Piutang Lainnya Tuntutan Ganti Rugi

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 6 bulan	20 %
2.	> 6 bl s/d 12 bulan	40 %
3.	> 12 bl s/d 18 bulan	60 %
4.	> 18 bulan s/d 24 bulan	80%
5.	>24 bulan	100%

Tabel Piutang Lainnya karena perikatan/perjanjian

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 2 tahun	30 %
2.	> 2 s/d 3 tahun	50 %
3.	> 3 s/d 5 tahun	75 %
4.	> 5 tahun	100 %

4) Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5) Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada huruf d pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.

d. Penyajian

Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyisihannya.

e. Pengungkapan

1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

b) rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

d) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

2) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.1.1.4. Persediaan

a. Definisi

1) persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Persediaan merupakan aset yang berupa:

a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;

b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;

c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan

d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

b. Pengakuan

Persediaan diakui:

1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

c. Pengukuran

1) Persediaan disajikan sebesar:

a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;

c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

2) persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;

3) persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir; dan

4) persediaan dicatat dengan metode periodik, artinya fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

d. Penyajian

Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lancar.

e. Pengungkapan

Pengungkapan persediaan dalam Laporan Keuangan antara lain:

1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

3) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.1.2. Aset Non Lancar

4.4.1.2.1. Investasi Jangka Panjang

a. Definisi

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Nonpermanen

a) investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi Non Permanen dapat berupa:

(1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;

(2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

(3) dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan

(4) investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

b) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

c) Dana Bergulir mempunyai karakteristik sebagai berikut:
(1) merupakan bagian dari Keuangan Daerah;
(2) tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
(3) dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
(4) merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan

(5) Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.

d) Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos Penerimaan Kembali Pinjaman dan bagi hasil jasa usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

e) Alokasi Anggaran Dana Bergulir berada di Bendahara Umum Daerah tetapi pelaksanaan pengelolaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.

f) Dana Bergulir disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

g) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, tetapi secara periodik Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable Value*). Penyesuaian tersebut berdasarkan data yang dilaporkan oleh SKPD yang membidangi atas pencatatan penatausahaan dana bergulir.

h) Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan, SKPD yang membidangi dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*), sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang ‘benar-benar tidak dapat ditagih’, dana bergulir kategori ‘diragukan dapat ditagih’ dan dana bergulir yang ‘dapat ditagih’ yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir sejak jatuh tempo sebagai berikut:

Tabel Umur Dana Bergulir

No.	Umur Dana Bergulir	% Penyisihan Dana Bergulir	Kategori
1.	1 s/d 2 tahun	30 %	dapat ditagih
2.	>2 s/d 3 tahun	50 %	memungkinkan dapat ditagih
3.	>3 s/d 5 tahun	75 %	diragukan dapat ditagih
4.	> 5 tahun	100 %	tidak dapat ditagih

2) Investasi Permanen

a) Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

b) Investasi Permanen dapat berupa:

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan

(2) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pengakuan
   1) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
      a) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
      b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
   2) Pengakuan hasil investasi dapat dilakukan dengan cara:
      a) hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi; dan
      b) apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.

c. Pengukuran
   1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
   2) Investasi Nonpermanen:
      a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
      b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
      c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti Proyek Investasi Rakyat) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
      d) pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
      e) pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi; dan
      f) Dana Bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan akun Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir.

d. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
   1) metode biaya;

      dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

   2) metode ekuitas;

      dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau

rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
1) kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;
2) kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3) kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; dan
4) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
1) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
4) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Penyajian
Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

f. Pengungkapan
Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain mengenai metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

4.4.1.2.2. Aset tetap

a. Definisi

1) aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a) tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) peralatan dan mesin

peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) gedung dan bangunan

gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Pengakuan

1) aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;

2) apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;

3) untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a) berwujud;
b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
g) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel Minimal kapitalisasi Aset

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	300.000
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000
4.	Jalan	-
5.	Jembatan	-
6.	Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai	-
7.	Instalasi dan Jaringan	-
8.	Buku	-
9.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	-
10.	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-

a) pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai belanja; dan
b) aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Pengukuran

1) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

2) biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;

3) biaya perolehan aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi:
   a) honorarium Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
   b) honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
   c) honorarium Tim Peneliti Kontrak;
   d) belanja dokumen/administrasi tender;
   e) belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang;
   f) belanja jasa konsultansi (apabila pengadaan aset tetap membutuhkan/menggunakan jasa konsultan);
   g) belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap (untuk survey, pembelian, pengawas lapangan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan); dan
   h) biaya lainnya sampai dengan aset siap digunakan.

4) biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;

5) setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;

6) bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;

7) jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;

8) biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;

9) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;

10) aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional;

11) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diakui sebagai beban pengeluaran pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi;

12) kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Tabel Batasan Jumlah Biaya untuk Penentuan Kapitalisasi

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	300.000
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000
4.	Jalan	-
5.	Jembatan	-
6.	Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai	-
7.	Instalasi dan Jaringan	-
8.	Buku	-
9.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	-
10.	Hewan ternak dan tanaman/tumbuhan	-

Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan Terhadap Aset Tetap Baik Berupa Overhaul dan Renovasi

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa manfaat (tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa manfaat (tahun)
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	*Overhaul*	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa manfaat (tahun)
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa manfaat (tahun)
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa manfaat (tahun)
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa manfaat (tahun)
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa manfaat (tahun)
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	1
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	1
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	1
Tugu Titik Kontrol /Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	1
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	1
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	1
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	1
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa manfaat (tahun)
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	1
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	1
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	7
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	7
Instalasi Pengelolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	1
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	1
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan)	Penambahan Masa manfaat (tahun)
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	1
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	1
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	1
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	1
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	1
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2

d. Penyajian

1) Aset tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

2) Penyusutan Aset Tetap:

a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

c) metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)*, dengan asumsi nilai residu Rp.0,00 dan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\textit{Penyusutan per periode} = \frac{\textit{Nilai yang dapat disusutkan}}{\textit{Masa manfaat}}$$

d) selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

e) perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel Perkiraan Masa Manfaat

KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan Dan Mesin	
1	3	2	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan	4
1	3	2	13	Alat Kantor	5
1	3	2	14	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	15	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	16	Alat Studio	5
1	3	2	17	Alat Komunikasi	5
1	3	2	18	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	19	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	20	Alat Kedokteran	5
1	3	2	21	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	22	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	23	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	24	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	26	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	27	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	29	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	30	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Senjata Sinar	5
1	3	2	34	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	35	Komputer Unit	4
1	3	2	36	Peralatan Komputer	4
1	3	2	37	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	38	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	39	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	40	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	41	Sumur	10
1	3	2	42	Produksi	10
1	3	2	43	Pengolahan Dan Pemurnian	15

KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	44	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	45	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	46	Alat Deteksi	5
1	3	2	47	Alat Pelindung	5
1	3	2	48	Alat Sar	2
1	3	2	49	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	50	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1	3	2	51	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	52	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	53	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	54	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	55	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3		Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	40
1	3	3	3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	4	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	5	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	11	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	12	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	14	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	15	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	17	Instalasi Gas	30
1	3	4	18	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	19	Instalasi Lain	5
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

f) Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional. Penyusutan disajikan dalam Neraca dengan akun Akumulasi Penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan.

g) Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

3) suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;

4) aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan

5) aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Pengungkapan
   1) laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
      a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
      b) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
         (1) penambahan;
         (2) pelepasan;
         (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
         (4) mutasi aset tetap lainnya.
      c) informasi penyusutan, meliputi:
         (1) nilai penyusutan;
         (2) metode penyusutan yang digunakan;
         (3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
         (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
   2) laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
      a) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
      b) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
      c) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
      d) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
   3) aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.1.2.3. Konstruksi dalam Pengerjaan

a. Definisi

   1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

   2) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

   3) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

b. Pengakuan

   1) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan jika:

a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

3) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan sebesar persentase kemajuan fisik per tanggal pelaporan Neraca.

d. Penyajian

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset tetap.

e. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, antara lain mengenai:

1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
4) uang muka kerja yang diberikan; dan
5) retensi.

4.4.1.2.4. Dana Cadangan

a. Definisi

1) Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2) Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d) sumber dana cadangan; dan
e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

b. Pengakuan
Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.

c. Pengukuran
1) dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan;
2) pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan;
3) pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan; dan
4) hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.

d. Penyajian
Dana cadangan disajikan di Neraca pada kelompok aset non lancar.

e. Pengungkapan
Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1) dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
2) tujuan pembentukan dana cadangan;
3) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5) sumber dana cadangan; dan
6) tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.4.1.2.5. Aset Lainnya

a. Definisi
1) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2) Aset Lainnya terdiri dari:
a) Tagihan Penjualan Angsuran;
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah;
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

(1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa;
(2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
(3) Bangun Guna Serah–BGS (*Build, Operate, Transfer–BOT*); dan
(4) Bangun Serah Guna–BSG (*Build, Transfer, Operate–BTO*).

d) Aset Tak Berwujud;

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud dapat berupa:

(1) *Goodwill*;
(2) Hak Paten atau Hak Cipta;
(3) Royalti;
(4) *Software*;

Software komputer yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud adalah *software* yang dibangun sendiri atau diperoleh dengan cara pembelian yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan, yang bukan merupakan bagian integral dari suatu *hardware*.

(5) Lisensi;
(6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
(7) Aset Tak Berwujud Lainnya.

e) Aset Lain-lain.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b. Pengakuan

1) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2) Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
3) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
4) Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
5) Bangun Guna Serah–BGS (*Build, Operate, Transfer–BOT*) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
6) Bangun Serah Guna–BSG (*Build, Transfer Operate,–BTO*) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

7) Pengakuan *Software* komputer:
   a) *Software* program yang diperoleh dengan cara dikontrakkan dengan pihak ketiga diakui pada saat diterbitkannya tagihan oleh Pihak Ketiga.
   b) Software yang diperoleh dengan cara pembelian:
      (1) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
      (2) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
      (3) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
      (4) Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

c. Pengukuran
   1) Aset Lainnya diukur sesuai biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
   2) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
   3) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara perjanjian sewa aset yang bersangkutan.
   4) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
   5) Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
   6) Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
   7) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut.
   8) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan

rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat untuk Aset Tak Berwujud diatur sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
07.24.01.01	Perangkat Lunak	10
07.24.02.01	Lisensi	10
07.24.03.01	Hak Cipta	10
07.24.04.01	Hasil Kajian (DED)	10

9) Amortisasi disajikan dengan metode garis lurus, tanpa nilai residu yang diperhitungkan setiap akhir periode.

10) Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

d. Penyajian

Aset lainnya disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset non lancar sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) besaran dan rincian aset lainnya;
2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer*) dan Bangun Serah Guna (*Built, Transfer and Operate*); dan
4) informasi lainnya yang penting.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi

1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.

4) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

   a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

   b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

   c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

   dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja alat tulis kantor.

2) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

   dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).

   dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.

4) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

   dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

1) Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

2) Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya sebagai berikut:

a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b) Pengukuran Utang Transfer

Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Pengukuran Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

f) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3) Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

a) utang yang tidak diperjualbelikan

utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b) utang yang diperjualbelikan

utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2) jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5) perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    a) pengurangan pinjaman;
    b) modifikasi persyaratan utang;
    c) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    d) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    e) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    f) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6) jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
7) biaya pinjaman:
    a) perlakuan biaya pinjaman;
    b) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan

c) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

b. Pengakuan

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan di Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1) diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2) diterima oleh SKPD; atau
3) diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama Bendahara Umum Daerah.

c. Pengukuran

1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

d. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.

e. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1) kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

2) kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; dan

3) dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Pengukuran

Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

1) belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK;

2) belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan

3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Definisi

Transfer merupakan pengeluaran uang dari provinsi kepada kabupaten atau dari kabupaten kepada desa.

Transfer terdiri dari:

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah yang lebih rendah.

2) Transfer Bantuan Keuangan

merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada partai politik.

b. Pengakuan

Transfer diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Transfer disajikan dalam LRA dengan klasifikasi transfer dan disajikan setelah klasifikasi belanja. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam pengganggaran Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan

1) penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

2) pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

1) Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran.

2) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CALK.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Termasuk pendapatan-LO adalah hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

b. Pengakuan

1) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:

a) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan, Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan, dan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan.

b) Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan

Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

c) Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan

Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

d) Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

e) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

f) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

g) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

2) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari Bendahara Umum Daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) alternatif satu yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

b) alternatif dua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari Wajib Pajak ke SKPKD atas pendapatan terkait.

c) alternatif tiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

c. Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh: tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

1) Pengakuan Beban pada PPKD

a) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

b) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

d) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

e) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

f) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

2) Pengakuan Beban Pada SKPD

a) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan seperti honorarium non pegawai negeri sipil, atau melalui mekanisme langsung seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme langsung, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Beban pegawai yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

b) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban barang yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

c. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah; dan
2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diketahui harga perolehannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan merupakan akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

a. keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
b. kesalahan perhitungan matematis;
c. kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
d. kesalahan interpretasi fakta;
e. kecurangan; atau
f. kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan menjadi:

a. kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara

berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

b. kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

2) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan sebagai berikut:

a) kesalahan tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada kun-akun neraca terkait.

b) kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali Belanja/Beban dilakukan pada akun Pendapatan lain-lain – LRA/Pendapatan lain-lain - LO.

c) kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih/akun Ekuitas.

d) koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA/ Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo anggaran lebih/akun ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp
Pendapatan	2.703.567.185.000,00	2.762.987.014.628,80	59.419.829.628,80	102,20	2.818.494.983.540,68

Realisasi Pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.762.987.014.628,80 yang terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan	2020			%	Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)		(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	326.820.579.000,00	403.025.963.783,80	76.205.384.783,80	123,32	409.163.433.329,68
Pendapatan Transfer	2.241.436.306.000,00	2.223.453.074.285,00	(17983231715,00)	99,20	2.271.833.440.199,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	135.310.300.000,00	136.507.976.560,00	1.197.676.560,00	100,89	137.498.110.012,00
Jumlah	**2.703.567.185.000,00**	**2.762.987.014.628,80**	**59.419.829.628,80**	**102,20**	**2.818.494.983.540,68**

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 mencapai target sebesar 102,20% dari anggaran atau terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp59.419.829.628,80 Namun jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2019 terdapat penurunan sebesar Rp55.507.968.911,88 atau turun 1,97% .

Dari tabel dapat terlihat bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 80,47% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyokong Pendapatan Daerah sebesar 14,59% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 4,94%.

Pendapatan Asli Daerah secara nominal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp403.025.963.783,80 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp409.163.433.329,68 atau turun sebesar 1,50%, Pendapatan Transfer realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.223.453.074.285,00 sedangkan Tahun 2019 Rp2.271.833.440.199,00 atau turun sebesar 2,16%, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 realisasinya sebesar Rp136.507.976.560,00 sedangkan Tahun 2019 Rp137.498.110.012,00 atau turun sebesar 0,72% dari tahun 2019.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	326.820.579.000,00	403.025.963.783,80	76.205.384.783,80	123,32	409.163.433.329,68

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp403.025.963.783,80 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	2020			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
Pajak Daerah	89.697.000.000,00	100.877.584.517,00	11.180.584.517,00	112,46
Retribusi Daerah	23.587.096.000,00	22.068.306.403,00	(1.518.789.597,00)	93,56
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.243.497.000,00	15.727.758.649,00	2.484.261.649,00	118,76
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.292.986.000,00	264.352.314.214,80	64.059.328.214,80	131,98
Jumlah	**326.820.579.000,00**	**403.025.963.783,80**	**76.205.384.783,80**	**123,32**

Dari 4 (empat) objek Pendapatan Asli Daerah ada 3 (tiga) obyek pendapatan mencapai target yaitu Pendapatan Pajak Daerah sebesar 112,46%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 118,76% dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 131,98%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target yaitu hanya terealisasi sebesar 93,56%.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pajak Daerah	89.697.000.000,00	100.877.584.517,00	11.180.584.517,00	112,46	110.614.568.810,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp100.877.584.517,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realiasi Pajak Daerah

Pajak Daerah	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pajak Hotel	800.000.000,00	1.088.928.156,00	288.928.156,00	136,12	1.879.305.319,00
Pajak Restoran	3.500.000.000,00	6.714.994.150,00	3.214.994.150,00	191,86	7.883.696.222,00
Pajak Hiburan	250.000.000,00	267.136.284,00	17.136.284,00	106,85	388.339.976,00
Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.183.735.428,00	183.735.428,00	118,37	1.137.116.644,00
Pajak Penerangan Jalan	28.000.000.000,00	29.779.901.282,00	1.779.901.282,00	106,36	32.492.302.082,00
Pajak Parkir	237.000.000,00	393.735.093,00	156.735.093,00	166,13	317.326.717,00
Pajak Air Tanah	200.000.000,00	276.760.657,00	76.760.657,00	138,38	386.505.350,00
Pajak Sarang Burung	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	20,00	10.050.000,00
Pajak Mineral Bukan	1.000.000.000,00	1.774.239.529,00	774.239.529,00	177,42	4.953.016.259,00
PBB	45.700.000.000,00	48.454.001.000,00	2.754.001.000,00	106,03	48.222.131.277,00
BPHTB	9.000.000.000,00	10.942.152.938,00	1.942.152.938,00	121,58	12.944.778.964,00
Jumlah	**89.697.000.000,00**	**100.877.584.517,00**	**11.180.584.517,00**	**112,46**	**110.614.568.810,00**

Pendapatan dari Pajak Daerah Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp100.877.584.517,00 turun sebesar 8,80% dibandingkan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 yang sebesar Rp110.614.568.810,00. Dari 11 rincian objek pendapatan Pajak Daerah hanya 1 rincian objek yang tidak mencapai target yaitu Pajak Sarang Burung yang hanya tercapai 20,00% dari target anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya pelestarian habitat burung walet untuk menambah populasi. Terdapat perubahan model pemetikan, yakni mengurangi jadwal panen unduhan yang yang semula tiga bulan sekali menjadi enam bulan sekali panen.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Retribusi Daerah	23.587.096.000,00	22.068.306.403,00	(1.518.789.597,00)	93,56	27.141.726.792,00

Retribusi Daerah sebesar Rp22.068.306.403,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

Retribusi	Tahun 2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	660.000.000,00	268.178.500,00	(391.821.500,00)	40,63	198.745.250,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.004.899.000,00	1.048.462.600,00	43.563.600,00	104,34	943.905.700,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.254.000.000,00	474.068.000,00	(779.932.000,00)	37,80	800.241.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	4.762.912.000,00	5.298.745.450,00	535.833.450,00	111,25	3.997.763.750,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	750.000.000,00	654.714.000,00	(95.286.000,00)	87,30	778.312.500,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	66.000.000,00	45.276.000,00	(20.724.000,00)	68,60	60.984.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.058.200.000,00	1.211.472.000,00	153.272.000,00	114,48	949.416.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.181.336.000,00	2.125.784.433,00	(55.551.567,00)	97,45	2.405.730.075,00
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	1.861.800.000,00	2.013.456.198,00	151.656.198,00	108,15	2.127.458.032,00
Retribusi Terminal	105.000.000,00	79.163.600,00	(25.836.400,00)	75,39	153.213.300,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.702.235.000,00	3.384.771.500,00	(317.463.500,00)	91,43	4.156.200.200,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	1.063.000,00	680.000,00	(383.000,00)	63,97	1.960.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	15.000.000,00	16.572.500,00	1.572.500,00	110,48	27.770.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	3.671.578.000,00	2.874.226.800,00	(797.351.200,00)	78,28	7.698.989.900,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	317.392.000,00	613.655.000,00	296.263.000,00	193,34	605.412.500,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.130.731.000,00	1.932.379.822,00	(198.351.178,00)	90,69	2.197.519.585,00
Retribusi Izin Trayek	44.950.000,00	26.700.000,00	(18.250.000,00)	59,40	38.105.000,00
Jumlah	**23.587.096.000,00**	**22.068.306.403,00**	**(1.518.789.597,00)**	**93,56**	**27.141.726.792,00**

Pendapatan dari Retribusi Daerah Tahun 2020 terealisasi 93,56% dan mengalami penurunan sebesar 18,69% jika dibandingkan pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2019 yang sebesar Rp27.141.726.792,00.

Dari 17 (tujuh belas) objek pendapatan Retribusi Daerah hanya enam yang dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 104,34%, Retribusi

Pelayanan Pasar tercapai 111,25%, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercapai 114,48%, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan tercapai 108,15%, Retribusi Rumah Potong Hewan tercapai 110,48%, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang mencapai 193,34%.

Sedangkan 11 (sebelas) lainnya tidak dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 40,63%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan sebesar 37,08%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 87,30%, Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar 68,60%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 97,45%, Retribusi Terminal 75,39, Retribusi tempat Khusus Parkir sebesar 91,43%, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 63,97%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 78,28%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 90,69%, Retribusi Izin Trayek 59,40%.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diperoleh dari pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah belum bisa tercapai karena klinik menjadi rujukan pemeriksaan covid-19 sehingga masyarakat yang melakukan pemeriksaan rutin merasa takut untuk memeriksakan diri.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Retribusi Terminal adalah jumlah kendaraan angkutan umum yang operasional/masuk terminal non-bus menurun mengingat jumlah penumpang beralih ke kendaraan roda 2 dan pribadi serta adanya pandemi covid-19 sehingga berdampak pada jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum. Sedangkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terkendala karena Pengujian pada era pandemi Covid-19 pelayanan dibatasi sebesar 50%. Untuk kendala Retribusi Izin Trayek karena belum ada penambahan kendaraan baru dan untuk menentukan jumlah penambahan trayek perlu ada *survey load factor* serta banyak jalur trayek yang kendaraannya sudah tidak beroperasi karena sepinya penggunaan angkutan. Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum belum tercapai karena adanya keberatan dari pihak ketiga untuk retribusi tepi jalan umum yang belum mencapai titik temu pada pembahasannya.

Kendala tidak tercapainya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain karena belum tuntasnya proses akreditasi laboratorium Disperkim-LH, sehingga banyak usaha besar melakukan uji laboratorium pada laboratorium yang sudah terakreditasi secara nasional, sementara pelanggan yang banyak adalah UMKM yang semakin terpuruk karena kondisi covid-19 saat ini, mereka tidak melakukan uji laboratorium. Sedangkan untuk IPLT terkendala di keterbatasan kapasitas, dengan kapasitas maksimal sehari 4 kali (untuk dua truck) dan kapasitas maksimal 15 m3 perhari. Retribusi Sewa alat berat di Dinas DPUPR terkendala karena adanya anggaran pembangunan yang berkurang, beberapa proyek dihentikan dan beberapa penyedia sudah memiliki alat berat sendiri.

Retribusi tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pendapatan paling terdampak karena Pandemi dengan adanya kebijakan penutupan sementara tempat wisata mulai bulan Maret 2020. Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis terkendala karena untuk siswa yang melaksanakan pembelajaran yang dipungut retribusi adalah siswa dari luar kota. Untuk daerah Kebumen, dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Pendidikan Teknis serta diberlakukannya kurikulum 13 bagi SMK untuk melaksanakan prakerin di dunia industri

sehingga siswa yang melaksanakan prakerin di BLK berkurang. Untuk Retribusi Jasa Usaha dan Fasilitas Umum yang merupakan pembayaran sewa ruangan dari Gedung PLUT berikut penginapannya, terdapat pembatalan di awal pandemi sekitar 6 sampai dengan 8 pesanan. Untuk acara-acara yang dilakukan oleh Pemkab tidak bisa menggunakan Sewa Gedung PLUT karena nilainya tidak sesuai dengan standar.

Dan dari 17 rincian objek pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebanyak 12 rincian objek pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, yaitu Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 40,76%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 15,88%, Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar 25,76%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 11,64%, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 5,36%, Retribusi Terminal sebesar 48,33%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 18,56%, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebesar 65,31%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 40,32%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 62,67%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 12,07%, Retribusi Izin Gangguan 0% dan Retribusi Izin Trayek sebesar 29,93%.

Rincian Pendapatan Retribusi per SKPD dapat dilihat pada Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD di **lampiran 1.**

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.243.497.000,00	15.727.758.649,00	2.484.261.649,00	118,76	14.210.376.188,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari:

Tabel Rincian Angaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	2020			%	Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)		(Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD:					
a. Apotik Luk Ulo	146.874.000,00	146.874.735,00	735,00	100,00	130.344.130,00
b. Perusda Air Minum (PDAM)	1.675.346.000,00	1.675.346.434,00	434,00	100,00	1.829.063.810,00
c. PD BPR Kebumen	1.390.079.000,00	1.390.079.812,00	812,00	100,00	1.125.861.846,00
d. PD BPR BKK Kebumen	3.731.198.000,00	3.731.198.675,00	675,00	100,00	3.075.472.682,00
e. Bank Jateng	6.300.000.000,00	8.782.974.368,00	2.482.974.368,00	139,41	8.049.633.720,00
f. PT PRPP Jateng	-	1.284.625,00	1.284.625,00		
Jumlah	**13.243.497.000,00**	**15.727.758.649,00**	**2.484.261.649,00**	118,76	**14.210.376.188,00**

Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 terealisasi 118,76%, naik sebesar 10,68% dibandingkan pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2019 yang sebesar Rp14.210.376.188,00. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pembagian deviden dari Perusahaan Daerah yang diterima

Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk penerimaan setoran laba dari PT PRPP Jateng sebesar Rp1.284.625,00.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.292.986.000,00	264.352.314.214,80	64.059.328.214,80	131,98	257.196.761.539,68

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp264.352.314.214,80 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	874.000.000,00	1.342.174.490,00	468.174.490,00	153,57	781.423.477,00
Penerimaan Jasa Giro	4.247.500.000,00	3.896.010.559,00	(351.489.441,00)	91,72	7.358.931.704,00
Pendapatan Bunga Deposito	11.242.500.000,00	12.795.027.102,00	1.552.527.102,00	113,81	18.025.332.811,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	65.896.066,00	65.896.066,00	100,00	261.886.277,00
Pendapatan denda pajak	110.210.000,00	249.842.943,00	139.632.943,00	226,70	332.079.992,00
Pendapatan denda retribusi	513.000.000,00	370.377.740,00	(142.622.260,00)	72,20	453.321.200,00
Pendapatan Hasil eksekusi Atas Jaminan	18.500.000,00	43.035.400,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari pengembalian	331.690.000,00	821.104.559,00	489.414.559,00	247,55	1.374.233.566,00
Hasil dari pemanfaaatan kekayaan daerah	9.000.000,00	1.352.715,00	(7.647.285,00)	15,03	0,00
Pendapatan dari BLUD	180.585.262.000,00	241.773.683.117,00	61.188.421.117,00	133,88	225.746.722.285,68
Lain-lain PAD yang sah lainnya	1.270.362.000,00	1.972.377.823,80	702.015.823,80	155,26	1.698.145.782,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1.053.462.000,00	980.806.700,00	(72.655.300,00)	93,10	1.129.519.445,00
Hasil Pengelolaan dana Bergulir	37.500.000,00	40.625.000,00	3.125.000,00	108,33	35.165.000,00
Jumlah	**200.292.986.000,00**	**264.352.314.214,80**	**64.059.328.214,80**	**131,98**	**257.196.761.539,68**

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2020 terealisasi 131,98% naik sebesar 2,78% dibandingkan Pendapatan tahun 2019 yang sebesar Rp257.196.761.539,68. Rincian objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang melampaui target anggaran yang ditetapkan sebanyak 8 objek, yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan sebesar 153,57%, Pendapatan Bunga Deposito 113,81%, Pendapatan Denda Pajak sebesar 226,70%, Pendapatan dari Pengembalian sebesar 247,55%, Pendapatan BLUD 133,88%, Lain-lain PAD yang Sah Lainya sebesar 155,26% dan Pendapatan Fasilitas Sosial dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 108,33%.

Rincian Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD dapat dilihat pada Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD di **lampiran 2.**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Transfer	2.241.436.306.000,00	2.223.453.074.285,00	(17.983.231.715,00)	99,20	2.271.833.440.199,00

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.241.436.306.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.223.453.074.285,00 merupakan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat Lainnya, Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan.

Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	1.629.897.944.000,00	1.624.225.405.094,00	(5.672.538.906,00)	99,65	1.688.387.155.843,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	450.269.534.000,00	450.269.534.000,00	0,00	100,00	429.981.020.600,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	142.141.828.000,00	130.966.524.602,00	(11.175.303.398,00)	92,14	143.529.063.756,00
Bantuan Keuangan	19.127.000.000,00	17.991.610.589,00	(1.135.389.411,00)	94,06	9.936.200.000,00
Jumlah	**2.241.436.306.000,00**	**2.223.453.074.285,00**	**(17.983.231.715,00)**	**99,20**	**2.271.833.440.199,00**

Pendapatan Transfer realisasinya sebesar 99,20% dari target anggaran sebesar Rp2.241.436.306.000,00 dan turun 2,13% dari penerimaan tahun 2019. Untuk Transfer Pemerintah Pusat tidak mencapai target atau sebesar 99,65%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berasal dari Dana Penyesuaian realisasinya sebesar 100%. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yaitu penerimaan dari provinsi atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak realisasinya sebesar 92,14% dan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 94,06%.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	1.629.897.944.000,00	1.624.225.405.094,00	(5.672.538.906,00)	99,65	1.688.387.155.843,00

Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat terealisasi Rp1.624.225.405.094,00 atau sebesar 99,65% dari target anggaran sebesar Rp1.629.897.944.000,00 atau menurun sebesar 3,80% dibandingkan realisasi Tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp1.688.387.155.843,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari sebagai berikut.

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Bagi Hasil Pajak	34.205.198.000,00	33.296.897.421,00	(908.300.579,0)	97,34	20.809.791.800,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.130.728.000,00	1.849.641.537,00	(281.086.463,0)	86,81	1.349.316.600,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.206.245.637.000,00	1.197.504.293.000,00	(8.741.344.000,0)	99,28	1.279.681.428.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	387.316.381.000,00	391.574.573.136,00	4.258.192.136,0	101,10	386.546.619.443,00
Jumlah	**1.629.897.944.000,00**	**1.624.225.405.094,00**	**(5.672.538.906,0)**	**99,65**	**1.688.387.155.843,00**

Transfer Pemerintah Pusat tidak mencapai target atau sebesar 99,65%, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak 97,34%, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 86,81%, Dana Alokasi Umum sebesar 99,28% dan Dana Alokasi Khusus 101,10%.

5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Bagi Hasil Pajak	34.205.198.000,00	33.296.897.421,00	(908.300.579,0)	97,34	20.809.791.800,00

Bagi Hasil Pajak mencapai realisasi sebesar Rp33.296.897.421,00 atau 97,34% dari target anggaran sebesar Rp34.205.198.000,00 Bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp20.809.791.800,00 naik sebesar 60,01%.

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	(Rp)
PBB Sektor Pertambangan	7.635.011.000,00	5.149.818.920,00	(2.485.192.080,00)	67,45	5.540.208.000,00
PBB Sektor Perhutanan	0,00	1.410.544.622,00	1.410.544.622,00	100,00	706.249.000
Bagi Hasil PPh	19.514.287.000,00	20.009.675.591,00	495.388.591,00	102,54	6.747.208.800,00
Bagi Hasil Cukai Tembakau	7.055.900.000,00	6.726.858.288,00	(329.041.712,00)	95,34	7.816.126.000,00
Jumlah	**28.210.940.000,00**	**33.296.897.421,00**	**(908.300.579,00)**	**118,03**	**20.809.791.800,00**

Dari 4 (empat) rincian objek Bagi Hasil Pajak terdapat dua yang tidak mencapai target yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan yang hanya terealisasi Rp5.149.818.920,00 atau sebesar 67,45% dan Bagi Hasil Cukai Tembakau terealisasi Rp6.726.858.288,00 atau sebesar 95,34%. Sedangkan untuk Bagi Hasil PPh mencapai target sebesar 102,54% atau senilai Rp20.009.675.591,00.

5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	(Rp)
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	2.130.728.000,00	1.849.641.537,00	(281.086.463,00)	86,81	1.349.316.600,00

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terealisasi sebesar Rp1.849.641.537,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	(Rp)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	425.648.000,00	225.907.357,00	(199.740.643,0)	53,07	187.812.600,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	0,00	13.058.772,00	13.058.772,0	100,00	0,00
Bagi Hasil dari Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0,00	383.553,00	383.553,0	100,00	0,00
Bagi hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.588.988.000,00	788.276.289,00	(800.711.711,0)	49,61	590.155.800,00
Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	21.826.000,00	56.090.685,00	34.264.685,0	256,99	95.052.100,00
Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi	15.019.000,00	711.359.243,00	696.340.243,0	4.736,40	419.934.900,00
Bagi hasil dari Pertambangan Panas Bumi	40.889.000,00	48.791.038,00	7.902.038,0	119,33	29.773.800,00
Bagi hasil dari SDA Mineral Batubara	38.358.000,00	5.774.600,00	(32.583.400,0)	15,05	26.587.400,00
Jumlah	**2.130.728.000**	**1.849.641.537**	**(281.086.463,0)**	**86,81**	**1.349.316.600,00**

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp1.849.641.537,00 atau 86,81% dari target anggaran sebesar Rp2.130.728.000,00 dan naik sebesar 37,08% dari Tahun 2019 yang realisasinya sebesar Rp1.349.316.600,00. Dari 8 (delapan) item rincian objek Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdapat 3 objek yang melampaui target Anggaran, yaitu Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 256,99%, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 4.736,40% dan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi sebesar 119,33%. Sedangkan 2 objek tidak dianggarkan namun terdapat realisasi yaitu Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) dan Bagi Hasil dari Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	%	(Rp)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.206.245.637.000,00	1.197.504.293.000,00	(8.741.344.000,00)	99,28	1.279.681.428.000,00

Realisasi pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 sebesar Rp1.197.504.293.000,00 atau 99,28% dari target anggaran Rp1.206.245.637.000,00. Penerimaan Dana Alokasi Umum turun sebesar 6,42% dibanding dengan realisasi tahun 2019.

Rincian penerimaan Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

Tabel Rincian Dana Alokasi Umum

Uraian	Jumlah
DAU Reguler	1.161.533.560.000,00
DAU Tambahan Kelurahan	4.026.000.000,00
DAU Tambahan Penyetaraan Siltap Kades dan Perangkat Desa	31.944.733.000,00
Jumlah	**1.197.504.293.000,00**

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	387.316.381.000,00	391.574.573.136,00	4.258.192.136,00	101,10	386.546.619.443,00

Realisasi pendapatan dari Dana Alokasi Khusus tercapai sebesar Rp391.574.573.136,00 atau 101,10% dari target anggaran sebesar Rp387.316.381.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang realisasinya sebesar Rp386.546.619.443,00, realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,30%.

Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2020 sebesar Rp391.574.573.136,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
DAK Bidang Pendidikan	6.642.213.000,00	6.602.497.000,00	(39.716.000,00)	99,40	9.084.650.166,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB	24.586.181.000,00	22.756.578.205,00	(1.829.602.795,00)	92,56	16.899.295.509,00
DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan sanitasi	8.270.189.000,00	7.951.383.000,00	(318.806.000,00)	96,15	9.984.258.000,00
DAK Bidang Kedaulatan Pangan	1.785.000.000,00	1.785.000.000,00	0,00	100,00	4.478.593.315,00
DAK Bidang kelautan dan perikanan	1.275.495.000,00	998.716.070,00	(276.778.930,00)	78,30	1.374.221.038,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	278.355.000,00
DAK Bidang Sarana Prasarana Perdagangan	3.219.160.000,00	2.937.746.000,00	(281.414.000,00)	91,26	0,00
DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang	18.367.214.000,00	17.267.564.000,00	(1.099.650.000,00)	94,01	24.229.856.000,00
DAK Non Fisik	319.661.265.000,00	328.790.425.161,00	9.129.160.161,00	102,86	311.170.586.615,00
DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	2.149.398.000,00	2.149.398.000,00	0,00	100,00	2.972.290.000,00
DAK Bidang pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.233.650,00
DAK Bidang Pasar	1.025.000.000,00	0,00	(1.025.000.000,00)	0,00	4.714.371.000,00
DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	335.266.000,00	335.265.700,00	(300,00)	100,00	298.909.150,00
Jumlah	**387.316.381.000,00**	**391.574.573.136,00**	**4.258.192.136,00**	**101,10**	**386.546.619.443,00**

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	(Rp)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	450.269.534.000,00	450.269.534.000,00	0,00	100,00	429.981.020.600,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya realisasinya sebesar Rp450.269.534.000,00 atau 100%, merupakan Dana Penyesuaian yang diterima Kas Umum Daerah pada Tahun 2020 yang terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Dana Insentif Daerah	45.243.665.000,00	45.243.665.000,00	0,00	100,00	34.569.662.000,00
Dana Desa	405.025.869.000,00	405.025.869.000,00	0,00	100,00	395.411.358.600,00
Jumlah	**450.269.534.000,00**	**450.269.534.000,00**	**0,00**	100,00	**429.981.020.600,00**

Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kebumen memperoleh Dana Insentif Daerah sebesar Rp45.243.665.000,00 atau 100% dari target anggaran, Sedangkan Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebesar Rp405.025.869.000,00 (untuk 449 Desa) atau 100% dari anggarannya.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya	142.141.828.000,00	130.966.524.602,00	(11.175.303.398,00)	92,14	143.529.063.756,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan transfer yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	142.141.828.000,00	130.966.524.602,00	(11.175.303.398,00)	92,14	143.529.063.756,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp130.966.524.602,00 atau 92,14% dari anggaran Rp142.141.828.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp143.529.063.756,00, realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,75% . Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	30.088.085.262,00	34.990.646.828,00	(4.902.561.566,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.730.085.880,00	24.353.225.229,00	(9.623.139.349,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.879.147.338,00	35.624.880.513,00	(10.745.733.175,00)
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	230.823.370,00	322.719.905,00	(91.896.535,00)
Bagi Hasil dari pajak Rokok	61.038.382.752,00	48.237.591.281,00	12.800.791.471,00
Jumlah	**130.966.524.602,00**	**143.529.063.756,00**	**(12.562.539.154,00)**

5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan

Tabel Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	%	(Rp)
Bantuan Keuangan	19.127.000.000,00	17.991.610.589,00	(1.135.389.411,00)	94,06	9.936.200.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk tahun 2020 dari anggaran sebesar Rp19.127.000.000,00 realisasinya sebesar 94,06% atau Rp17.991.610.589,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Realisasi Bantuan Keuangan

Uraian	Realisasi
Bantuan TMMD Sengkuyung I, II & III Tahun 2020	837.000.000,00
Bantuan Sarana dan Prasarana (Banprop) Dinas Pendidikan	290.000.000,00
Bantuan saran dan prasarana Disporawisata Keg. Pembangunan Pemecah Gelombang obwis Pantai Suwuk	1.907.800.000,00
Bantuan sapras Banprop DPUPR Kegiatan peningkatan ruas jalan Geblug -Candirenggo	14.956.810.589,00
Jumlah	**17.991.610.589,00**

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	%	(Rp)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	135.310.300.000,00	136.507.976.560,00	1.197.676.560,00	100,89	137.498.110.012,00

Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp136.507.976.560,00 terdiri dari pendapatan hibah dari Pemerintah dan Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	1.393.643.553,00	7.208.963.041,00	(5815319488,00)	(80,67)
Pendapatan Hibah Dana BOS	135.114.333.007,00	130.289.146.971,00	4825186036,00	3,70
Jumlah	**136.507.976.560,00**	**137.498.110.012,00**	**(990.133.452,00)**	(0,72)

Rincian Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp1.393.643.553,00 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Uraian	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah Sanitasi dari Pemerintah (Hibah SAIIG)	1.049.600.000,00
Pendapatan Hibah IPDMIP	344.043.553,00
Jumlah	**1.393.643.553,00**

Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp135.114.333.007,00 dengan rincian:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan sesuai SP2B	135.169.480.000,00
Bunga Bank	149.713,00
Pendapatan atas LHP Tahun Lalu	64.663.281,00
Koreksi Tambah	196.422.941,00
Koreksi Kurang	(316.382.928,00)
Realisasi Pendapatan BOS TA 2020	**135.114.333.007,00**

5.1.2 Belanja

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja	2.298.321.076.000,00	2.138.449.904.280,00	(159.871.171.720,00)	93,04	2.246.525.240.727,00

Belanja Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp2.298.321.076.000,00 terealiasi 93,04% atau sebesar 2.138.449.904.280,00, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp2.246.525.240.727,00 maka mengalami penurunan sebesar 4,81%. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.138.449.904.280,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Operasi	1.969.694.866.000,00	1.839.460.030.013,00	(130.234.835.987,00)	93,39	1.880.683.876.699,00
Belanja Modal	313.381.210.000,00	288.801.049.018,00	(24.580.160.982,00)	92,16	365.840.794.028,00
Belanja Tak Terduga	15.245.000.000,00	10.188.825.249,00	(5.056.174.751,00)	66,83	570.000,00
Jumlah	**2.298.321.076.000,00**	**2.138.449.904.280,00**	**(159.871.171.720,00)**	**93,04**	**2.246.525.240.727,00**

Kontribusi masing-masing jenis belanja terhadap total Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Operasi yang mencapai 86,02% kemudian Belanja Modal sebesar 13,51% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,48%.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Operasi	1.969.694.866.000,00	1.839.460.030.013,00	(130.234.835.987,00)	93,39	1.880.683.876.699,00

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.839.460.030.013,00 mencapai 93,39% dari anggaran sebesar Rp1.969.694.866.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp1.880.683.876.699,00 mengalami penurunan 2,19%. adapun rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Pegawai	1.248.008.798.000,00	1.169.696.600.650,00	(78.312.197.350,00)	93,73	1.186.788.783.406,00
Belanja Barang dan Jasa	555.986.894.000,00	512.619.955.329,00	(43.366.938.671,00)	92,20	561.475.416.983,00
Belanja Hibah	127.611.770.000,00	122.828.836.872,00	(4.782.933.128,00)	96,25	91.027.595.845,00
Belanja Bantuan Sosial	38.087.404.000,00	34.314.637.162,00	(3.772.766.838,00)	90,09	41.392.080.465,00
Jumlah	**1.969.694.866.000,00**	**1.839.460.030.013,00**	**(130.234.835.987,00)**	**93,39**	**1.880.683.876.699,00**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	TA 2020				2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Pegawai	1.248.008.798.000,00	1.169.696.600.650,00	(78.312.197.350,00)	93,73	1.186.788.783.406,00

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.169.696.600.650,00 atau 93,73% dari anggaran dan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp17.092.182.756,00 atau sebesar 1,44%. Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Gaji dan Tunjangan	1.035.632.694.000,00	980.692.202.618,00	(54.940.491.382,00)	94,69	1.010.538.087.365,00
Tambahan Penghasilan PNS	83.955.031.000,00	70.978.554.505,00	(12.976.476.495,00)	84,54	59.664.584.085,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	17.697.000.000,00	17.483.700.000,00	(213.300.000,00)	98,79	16.942.960.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	560.000.000,00	530.796.717,00	(29.203.283,00)	94,79	4.849.915.600,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	96.556.000,00	37.591.938,00	(58.964.062,00)	38,93	638.304.885,00
Uang Lembur	3.717.316.000,00	3.567.742.814,00	(149.573.186,00)	95,98	5.425.585.403,00
Belanja Honorarium PNS	13.368.826.000,00	12.094.026.450,00	(1.274.799.550,00)	90,46	19.350.749.498,00
Belanja Honorarium Non PNS	38.031.372.000,00	34.780.956.527,00	(3.250.415.473,00)	91,45	32.692.080.167,00
Belanja Pegawai BLUD	29.786.311.000,00	25.059.731.710,00	(4.726.579.290,00)	84,13	21.066.713.204,00
Belanja Pegawai BOS	25.163.692.000,00	24.471.297.371,00	(692.394.629,00)	97,25	15.619.803.199,00
Jumlah	**1.248.008.798.000,00**	**1.169.696.600.650,00**	**(78.312.197.350,00)**	**93,73**	**1.186.788.783.406,00**

Rincian Belanja Pegawai per SKPD disajikan pada **lampiran 3.**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Barang dan Jasa	555.986.894.000,00	512.619.955.329,00	(43.366.938.671,00)	92,20	561.475.416.983,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Rp512.619.955.329,00 atau 92,20% dari anggaran, mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp48.870.264.654,00 atau sebesar 8,70%. Adapun rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25.976.412.000,00	24.973.814.686,00	(1.002.597.314,00)	96,14	18.121.517.616,00
Belanja Bahan/Material	17.525.703.000,00	16.812.118.594,00	(713.584.406,00)	95,93	17.688.183.826,00
Belanja Jasa Kantor	63.556.714.000,00	53.769.875.537,00	(9.786.838.463,00)	84,60	67.344.795.878,00
Belanja Premi Asuransi	22.580.920.000,00	16.144.896.865,00	(6.436.023.135,00)	71,50	56.398.616,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.639.480.000,00	9.567.872.655,00	(1.071.607.345,00)	89,93	10.571.846.788
Belanja Cetak dan Penggandaan	9.234.125.000,00	8.291.720.117,00	(942.404.883,00)	89,79	11.010.490.431,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	804.690.000,00	578.483.289,00	(226.206.711,00)	71,89	1.666.358.900,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	484.378.000,00	318.476.381,00	(165.901.619,00)	65,75	1.455.610.724,00
Belanja Sewa Alat Berat	194.546.000,00	183.555.000,00	(10.991.000,00)	94,35	195.427.500,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	869.003.000,00	604.304.900,00	(264.698.100,00)	69,54	1.848.190.809,00
Belanja Makanan dan Minuman	28.046.030.000,00	24.998.696.896,00	(3.047.333.104,00)	89,13	34.161.831.680,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	470.346.000,00	452.284.800,00	(18.061.200,00)	96,16	682.236.650,00
Belanja Pakaian Kerja	1.044.207.000,00	1.014.863.400,00	(29.343.600,00)	97,19	1.247.022.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	279.500.000,00	234.407.500,00	(45.092.500,00)	83,87	510.998.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	30.657.310.000,00	25.802.705.996,00	(4.854.604.004,00)	84,16	47.099.396.526,00
Belanja Pemeliharaan	37.221.577.000,00	34.769.843.635,00	(2.451.733.365,00)	93,41	44.557.201.172,00
Belanja Jasa Konsultansi	5.813.525.000,00	5.715.305.500,00	(98.219.500,00)	98,31	5.615.784.500,00
Belanja Hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	592.562.000,00	504.593.500,00	(87.968.500,00)	0,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	25.250.000,00	20.500.000,00	(4.750.000,00)	81,19	35.500.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.459.712.000,00	2.292.755.854,00	(166.956.146,00)	93,21	8.263.096.363,00
Belanja Barang Dana BOS	76.481.446.000,00	72.714.779.407,00	(3.766.666.593,00)	95,08	78.557.660.025,00
Biaya Jasa Pihak Ketiga	15.263.074.000,00	14.195.714.023,00	(1.067.359.977,00)	93,01	13.005.080.431,00
Belanja Barang Dan Jasa BLUD	173.292.661.000,00	168.816.840.592,00	(4.475.820.408,00)	97,42	171.893.687.948,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	896.400.000,00	893.000.000,00	(3.400.000,00)	99,62	1.328.025.000,00
Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.577.323.000,00	28.948.546.202,00	(2.628.776.798,00)	91,68	24.559.075.600,00
Jumlah	**555.986.894.000,00**	**512.619.955.329,00**	**(43.366.938.671,00)**	**92,20**	**561.475.416.983,00**

Belanja barang dan jasa selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 direalisasikan untuk menunjang operasional pemerintah Kabupaten Kebumen dan tersebar di masing masing SKPD/ Unit Kerja sebagaimana terinci dalam **lampiran 4.**

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Hibah	127.611.770.000,00	122.828.836.872,00	(4.782.933.128,00)	96,25	91.027.595.845,00

Adapun rincian realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000.000
Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	44.986.387.000,00	42.266.203.135,00	(2.720.183.865,00)	93,95	59.928.559.845,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	82.625.383.000,00	80.562.633.737,00	(2.062.749.263,00)	97,50	30.292.036.000,00
Jumlah	**127.611.770.000,00**	**122.828.836.872,00**	**(4.782.933.128,00)**	**96,25**	**91.027.595.845,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, terdapat kenaikan sebesar Rp31.801.241.027,00 atau 34,94%. Secara rinci kenaikan tersebut terjadi pada Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dimana mengalami kenaikan sebesar Rp50.270.597.737,00 atau sebesar 165,95%. Namun terdapat pula penurunan pada Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp17.662.356.710,00 atau sebesar 29,47%.

a. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat tahun 2020 sebesar Rp42.266.203.135,00 tersebar di SKPD sebagaimana terinci dalam Tabel **lampiran 5.**

b. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakat

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan tahun 2020 sebesar Rp80.562.633.737,00 terdiri dari rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	56.357.896.000,00	56.327.896.000,00	(30.000.000,00)	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	1.213.295.000,00	1.213.145.737,00	(149.263,00)	99,99	1.612.268.000,00
Belanja Hibah kepada Sekolah Swasta	22.514.192.000,00	20.506.592.000,00	(2.007.600.000,00)	91,08	25.629.768.000,00
Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan	2.540.000.000,00	2.515.000.000,00	(25.000.000,00)	99,02	3.050.000.000,00
Jumlah	**82.625.383.000,00**	**80.562.633.737,00**	**(2.062.749.263,00)**	**97,50**	**91.027.595.845,00**

Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan per SKPD

OPD Pengelola	Uraian Hibah	Realisasi
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan		
Kesbangpol	Belanja Hibah KPU Kebumen	44.061.371.000,00
	Belanja Hibah Bawaslu Kebumen	12.266.525.000,00
	Jumlah	**56.327.896.000,00**
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta		
Disporawisata	Hibah kepada KONI	888.145.737,00
Disporawisata	Hibah kepada NPC	100.000.000,00
Disporawisata	Hibah kepada KNPI	100.000.000,00
Dinsos PPKB	Hibah kepada DHC BPK 45 Kebumen	25.000.000,00
Bagian Kesra	Hibah kepada BAZNAS	100.000.000,00
	Jumlah	**1.213.145.737,00**
Belanja Hibah kepada Sekolah Swasta		
Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD	327.992.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	18.556.800.000,00
	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket A	39.000.000,00
	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket B	258.000.000,00
	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket C	1.324.800.000,00
	Jumlah	**20.506.592.000,00**
Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan		
Bagian Kesra	Belanja Hibah kepada Gereja	50.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Madin	72.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Masjid	1.400.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Mushola	768.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren	105.000.000,00
	Belanja Hibah kepada TPQ	120.000.000,00
	Jumlah	**2.515.000.000,00**
TOTAL		**80.562.633.737,00**

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Bantuan Sosial	38.087.404.000,00	34.314.637.162,00	(3.772.766.838,00)	90,09	41.392.080.465,00

Adapun rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisai Sosial	3.305.370.000,00	3.105.500.000,00	(199.870.000,00)	93,95	3.101.120.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	34.782.034.000,00	31.209.137.162,00	(3.572.896.838,00)	89,73	38.290.960.465,00
Jumlah	**38.087.404.000,00**	**34.314.637.162,00**	**(3.772.766.838,00)**	**90,09**	**41.392.080.465,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp7.077.443.303,00 atau 17,10%. Secara rinci penurunan tersebut terjadi pada Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebesar Rp7.081.823.303,00 atau sebesar 18,49% sedangkan Belanja bantuan Sosial kepada organisasi Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp4.380.000,00 atau sebesar 0,14%.

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial tahun 2020 terdiri dari Bantuan Sosial Pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Bantuan Sosial Pendidikan	3.305.370.000,00	3.105.500.000,00	(199.870.000,00)	93,95	3.101.120.000,00
Bantuan Sosial Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**3.305.370.000,00**	**3.105.500.000,00**	**(199.870.000,00)**	**93,95**	**3.101.120.000,00**

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebesar Rp3.105.500.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Belanja Bantuan Sosial Pendidikan

OPD	Uraian Bansos	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan	Belanja Bantuan Beasiswa Kurang Mampu SD/MI	1.711.200.000,00
	Belanja Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SMP/MTS	1.394.300.000,00
Jumlah		**3.105.500.000,00**

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebesar Rp31.209.137.162,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Uraian	TA 2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin	33.769.034.000,00	30.630.137.162,00	(3.138.896.838,00)	90,70	38.130.960.465,00
Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam	778.000.000,00	414.000.000,00	(364.000.000,00)	53,21	160.000.000,00
Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	235.000.000,00	165.000.000,00	(70.000.000,00)	70,21	0,00
Jumlah	**34.782.034.000,00**	**31.209.137.162,00**	**(3.572.896.838,00)**	89,73	**38.290.960.465,00**

Rincian realisasi dari masing-masing jenis Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat per SKPD disajikan pada Tabel **lampiran 6.**

5.1.2.2 Belanja Modal

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal	313.381.210.000,00	288.801.049.018,00	(24.580.160.982,00)	92,16	365.840.794.028,00

Anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2020 secara rinci sebagai berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Tanah	9.988.642.000,00	8.217.772.363,00	(1.770.869.637,00)	82,27	33.834.086.638,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.794.617.000,00	89.087.259.542,00	(5.707.357.458,00)	93,98	99.985.234.817,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.021.343.000,00	43.302.380.801,00	(2.718.962.199,00)	94,09	73.764.387.734,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.029.435.000,00	136.180.943.682,00	(13.848.491.318,00)	90,77	143.814.601.168,00
Belanja Modal Aset tetap Lainnya	12.547.173.000,00	12.012.692.630,00	(534.480.370,00)	95,74	14.089.486.071,00
Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	352.997.600,00
Jumlah	**313.381.210.000,00**	**288.801.049.018,00**	**(24.580.160.982,00)**	**92,16**	**365.840.794.028,00**

Realisasi Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp288.801.049.018,00 atau tercapai 92,16% dari anggaran sebesar Rp313.381.210.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp365.840.794.028,00 realisasi Belanja Modal tahun 2020 turun sebesar Rp77.042.041.910,00 atau 21,06%.

Belanja Modal yang penyerapannya tertinggi adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan sebesar 95,74% dari anggaran. Sedangkan realisasi terendah adalah Belanja Modal Tanah sebesar 82,27% dari anggaran.

Kontribusi terbesar Belanja Modal adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mencapai 47,15% dari realisasi total Belanja Modal, kemudian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30,85%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 14,99%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 4,16%, Belanja Modal Tanah 2,85%.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Tanah	9.988.642.000,00	8.217.772.363,00	(1.770.869.637,00)	82,27	33.834.086.638,00

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp8.217.772.363,00 atau 82,27% dari anggaran sebesar Rp9.988.642.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja modal tanah mengalami penurunan sebesar 75,71%. Rincian Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Tanah Perkampungan	1.675.215.000,00	1.199.655.960,00	(475.559.040,00)	71,61	3.291.393.746,00
Tanah untuk Bangunan Gedung	616.157.000,00	417.269.740,00	(198.887.260,00)	67,72	4.635.404.650,00
Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	6.247.270.000,00	5.990.141.898,00	(257.128.102,00)	95,88	25.173.415.072,00
Tanah BLUD.	1.450.000.000,00	610.704.765,00	(839.295.235,00)	42,12	733.873.170,00
Jumlah	**9.988.642.000,00**	**8.217.772.363,00**	**(1.770.869.637,00)**	**82,27**	**33.834.086.638,00**

Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2020 tersebar di SKPD sebagai berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD

OPD	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Dinas Pendidikan	360.250.000,00	264.709.340,00	(95.540.660,00)	73,48	1.876.420.000,00
Dinas Kesehatan	1.675.215.000,00	1.199.655.960,00	(475.559.040,00)	71,61	3.291.393.746,00
Puskesmas Alian	0,00	0,00	0,00	0,00	369.116.920,00
RSUD dr. Sudirman	1.450.000.000,00	610.704.765,00	(839.295.235,00)	42,12	364.756.250,00
DPU-PR	6.412.830.000,00	6.064.010.998,00	(348.819.002,00)	94,56	27.932.399.722,00
Disporawisata	90.347.000,00	78.691.300,00	(11.655.700,00)	87,10	0,00
Jumlah	**9.988.642.000,00**	**8.217.772.363,00**	**(1.770.869.637,00)**	82,27	**33.834.086.638,00**

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.794.617.000,00	89.087.259.542,00	(5.707.357.458,00)	93,98	99.985.234.817,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp89.087.259.542,00 atau 93,98% dari nilai anggaran Rp94.794.617.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar 10,90%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Alat-alat Besar Darat	0,00	0,00	-	0,00	1.830.550.000,00
Alat-alat Bantu	497.193.000,00	449.959.500,00	(47.233.500,00)	90,50	1.340.856.295,00
Alat Angkutan darat Bermotor	5.824.173.000,00	5.470.330.380,00	(353.842.620,00)	93,92	17.821.813.873,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	602.882.000,00	585.584.900,00	(17.297.100,00)	97,13	336.340.000,00
Alat Bengkel Bermesin	566.895.000,00	460.255.000,00	(106.640.000,00)	81,19	341.915.000,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	2.726.000,00	2.726.000,00	-	100,00	268.184.500,00
Alat Ukur	2.329.125.000,00	2.254.821.000,00	(74.304.000,00)	96,81	51.622.400,00
Alat Pengolahan	112.455.000,00	51.440.000,00	(61.015.000,00)	45,74	1.709.998.000,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	7.841.000,00	6.940.800,00	(900.200,00)	88,52	19.966.000,00
Alat Kantor	1.708.454.000,00	1.587.553.320,00	(120.900.680,00)	92,92	2.634.741.256,00
Alat Rumah Tangga	5.296.752.000,00	4.747.372.985,00	(549.379.015,00)	89,63	6.490.983.810,00
Komputer	6.295.937.000,00	6.087.126.517,00	(208.810.483,00)	96,68	11.042.389.439,00
Meja dan kursi kerja/rapat Pejabat	516.716.000,00	491.868.970,00	(24.847.030,00)	95,19	800.081.993,00
Alat Studio	631.434.000,00	608.081.850,00	(23.352.150,00)	96,30	1.790.128.000,00
Alat Komunikasi	397.225.000,00	361.205.200,00	(36.019.800,00)	90,93	581.186.200,00
Peralatan Pemancar	0,00	0,00	-		1.580.000,00
Alat Kedokteran	14.809.336.000,00	13.961.332.881,00	(848.003.119,00)	94,27	17.011.502.106,00
Alat kesehatan	346.617.000,00	319.135.000,00	(27.482.000,00)	92,07	3.726.177.100,00
Unit-unit Laboratorium	1.995.860.000,00	1.587.065.840,00	(408.794.160,00)	79,52	2.288.937.350,00
Alat Praktek/Peraga Sekolah	111.283.000,00	84.116.300,00	(27.166.700,00)	75,59	82.796.000,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	226.725.000,00	221.095.000,00	(5.630.000,00)	97,52	241.936.000,00
Persenjataan non senjata api	887.435.000,00	765.718.680,00	(121.716.320,00)	86,28	133.945.000,00
Alat Keamanan dan Perlindungan	469.442.000,00	467.037.409,00	(2.404.591,00)	99,49	1.260.996.889,00
Peralatan dan mesin – BLUD	21.563.776.000,00	19.617.063.565,00	(1.946.712.435,00)	90,97	10.115.615.861,00
Peralatan dan mesin – BOS	29.594.335.000,00	28.899.428.445,00	(694.906.555,00)	97,65	18.060.991.745,00
Jumlah	**94.794.617.000,00**	**89.087.259.542,00**	**(5.707.357.458,00)**	**93,98**	**99.985.234.817,00**

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2020 per SKPD disajikan pada **lampiran 7**.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.021.343.000,00	43.302.380.801,00	(2.718.962.199,00)	94,09	73.764.387.734,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp43.302.380.801,00 atau 94,09% dari nilai anggaran Rp46.021.343.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 41,30%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2020 terdiri dari berikut.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.006.286.000,00	41.376.510.082,00	(2.629.775.918,00)	94,02	63.811.576.556,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	-		0,00
Bangunan Bersejarah	67.880.000,00	65.162.000,00	(2.718.000,00)	96,00	764.844.900,00
Bangunan Tugu Peringatan	163.150.000,00	160.879.000,00	(2.271.000,00)	98,61	4.412.597.000,00
Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	0,00	0,00	-		206.446.000,00
Bangunan Rambu-Rambu	1.644.137.000,00	1.561.655.919,00	(82.481.081,00)	94,98	3.207.144.772,00
Bangunan – BLUD	139.890.000,00	138.173.800,00	(1.716.200,00)	98,77	1.361.778.506,00
Jumlah	**46.021.343.000,00**	**43.302.380.801,00**	**(2.718.962.199,00)**	94,09	**73.764.387.734,00**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD disajikan pada Tabel **lampiran 8.**

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.029.435.000,00	136.180.943.682,00	(13.848.491.318,00)	90,77	143.814.601.168,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp136.180.943.682,00 atau 90,77% dari nilai anggaran Rp150.029.435.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar 5,31%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Jalan	98.444.208.000,00	87.531.429.100,00	(10.912.778.900,00)	88,91	89.618.030.930,00
Jembatan	11.356.912.000,00	10.761.629.750,00	(595.282.250,00)	94,76	9.792.518.450,00
Bangunan Air irigasi	0,00	0,00	-		213.215.000,00
Bangunan Pengaman sungai dan Penanggulangan BA	5.191.196.000,00	4.912.653.256,00	(278.542.744,00)	94,63	6.551.976.175,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	14.454.216.000,00	13.488.746.000,00	(965.470.000,00)	93,32	6.243.005.412,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	6.165.189.000,00	5.783.915.500,00	(381.273.500,00)	93,82	5.479.481.475,00
Bangunan Air Kotor	5.409.125.000,00	5.200.761.350,00	(208.363.650,00)	96,15	4.702.696.575,00
Instalasi Air Minum/Air Bersih	3.006.975.000,00	2.985.274.768,00	(21.700.232,00)	99,28	4.799.290.000,00
Instalasi Air Kotor	472.400.000,00	466.109.400,00	(6.290.600,00)	98,67	2.025.245.000,00
Instalasi Pengolahan Sampah	342.960.000,00	332.718.000,00	(10.242.000,00)	97,01	5.715.024.790,00
Instalasi Gardu Listrik	5.000.000,00	4.388.100,00	(611.900,00)	87,76	3.652.981.904,00
Pengadaan Jaringan Listrik	5.089.240.000,00	4.621.504.540,00	(467.735.460,00)	90,81	381.798.879,00
Jaringan Telepon	87.814.000,00	87.813.918,00	(82,00)	100,00	1.585.011.250,00
Jalan Irigasi jaringan BLUD	4.200.000,00	4.000.000,00	(200.000,00)	95,24	3.054.325.328,00
Jumlah	**150.029.435.000,00**	**136.180.943.682,00**	**(13.848.491.318,00)**	**90,77**	**143.814.601.168,00**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 9.**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Aset tetap Lainnya	12.547.173.000,00	12.012.692.630,00	(534.480.370,00)	95,74	14.089.486.071,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp12.012.692.630,00 atau 95,74% dari nilai anggaran Rp12.547.173.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar 14,74%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Buku	36.856.000,00	36.800.000,00	(56.000,00)	99,85	1.597.136.458,00
Barang-Barang Perpustakaan	750.000,00	625.000,00	0,00	83,33	0,00
Barang Bercorak Kebudayaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	575.720.500,00
Alat Olah Raga lainnya	54.307.000,00	53.005.000,00	0,00	97,60	0,00
Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	159.595.000,00
Aset tetap lainnya BLUD	7.500.000,00	5.724.000,00	(1.776.000,00)	76,32	6.285.000,00
Aset tetap lainnya BOS	12.439.260.000,00	11.908.038.630,00	(531.221.370,00)	95,73	11.750.749.113,00
Jumlah	**12.547.173.000,00**	**12.012.692.630,00**	**(534.480.370,00)**	**95,74**	**14.089.486.071,00**

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 10.**

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	352.997.600,00

Pada Tahun 2020 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud sedangkan realisasi di tahun 2019 sebesar Rp352.997.600,00.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Tak Terduga	15.245.000.000,00	10.188.825.249,00	(5.056.174.751,00)	66,83	570.000,00

Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp10.188.825.249,00 atau 66,83% dari nilai anggaran Rp15.245.000.000,00. Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp10.188.825.249,00 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga

No.	Uraian	Realisasi
1.	Pengembalian biaya retribusi IMB An.Elsa Aspiana Larassaty Desa Ambalkebrek Kecamatan Ambal	1.181.000,00
2.	Pembayaran Pengembalian Sisa Dana Desa Tahun 2019	308.348.716,00
3.	Belanja BTT untuk tanggap darurat bencana Covid-19	9.879.295.533,00
	Jumlah	**10.188.825.249,00**

Adapun Rincian Realisasi Belanja Belanja Tak Terduga untuk tanggap darurat Covid-19 sebagai berikut:

Tabel Rincian Realisasi Belanja BTT untuk tanggap darurat Covid-19

No.	Jenis belanja	Realisasi	Keterangan
1.	Belanja Barang dan Jasa	6.348.031.533,00	Bahan habis pakai, Obat, makanan pokok, biaya transport dan akomodasi
2.	Belanja Modal	3.056.264.000,00	Laborat PCR SWAB, Thermogun,Handspray
3.	Belanja Hibah	150.000.000,00	Bantuan Keuangan kepada Polres Kebumen dan Kodim Kebumen
4.	Belanja Bansos	325.000.000,00	Program "Lekang Guna"
	Jumlah	**9.879.295.533,00**	

5.1.3 Transfer

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer	599.864.027.000,00	599.282.823.700,00	(581.203.300,00)	99,90	563.024.203.900,00

Rincian realisasi transfer sebesar Rp 599.282.823.700,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	13.696.177.000,00	13.527.756.700,00	(168.420.300,00)	98,77	15.502.510.500,00
Transfer Bantuan Keuangan	586.167.850.000,00	585.755.067.000,00	(412.783.000,00)	99,93	547.521.693.400,00
Jumlah	**599.864.027.000,00**	**599.282.823.700,00**	**(581.203.300,00)**	**99,90**	**563.024.203.900,00**

Realisasi transfer sebesar Rp599.282.823.700,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp599.864.027.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, Transfer tahun 2020 naik sebesar 6,44%.

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	13.696.177.000,00	13.527.756.700,00	(168.420.300,00)	98,77	15.502.510.500,00

Realisasi transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.677.560.000,00	9.657.463.900,00	(20.096.100,00)	99,79	9.981.797.400,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.018.617.000,00	3.870.292.800,00	(148.324.200,00)	96,31	5.520.713.100,00
Jumlah	**13.696.177.000,00**	**13.527.756.700,00**	(168.420.300,00)	98,77	**15.502.510.500,00**

5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.677.560.000,00	9.657.463.900,00	(20.096.100,00)	99,79	9.981.797.400,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp9.657.463.900,00 terdiri dari Transfer Bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang merupakan transfer kepada Pemerintah Desa atas bagi hasil pajak daerah yang disalurkan untuk 449 desa berdasarkan Peraturan Bupati No.55 tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020.

5.1.3.1.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.018.617.000,00	3.870.292.800,00	(148.324.200,00)	96,31	5.520.713.100,00

Rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp3.870.292.800,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%	(Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan	3.733.986.000,00	3.728.996.300,00	(4.989.700,00)	99,87	5.342.350.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pihak ketiga	284.631.000,00	141.296.500,00	(143.334.500,00)	49,64	178.363.100,00
Jumlah	**4.018.617.000,00**	**3.870.292.800,00**	**(148.324.200,00)**		

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa sebesar Rp3.728.996.300,00 merupakan transfer bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati No.55 tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020.

Sedangkan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pihak Ketiga senilai Rp141.296.500,00 direalisasikan untuk bagi hasil kepada Perum Perhutani Divisi regional Jateng KPH Kedu Selatan sebesar Rp91.727.100,00 dan kepada KPIPW Serayu Bogowonto Sempor sebesar Rp49.569.400,00.

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bantuan Keuangan	586.167.850.000,00	585.755.067.000,00	(412.783.000,00)	99,93	547.521.693.400,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	584.102.974.000,00	583.690.191.000,00	(412.783.000,00)	99,93	546.159.768.400,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.064.876.000,00	2.064.876.000,00	0,00	100,00	1.361.925.000,00
Jumlah	**586.167.850.000,00**	**585.755.067.000,00**	**(412.783.000,00)**	**99,93**	**547.521.693.400,00**

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa realisasinya sebesar Rp583.690.191.000,00 atau 99,93% sedangkan Tranfer Bantuan Keuangan Lainnya terealisasi sebesar Rp2.064.876.000,00 atau 100,00% dari anggaran.

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	584.102.974.000,00	583.690.191.000,00	(412.783.000,00)	99,93	546.159.768.400,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp583.690.191.000,00 adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Uraian Transfer	Keterangan	Realisasi	
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	Perbup No.2 Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020	Rp	164.654.841.500
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat Yang Bersumber Dari APBN	Perbup Kbm No.12 Th.2019 Tgl.22-2-2019 & Perbup Kbm No.12 Th.2020 Tgl.16-3-2020.	Rp	1.671.864.400
Dana Desa	Perbup No.33 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020	Rp	405.025.869.000
Pembangunan Kawasan Perdesaan	SK Bupati No.050/387 Tahun 2020 tanggal 8 Oktober 2020	Rp	1.000.000.000
Bantuan Keuangan Desa Berinovasi	Perbup No.14 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 dan SK Bupati No.414.4/196 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020	Rp	2.000.000.000
Bantuan Keuangan Kawasan Kumuh	SK Bupati No.050/278 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020	Rp	1.650.000.000
Bantuan Keuangan Operasional TPQ	SK Bupati No.489/169 Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020	Rp	2.230.000.000
Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	SK Bupati No.050/238 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020	Rp	180.414.100
Belanja Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS Perangkat Desa	Perbup No.2 Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020	Rp	5.277.202.000
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		**Rp**	**583.690.191.000**

Untuk rincian Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) per desa tercantum pada **lampiran 11 dan lampiran 12.**

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.064.876.000,00	2.064.876.000,00	0,00	100,00	1.361.925.000,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp 2.064.876.000,00 merupakan bantuan keuangan kepada partai politik berdasar Perda No.12 Th 2007 tanggal 12-9-2007 dan Keputusan Gubernur Jateng No.163.1/73 Tahun 2019 tanggal 26-8-2019, masing-masing sebesar berikut:

Tabel Rincian Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

No.	Partai Politik	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)	162.873.000,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	356.487.000,00
3.	Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	126.141.000,00
4.	Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	464.832.000,00
5.	Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	228.741.000,00
6.	Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	281.346.000,00
7.	Bantuan Keuangan kepada Parta Demokrat	133.671.000,00
8.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	146.091.000,00
9.	Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	164.694.000,00
	Jumlah	**2.064.876.000,00**

5.1.4 Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pembiayaan Neto	194.617.918.000,00	194.582.918.416,18	(34.999.583,82)	99,98	193.722.379.502,50

Terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Penerimaan Pembiayaan	204.167.918.000,00	204.132.918.416,18	(34.999.583,82)	99,98	203.192.379.502,50
Pengeluaran Pembiayaan	9.550.000.000,00	9.550.000.000,00	0,00	100,00	9.470.000.000,00
Pembiayaan Neto	**194.617.918.000,00**	**194.582.918.416,18**	**(34.999.583,82)**	**99,98**	**193.722.379.502,50**

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Penerimaan Pembiayaan	204.167.918.000,00	204.132.918.416,18	(34.999.583,82)	99,98	203.192.379.502,50

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp204.132.918.416,18 dirinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
SILPA tahun sebelumnya	202.667.918.000,00	202.667.918.416,18	416,18	100,00	201.692.379.502,50
Penerimaan Kembali Piutang	1.500.000.000,00	1.465.000.000,00	(35.000.000,00)	97,67	1.500.000.000,00
Jumlah	**204.167.918.000,00**	**204.132.918.416,18**	**(34.999.583,82)**	**99,98**	**203.192.379.502,50**

Pada Tahun Anggaran 2020 seluruh SilPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp202.667.918.416,18 direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan senilai Rp202.667.918.000,00. Sedangkan Penerimaan kembali piutang merupakan penerimaan kembali dana talangan pengadaan pangan sebesar Rp1.465.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Penerimaan Kembali Piutang

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kelompok Tani Ngesti Utomo Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun	55.000.000,00
2	Gapoktan Tani Mulyo Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen	55.000.000,00
3	Gapoktan Usaha Agribisnis Karya Dadi Desa Caruban Kecamatan Adimulyo	55.000.000,00
4	Gapoktan Sumber Barokah Desa Kedungweru Kecamatan Ayah	55.000.000,00
5	Gapoktan Padi Mas Desa Bumirejo Kecamatan Puring	55.000.000,00
6	Gapoktan Sumber Jaya Desa Jatijajar Kecamatan Ayah	55.000.000,00
7	Kelompok Tani Makaryo Sari Desa sukomulyo Kecamatan Rowokele	55.000.000,00
8	Gapoktan Mitra Tani Desa Tresnorejo Kecamatan petanahan	50.000.000,00
9	Kelompok Tani Usaha Karya Tani Desa Caruban Kecamatan Adimulyo	45.000.000,00
10	Gapoktan Sri Jaya Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen	55.000.000,00
11	Kelompok Tani Redi Mulyo Desa Watukelir Kecamatan Ayah	50.000.000,00
12	Gapoktan Tani Sejahtera Desa Pagedangan Kecamatan Ambal	55.000.000,00
13	Gapoktan Ngudi Makmur Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan	55.000.000,00
14	Gapoktan Loh Jinawi Desa Candiwulan	50.000.000,00
15	Gapoktan Tani Sari Rimba Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam	50.000.000,00
16	Kelompok Tani Makmur Desa Trikarso Kecamatan Sruweng	45.000.000,00
17	Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Podourip Kecamatan Petanahan	55.000.000,00
18	Kelompok Tani Sumber Karya Tani Desa Sitirejo Kecamatan Klirong	45.000.000,00
19	Kelompok Tani Pucung Desa Mangunweni Kecamatan Ayah	55.000.000,00
20	Gapoktan Tani Maju Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen	50.000.000,00
21	Gapoktan Asri Desa Peneket Kecamatan Ambal	35.000.000,00
22	Kelompok Tani Purwo Tani Desa Redisari Kecamatan Rowokele	50.000.000,00
23	Kelompok Tani Tirto Mulyo Desa Sekarteja Kecamatan Adimulyo	50.000.000,00
24	Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren	45.000.000,00
25	Kelompok Tani Usodo Desa Sidorejo Kecamatan Ambal	45.000.000,00
26	Gapoktan Enggal Maju Desa Tanjungsari Kecamatan kutowinangun	35.000.000,00
27	Kelompok Tani Bahagia Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso	45.000.000,00
28	Kelompok Tani Dewi Sri Desa Lerep Kecamatan Poncowarno	35.000.000,00
29	Kelompok Tani Karya Mukti Desa sampang Kecamatan Sempor	45.000.000,00
30	Kelompok Tani Mergo Rahayu Desa kuwaru Kecamatan kuwarasan	35.000.000,00
	JUMLAH	**1.465.000.000,00**

Dari pemberian pinjaman kepada 31 Gapoktan/Kelompok Tani berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.520/121 tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020, terdapat 1 kelompok tani yang belum membayarkan pengembalian di tahun 2020 yaitu Kelompok Tani Karya Utama Desa Buayan Kecamatan Buayan dengan nilai pinjaman sebesar Rp35.000.000,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	9.550.000.000,00	9.550.000.000,00	0,00	100,00	9.470.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 Rp9.550.000.000,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Penyertaan Modal/Invesatasi Pemerintah Daerah	8.050.000.000,00	8.050.000.000,00	0,00	100,00	7.970.000.000,00
Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00	1.500.000.000,00
Jumlah	**9.550.000.000,00**	**9.550.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**9.470.000.000,00**

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Penyertaan Modal/Invesatasi Pemerintah Daerah	8.050.000.000,00	8.050.000.000,00	0,00	100,00	7.970.000.000,00

Penyertaan modal sebesar Rp8.050.000.000,00 merupakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai Perda No.8 Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015 yang teralokasi untuk:

Tabel Rincian Realisasi Penyertaan Modal

No.	Nama BUMD	Jumlah (Rp)
1	Penyertaan Modal pada PDAM	3.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal pada PD. Apotik Lukulo	50.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Kebumen	1.500.000.000,00
4	Penyertaan Modal pada Bank Jateng	3.500.000.000,00
	Jumlah	**8.050.000.000,00**

5.1.4.2.2 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya

Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah

Uraian	2020				Realisasi 2019 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Investasi Non Permanen Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0.00	100,00	1.500.000.000,00

Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp1.500.000.000,00 direalisasikan untuk pemberian pinjaman kepada 31 Gapoktan/Kelompok Tani berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.520/121 tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020.

Pengeluaran pembiayaan untuk Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp1.500.000.000,00 tersebut direalisasikan dengan SP2D No.00136/BTL-Non GJ/PEMBY/2020 kepada 31 Gapoktan/Kelompok Tani sebagai berikut:

Tabel Rincian Pengeluaran Pembiayaan – Investasi Non Permanen Lainnya

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kelompok Tani Ngesti Utomo Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun	55.000.000,00
2	Gapoktan Tani Mulyo Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen	55.000.000,00
3	Gapoktan Usaha Agribisnis Karya Dadi Desa Caruban Kecamatan Adimulyo	55.000.000,00
4	Gapoktan Sumber Barokah Desa Kedungweru Kecamatan Ayah	55.000.000,00
5	Gapoktan Padi Mas Desa Bumirejo Kecamatan Puring	55.000.000,00
6	Gapoktan Sumber Jaya Desa Jatijajar Kecamatan Ayah	55.000.000,00
7	Kelompok Tani Makaryo Sari Desa sukomulyo Kecamatan Rowokele	55.000.000,00
8	Gapoktan Mitra Tani Desa Tresnorejo Kecamatan petanahan	50.000.000,00
9	Kelompok Tani Usaha Karya Tani Desa Caruban Kecamatan Adimulyo	45.000.000,00
10	Gapoktan Sri Jaya Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen	55.000.000,00
11	Kelompok Tani Redi Mulyo Desa Watukelir Kecamatan Ayah	50.000.000,00
12	Gapoktan Tani Sejahtera Desa Pagedangan Kecamatan Ambal	55.000.000,00
13	Gapoktan Ngudi Makmur Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan	55.000.000,00
14	Gapoktan Loh Jinawi Desa Candiwulan	50.000.000,00
15	Gapoktan Tani Sari Rimba Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam	50.000.000,00
16	Kelompok Tani Makmur Desa Trikarso Kecamatan Sruweng	45.000.000,00
17	Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Podourip Kecamatan Petanahan	55.000.000,00
18	Kelompok Tani Sumber Karya Tani Desa Sitirejo Kecamatan Klirong	45.000.000,00
19	Kelompok Tani Pucung Desa Mangunweni Kecamatan Ayah	55.000.000,00
20	Gapoktan Tani Maju Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen	50.000.000,00
21	Gapoktan Asri Desa Peneket Kecamatan Ambal	35.000.000,00
22	Kelompok Tani Purwo Tani Desa Redisari Kecamatan Rowokele	50.000.000,00
23	Kelompok Tani Tirto Mulyo Desa Sekarteja Kecamatan Adimulyo	50.000.000,00
24	Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren	45.000.000,00
25	Kelompok Tani Usodo Desa Sidorejo Kecamatan Ambal	45.000.000,00
26	Gapoktan Enggal Maju Desa Tanjungsari Kecamatan kutowinangun	35.000.000,00
27	Kelompok Tani Bahagia Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso	45.000.000,00
28	Kelompok Tani Dewi Sri Desa Lerep Kecamatan Poncowarno	35.000.000,00
29	Kelompok Tani Karya Mukti Desa sampang Kecamatan Sempor	45.000.000,00
30	Kelompok Tani Mergo Rahayu Desa kuwaru Kecamatan kuwarasan	35.000.000,00
31	Kelompok Tani Karya Utama Desa Buayan Kec.Buayan	35.000.000,00
	JUMLAH	**1.500.000.000,00**

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tabel Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	2020				Realisasi 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	219.837.205.064,98	219.837.205.064,98	100,00	219.837.205.064,98

Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp219.837.205.064,98. Adapun perincian SiLPA adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian SILPA Tahun Anggaran 2020

Rincian SILPA	Kas (Rp)	Utang Pfk (Rp)	Silpa (Rp)
SILPA di RKUD	142.972.001.462,00	0,00	142.972.001.462,00
SILPA di Bendahara Penerimaan	34.633.880,00	0,00	34.633.880,00
SILPA di Bendahara Pengeluaran	206.799,00	136.400,00	70.399,00
SILPA BLUD RSUD Soedirman	42.520.446.365,00	0,00	42.520.446.365,00
SILPA BLUD RSUD Prembun	14.196.140.252,00	14.651.243,00	14.181.489.009,00
SILPA BLUD Puskesmas	14.647.152.828,98	7.817.570,00	14.639.335.258,98
SILPA Kas Lainnya	5.500.938.428,00	11.709.737,00	5.489.228.691,00
Jumlah	**219.871.520.014,98**	**34.314.950,00**	**219.837.205.064,98**

Adapun SiLPA tahun anggaran 2020 yang berada di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sejumlah Rp142.972.001.462,00 terdiri dari:

Tabel Rincian SILPA di Kas daerah Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Jumlah
1	DAK Fisik 2020	164.706.315,00
2	BOP PAUD	1.809.000.000,00
3	Dana Pelayanan Adminduk	784.318.054,00
4	Dana PK2UKM	154.808.700,00
5	BOP Kesetaraan	498.750.000,00
6	Dana Pelayanan Kepariwisataan	-
7	BOKB	661.106.877,00
8	TKG	64.691.200,00
9	TPG	643.022.066,00
10	Tamsil guru	882.500.000,00
11	DAU Tambahan Kelurahan 2020	172.498.750,00
12	DAU Tambahan Kelurahan 2019	2.305,00
13	DID murni	3.627.187.755,00
14	DID Tambahan inovasi	39.756.000,00
15	Banprov murni	1.825.000,00
16	Banprov perubahan/tambahan	5.360.860.589,00
17	DBHCHT	577.429.418,00
18	Bantuan Operasional Kesehatan	12.975.239.529,00
19	BOK Tambahan Insentif Covid	8.895.718.379,00
20	DAK Fisik kumulatif s.d 2019	1.647.872.802,00
	TOTAL SISA DANA MANDATORI (1-20)	**38.961.293.739,00**
21	sisa gaji dan tunjangan	54.940.491.382,00
22	sisa tamsil	12.976.476.495,00
23	belanja tak terduga	5.056.174.751,00
24	Sisa Tender	12.524.570.207,00
25	pelampauan pendapatan pajak	11.180.584.517,00
26	efisiensi	7.332.410.371,00
	TOTAL SISA DANA (21 - 26)	**104.010.707.723,00**
	SILPA RKUD	**142.972.001.462,00**

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp202.667.918.416,18.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2019 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp202.667.918.416,18.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp219.837.205.064,98 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus/ ~~Defisit~~ Anggaran	Rp. 25.254.286.648,80
- Pembiayaan Netto	Rp. 194.582.918.416,18
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp. 219.837.205.064,98

5.2.4 Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 artinya tidak ada koreksi yang menambah ataupun mengurangi Saldo Anggaran Lebih Tahun berjalan.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp219.837.205.064,98. Adapun perincian SiLPA Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

Tabel Rincian SILPA Tahun Anggaran 2019

Rincian SILPA	Kas (Rp)	Utang Pfk (Rp)	Silpa (Rp)
Kas di Kas Daerah	142.972.001.462,00	0,00	142.972.001.462,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	206.799,00	136.400,00	70.399,00
Kas di Bendahara Peneimaan	34.633.880,00	0,00	34.633.880,00
Kas di BLUD	71.363.739.445,98	22.468.813,00	71.341.270.632,98
Kas Lainnya	5.500.938.428,00	11.709.737,00	5.489.228.691,00
Jumlah	**219.871.520.014,98**	**34.314.950,00**	**219.837.205.064,98**

Adapun Silpa yang berada di Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp142.972.001.462 terdiri dari:

Tabel Rincian Silpa di Kas Daerah TA 2020

No.	Uraian	Jumlah
1	DAK Fisik 2020	164.706.315,00
2	BOP PAUD	1.809.000.000,00
3	Dana Pelayanan Adminduk	784.318.054,00
4	Dana PK2UKM	154.808.700,00
5	BOP Kesetaraan	498.750.000,00
6	Dana Pelayanan Kepariwisataan	-
7	BOKB	661.106.877,00
8	TKG	64.691.200,00
9	TPG	643.022.066,00
10	Tamsil guru	882.500.000,00
11	DAU Tambahan Kelurahan 2020	172.498.750,00
12	DAU Tambahan Kelurahan 2019	2.305,00
13	DID murni	3.627.187.755,00
14	DID Tambahan inovasi	39.756.000,00
15	Banprov murni	1.825.000,00
16	Banprov perubahan/tambahan	5.360.860.589,00
17	DBHCHT	577.429.418,00
18	Bantuan Operasional Kesehatan	12.975.239.529,00
19	BOK Tambahan Insentif Covid	8.895.718.379,00
20	DAK Fisik kumulatif s.d 2019	1.647.872.802,00
	TOTAL SISA DANA MANDATORI (1-20)	**38.961.293.739,00**
21	sisa gaji dan tunjangan	54.940.491.382,00
22	sisa tamsil	12.976.476.495,00
23	belanja tak terduga	5.056.174.751,00
24	Sisa Tender	12.524.570.207,00
25	pelampauan pendapatan pajak	11.180.584.517,00
26	efisiensi	7.332.410.371,00
	TOTAL SISA DANA (21 - 26)	**104.010.707.723,00**
	SILPA RKUD	**142.972.001.462,00**

5.3 Neraca

5.3.1 Aset

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp4.512.659.984.485,00	Rp4.482.323.838.554,00

Saldo Aset terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Aset

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Aset Lancar	325.194.591.970,47	298.354.393.076,63	26.840.198.893,84	9,00
Investasi Jangka Panjang	150.432.666.979,57	138.846.162.484,71	11.586.504.494,86	8,34
Aset Tetap	3.923.150.573.009,26	3.928.360.648.411,66	(5.210.075.402,40)	(0,13)
Aset Lainnya	113.882.152.525,70	116.762.634.581,00	(2.880.482.055,30)	(2,47)
Jumlah	**4.512.659.984.485,00**	**4.482.323.838.554,00**	**30.336.145.931,00**	0,68

Saldo Aset tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp30.336.145.931,00 atau 0,68% antara lain disebabkan oleh:

a. Dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016.
b. Belanja Modal Tahun berjalan.
c. Penerimaan Hibah dari pihak lain.

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp325.194.591.970,47	Rp298.354.393.076,63

Saldo Aset Lancar terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Aset Lancar

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Kas di Kas Daerah	142.972.001.462,00	150.395.584.664,00	(7.423.583.202,00)	(4,94)
Kas di Bendahara Penerimaan	34.633.880,00	54.699.800,00	(20.065.920,00)	(36,68)
Kas di Bendahara Pengeluaran	206.799,00	13.592.215,00	(13.385.416,00)	(98,48)
Kas di BLUD	71.363.739.445,98	43.835.358.019,98	27.528.381.426,00	62,80
Kas Lainnya	5.500.938.428,00	8.499.558.356,20	(2.998.619.928,20)	(35,28)
Piutang Pendapatan	26.812.688.448,00	24.932.358.986,00	1.880.329.462,00	7,54
Piutang Lainnya	49.081.669.722,00	42.118.746.399,00	6.962.923.323,00	16,53
Penyisihan Piutang	(8.695.251.223,75)	(7.220.940.055,00)	(1.474.311.168,75)	20,42
Beban dibayar dimuka	65.598.889,00	72.036.588,00	(6.437.699,00)	(8,94)
Persediaan	38.058.366.120,24	35.653.398.103,45	2.404.968.016,79	6,75
Jumlah	**325.194.591.970,47**	**298.354.393.076,63**	**26.840.198.893,84**	**9,00**

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp142.972.001.462,00	Rp150.395.584.664,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 merupakan saldo Kas Daerah pada rekening bank dalam bentuk giro dan deposito dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Kas di Kas Daerah

Uraian	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Rekening Giro	142.972.001.462,00	150.395.584.664,00	(7.423.583.202,00)	(4,94)
Rekening Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**142.972.001.462,00**	**150.395.584.664,00**	**(7.423.583.202,00)**	(4,94)

Kas di Kas Daerah dalam bentuk giro senilai Rp142.972.001.462,00 tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-01372-9. Sedangkan Kas di Kas Daerah dalam bentuk deposito per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 bahwa Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp34.633.880,00	Rp54.699.800,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 tersebut merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima namun belum disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah, terdiri dari:

Tabel Kas di Bendahara Penerimaan

No.	SKPD	2020	2019
1.	Dinas Perhubungan	138.500,00	0,00
2.	Disporawisata	18.650.000,00	53.114.800,00
3.	Dinlutkan	2.297.380,00	0,00
4.	Disperindag	13.548.000,00	0,00
5.	Distapang	0,00	1.585.000,00
	Jumlah	**34.633.880,00**	**53.114.800,00**

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan dirinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah	Ket
1.	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	33.500,00	disetor 7 Januari 2021
2.	Ret Terminal	105.000,00	disetor 7 Januari 2021
	Jumlah	**138.500,00**	

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Disporawisata

NO	OBWIS	RET KEBERSIHAN	RET PARKIR	RET PKD	RET TEMPAT REKREASI	JUMLAH
1.	Pantai Suwuk	0,00	809.000,00	0,00	4.515.000,00	5.324.000,00
2.	Waduk Sempor	0,00	109.000,00	0,00	1.494.000,00	1.603.000,00
3.	PAP Krakal	0,00	62.000,00	945.000,00	565.000,00	1.572.000,00
4.	Gua Petruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pantai karangbolong	0,00	89.000,00	0,00	480.000,00	569.000,00
6.	Pantai Logending	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Gua Jatijajar	0,00	359.000,00	0,00	5.981.000,00	6.340.000,00
8.	Waduk wadaslintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pantai Petanahan	150.000,00	72.000,00	0,00	2.520.000,00	2.742.000,00
10.	Komleks Stadion	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Jumlah	**150.000,00**	**1.500.000,00**	**1.445.000,00**	**15.555.000,00**	**18.650.000,00**

Pendapatan tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 4, 8, dan 10 Januari 2021.

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Dinlutkan

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah	Keterangan
1.	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI Pasir)	2.297.380,00	disetor tgl 4 Jan 2021
	Jumlah	**2.297.380,00**	

Sedangkan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Disperindag

No.	**UPT**	**Ret Pelayanan Pasar**	**Ret Pelayanan Persampahan**	**Ret Tempat Khusus Parkir**	**Jumlah**
1.	UPT Pasar Wilayah I	1.219.000,00	236.200,00	607.000,00	2.062.200,00
2.	UPT Pasar Wilayah II	2.748.000,00	159.000,00	0,00	2.907.000,00
3.	UPT Pasar Wilayah III	1.301.400,00	226.900,00	1.984.000,00	3.512.300,00
4.	UPT Pasar Wilayah IV	1.714.500,00	256.000,00	3.096.000,00	5.066.500,00
	Jumlah	**6.982.900,00**	**878.100,00**	**5.687.000,00**	**13.548.000,00**

Pendapatan tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 4 Januari 2021.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp206.799,00	Rp 13.592.215,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UP yang terlambat disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan pajak yang terlambat disetor ke Kas Negara, terdiri dari.

Tabel Kas di Bendahara Pengeluaran

NO.	OPD	SISA UP	Utang PFK	Jumlah	KET
1.	SMPN 3 Satap Karangsambung		136.400,00	136.400,00	disetor tgl. 18 Jan 2021
2.	Disperkim-LH (UPTD Wil Barat)	70.399,00		70.399,00	disetor tgl. 7 Jan 2021
	Jumlah	**70.399,00**	**136.400,00**	**206.799,00**	

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp71.363.739.445,98	Rp43.835.358.019,98

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2020

No.	OPD	Kas BLUD (Rp)	Utang PFK (Rp)	Jumlah (Rp)	Rekening BLUD
1	Puskesmas Adimulyo	503.978.977,00	-	503.978.977,00	1.100.001.264
2	Puskesmas Alian	651.783.279,00	-	651.783.279,00	1.008.006.241
3	Puskesmas Ambal I	391.034.076,00	-	391.034.076,00	1.115.000.906
4	Puskesmas Ambal II	362.432.174,00	1.147.100	363.579.274,00	1.115.000.914
5	Puskesmas Ayah I	396.147.971,00	-	396.147.971,00	1.066.001.217
6	Puskesmas Ayah II	288.738.899,00	-	288.738.899,00	1.066.001.209
7	Puskesmas Bonorowo	371.332.414,00	-	371.332.414,00	1.071.001.373
8	Puskesmas Buayan	669.818.354,00	-	669.818.354,00	1.066.001.241
9	Puskesmas Buluspesantren I	192.473.256,00	-	192.473.256,00	1.115.000.922
10	Puskesmas Buluspesantren II	84.091.646,00	1.581.000	85.672.646,00	1.008.006.225
11	Puskesmas Gombong I	506.075.989,00	-	506.075.989,00	1.066.001.250
12	Puskesmas Gombong II	175.757.183,00	-	175.757.183,00	1.066.001.268
13	Puskesmas Karanganyar	616.329.427,00	-	616.329.427,00	1.100.001.230
14	Puskesmas Karanggayam I	176.089.338,00	-	176.089.338,00	1.100.001.248
15	Puskesmas Karanggayam II	132.791.357,00	-	132.791.357,00	1.100.001.256
16	Puskesmas Karangsambung	590.273.474,00	-	590.273.474,00	1.008.006.250
17	Puskesmas Kebumen I	229.136.524,00	-	229.136.524,00	1.008.006.233
18	Puskesmas Kebumen II	570.384.809,54	-	570.384.809,54	1.008.006.195
19	Puskesmas Kebumen III	375.685.930,00	-	375.685.930,00	1.008.006.217
20	Puskesmas Klirong I	365.975.841,00	2.127.100	368.102.941,00	1.008.006.268
21	Puskesmas Klirong II	294.279.806,00	-	294.279.806,00	1.008.006.284
22	Puskesmas Kutowinangun	423.704.649,00	-	423.704.649,00	1.115.000.931
23	Puskesmas Kuwarasan	338.156.966,44	-	338.156.966,44	1.066.001.225
24	Puskesmas Mirit	545.441.287,00	-	545.441.287,00	1.071.001.365
25	Puskesmas Padureso	214.101.140,00	-	214.101.140,00	1.071.001.349
26	Puskesmas Pejagoan	515.336.934,00	-	515.336.934,00	1.008.006.179
27	Puskesmas Petanahan	892.758.728,00	2.070.000	894.828.728,00	1.008.006.187
28	Puskesmas Poncowarno	233.601.471,00	-	233.601.471,00	1.115.000.949
29	Puskesmas Prembun	225.930.893,00	-	225.930.893,00	1.071.001.357
30	Puskesmas Puring	699.407.906,00	-	699.407.906,00	1.066.001.152
31	Puskesmas Rowokele	313.349.478,00	-	313.349.478,00	1.066.001.233
32	Puskesmas Sadang	606.916.550,00	885.850	607.802.400,00	1.008.006.276
33	Puskesmas Sempor I	728.629.646,00	6.520	728.636.166,00	1.066.001.187
34	Puskesmas Sempor II	373.131.602,00	-	373.131.602,00	1.066.001.195
35	Puskesmas Sruweng	584.257.284,00	-	584.257.284,00	1.008.006.209
36	Pengobatan Penyakit Paru	0,00	-	-	1.008.006.292
37	RSUD dr. Sudirman	42.520.446.365,00	-	42.520.446.365,00	1.008.002.874
38	RSUD Prembun	14.181.489.009,00	14.651.243	14.196.140.252,00	1.008.00729-9
	Jumlah	**71.341.270.632,98**	**22.468.813,00**	**71.363.739.445,98**	

Saldo Kas di BLUD RSUD Dr. Soedirman per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.520.446.365,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Kas BLUD RSUD Dr.Soedirman

NO.	JENIS	BANK	NO REKENING	JUMLAH
1.	Kas Tunai di Bendahara Penerima			56.589.071,00
2.	Giro	Bank Jateng	1-008-00287-4	6.463.857.294,00
4.	Deposito			36.000.000.000,00
	Jumlah			**42.520.446.365,00**

Saldo kas tunai pada Bendahara Penerimaan RSUD Dr. Soedirman merupakan pendapatan yang diterima tanggal 30 dan 31 Desember 2020 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada tanggal 4 Januari 2021.

Giro RSUD dr Soedirman tersimpan pada Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor rekening 1-008-00287-4 dengan saldo sebesar Rp6.463.857.294,00. Sedangkan Deposito sebesar Rp36.000.000.000,00 merupakan penempatan deposito pada bank umum berikut.

Tabel Deposito RSUD Dr.Soedirman

NO	BANK	NO BILYET	NOMINAL (Rp)	SUKU BUNGA (%)	TGL PENEMPATAN	PERIODE
1.	Bank Jateng	A-101913	3.000.000.000,00	8,25	06-Agu-15	1 bulan
		A-295862	2.000.000.000,00	8,00	27-Mei-19	1 bulan
		A-295847	2.000.000.000,00	8,00	26-Apr-19	1 bulan
		A-295836	1.000.000.000,00	8,00	09-Apr-19	1 bulan
		A-295572	2.000.000.000,00	7,50	11-Des-19	1 bulan
		A-295571	2.000.000.000,00	7,50	11-Des-19	1 bulan
		A-301303	1.000.000.000,00	7,50	30-Des-19	1 bulan
		A-301304	2.000.000.000,00	7,50	30-Des-19	1 bulan
		A-295595	1.000.000.000,00	7,50	30-Des-19	1 bulan
		A-295594	2.000.000.000,00	7,50	30-Des-19	1 bulan
		A-295637	2.000.000.000,00	7,00	24-Feb-20	1 bulan
		A-295638	2.000.000.000,00	7,00	24-Mar-20	1 bulan
		A-318890	1.000.000.000,00	6,75	25-Jul-20	1 bulan
		A-318982	2.000.000.000,00	6,25	26-Okt-20	1 bulan
		A-318983	1.000.000.000,00	6,25	26-Okt-20	1 bulan
		A-318946	2.000.000.000,00	6,40	27-Agu-20	1 bulan
2.	BRI Cab Kebumen	DC-2644730	2.000.000.000,00	7,25	25-Agu-16	1 bulan
		DC-2998107	1.000.000.000,00	7,20	28-Des-18	1 bulan
		DD-00661029	2.000.000.000,00	6,00	10-Mar-20	1 bulan
3.	BNI Cab Kebumen	PAB 1620667	1.000.000.000,00	5,25	25-Jun-20	1 bulan
4.	BRI Cab Purworejo	DD-2314279	2.000.000.000,00	4,50	26-Okt-20	1 bulan
		JUMLAH	**36.000.000.000,00**			

Saldo Kas BLUD pada RSUD Prembun sebesar Rp14.196.140.252,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Bank	Jumlah	Keterangan
1.	Kas di Bendahara Penerimaan (tunai)		23.038.417,00	disetor ke Rek BLUD tgl 4 Jan 2021
2.	Kas di Rekening BLUD (giro)	Bank Jateng Cab Kebumen	14.173.101.835,00	
		Jumlah	**14.196.140.252,00**	

5.3.1.1.5 Kas Lainnya

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp5.500.938.428,00	Rp.8.499.558.356,20

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah yang berada pada Bendahara BOS SD/SMP Negeri se-Kabupaten Kebumen. Dana BOS merupakan dana yang diterima langsung ke rekening BOS Satuan Pendidikan dan dilaporkan ke Bupati untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja dan disajikan pada

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Saldo Kas BOS pada masing-masing sekolah sebagaimana **lampiran 13**.

5.3.1.1.6 Piutang Pendapatan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp26.812.688.448,00	Rp24.932.358.986,00

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Saldo Piutang Pendapatan terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Saldo Piutang Pendapatan

Uraian	31-Dec-20 (Rp)	31-Dec-19 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Pajak	6.846.684.862,00	5.449.943.646,00	1.396.741.216,00	25,63
Piutang Retribusi	2.345.872.630,00	1.366.854.410,00	979.018.220,00	71,63
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	3.212.300.981,00	(3.212.300.981,00)	(100,00)
Piutang Lain-Lain PAD yang sah	2.905.123.460,00	2.327.523.533,00	577.599.927,00	24,82
Piutang Transfer Pemerintah daerah Lainnya	14.715.007.496,00	3.344.694.766,00	11.370.312.730,00	339,95
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	9.231.041.650,00	(9.231.041.650,00)	(100,00)
Jumlah	**26.812.688.448,00**	**24.932.358.986,00**	**1.880.329.462,00**	**7,54**

Penjelasan masing-masing jenis piutang diuraikan sebagai berikut.

a. Piutang Pajak

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp6.846.684.862,00	Rp5.449.943.646,00

Piutang pajak merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dalam bentuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, BPHTB dan PBB. Jumlah piutang merupakan saldo piutang pajak yang sudah ada ketetapannya, namun belum dibayar oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel Piutang Pajak

Uraian	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan/	%
	(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)	
Pajak Hotel	82.681.227,00	1.475.000,00	81.206.227,00	5.505,51
Pajak Restoran	66.927.217,00	2.830.000,00	64.097.217,00	2.264,92
Pajak Hiburan	400.000,00	6.602.000,00	(6.202.000,00)	(93,94)
Pajak Air Tanah	8.303.900,00	6.014.200,00	2.289.700,00	38,07
Pajak Reklame	47.035.965,00	18.150.375,00	28.885.590,00	159,15
Pajak Parkir	3.178.000,00	2.290.000,00	888.000,00	38,78
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	130.480.000,00	265.020.000,00	(134.540.000,00)	(50,77)
Pajak BPHTB	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Piutang PBB	6.505.678.553,00	5.145.562.071,00	1.360.116.482,00	26,43
Jumlah	**6.846.684.862,00**	**5.449.943.646,00**	**1.396.741.216,00**	**25,63**

Piutang Pajak mengalami kenaikan dibanding data piutang tahun sebelumnya sebesar 25,63%, hal ini disebabkan kondisi pandemi covid mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak.

b. Piutang Retribusi

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp2.345.872.630,00	Rp1.366.854.410,00

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berasal dari retribusi daerah, berupa tunggakan retribusi yang belum dibayar per 31 Desember 2020 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Daftar Piutang Retribusi per 31 Desember 2020

Piutang Retribusi	SKPD	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Pelayanan Pasar	Disperindagsar	332.950.050,00	175.663.300,00	157.286.750,00	89,54
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Disporawisata	936.402.580,00	818.753.110,00	117.649.470,00	14,37
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DPU-PR	4.155.000,00	0,00	4.155.000,00	100,00
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	1.072.365.000,00	372.438.000,00	699.927.000,00	187,93
	Jumlah	**2.345.872.630,00**	**1.366.854.410,00**	**979.018.220,00**	**71,63**

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp332.950.050,00 merupakan tunggakan retribusi pasar yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dibayar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2020

No.	Wilayah	per 31 Des 2020	per 31 Des 2019
1.	UPTD Unit Pasar Wilayah I	153.266.950,00	21.849.500,00
2.	UPTD Unit Pasar Wilayah II	31.382.000,00	19.934.000,00
3.	UPTD Unit Pasar Wilayah III	109.238.500,00	101.095.500,00
4.	UPTD Unit Pasar Wilayah IV	39.062.600,00	32.784.300,00
	Jumlah	**332.950.050,00**	**175.663.300,00**

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp936.402.580,00 merupakan tunggakan sewa kios pada Obyek Wisata dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Disporawisata

No	Obyek Wisata	per 31 Des 2020	per 31 Des 2019
1.	Goa Jatijajar	92.649.420,00	49.231.700,00
2.	Pantai Logending	48.841.200,00	41.301.200,00
3.	Pantai Suwuk	664.486.960,00	637.659.210,00
4.	Pantai Petanahan	121.705.000,00	89.278.000,00
5.	PAP Krakal	1.677.000,00	192.000,00
6..	Waduk Sempor	3.963.000,00	1.091.000,00
7.	Pantai Karangbolong	3.080.000,00	0,00
	Jumlah	**936.402.580,00**	**818.753.110,00**

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan tunggakan sewa bangunan yang digunakan oleh Koperasi Gumelar dan kantin DPU-PR total sebesar Rp4.155.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah DPU-PR

NO.	PIHAK KETIGA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	KPRI Gumelar DPU-PR	2.835.000,00	Perjanjian No.002/002.6 dan No. 01/I/2020
2.	Dharma Wanita DPU-PR	1.320.000,00	Perjanjian No.002/002.7 dan No. 01/I/2021
	Jumlah	**4.155.000,00**	

Sedangkan Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah piutang atas pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum - Dishub

NO	PIHAK KETIGA	NO.PERJANJIAN	TUNGGAKAN 2019	TUNGGAKAN 2020	JUMLAH
1.	KSU Jalan Persaudaraan	551.2/0614/II/2019	348.735.000,00	723.630.000,00	1.072.365.000,00
		Jumlah	**348.735.000,00**	**723.630.000,00**	**1.072.365.000,00**

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp3.212.300.981,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan piutang atas bagian laba BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dengan perincian sbb.

Tabel Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	SKPD	31-Dec-20 (Rp)	31-Dec-19 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Deviden PD BPR Kebumen	PPKD	0,00	1.390.079.812,00	(1.390.079.812,00)	(100,00)
Deviden PD Apotik Lukulo	PPKD	0,00	146.874.735,00	(146.874.735,00)	(100,00)
Deviden PDAM	PPKD	0,00	1.675.346.434,00	(1.675.346.434,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**3.212.300.981,00**	**(3.212.300.981,00)**	**(100,00)**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2019 sebesar R3.212.300.981,00 sudah disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai berikut:

NO.	JENIS PIUTANG	BUMD	JUMLAH	KET
1.	Piutang deviden	PD BPR Bank Kebumen	1.390.079.812,00	disetor tgl 8 Mei 2020
2.	Piutang deviden	PD Apotik Lukulo	146.874.735,00	disetor tgl 6 Mei 2020
3.	Piutang deviden	PDAM	1.675.346.434,00	disetor tgl 24 April 2020
		Jumlah	**3.212.300.981,00**	

d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp2.905.123.460,00	Rp2.327.523.533,00

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dari pendapatan Lain-lain PAD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	SKPD	31-Dec-20 (Rp)	31-Dec-19 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Denda Pajak	Bapenda	2.230.570.460,00	1.643.845.533,00	586.724.927,00	35,69
Jasa Investasi Dana Bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan (Dana Perguliran 2005-2008)	PPKD	25.778.000,00	25.778.000,00	0,00	0,00
Pemakaian Kios Terminal	Dishub	647.900.000,00	657.900.000,00	(10.000.000,00)	(1,52)
Piutang Jasa Dana Talangan	BPKAD	875.000,00	0,00	875.000,00	100,00
	Jumlah	**2.905.123.460,00**	**2.327.523.533,00**	**577.599.927,00**	**24,82**

Saldo Piutang Denda Pajak merupakan piutang atas denda pajak yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2020

NO	JENIS PAJAK	SALDO PIUTANG	PIUTANG DENDA
1	PBB	6.505.678.553,00	2.183.545.399,00
2	BPHTB	2.000.000,00	960.000,00
3	Pajak Hotel	82.681.227,00	10.007.224,00
4	Pajak Restoran	66.927.217,00	7.531.871,00
5	Pajak Hiburan	400.000,00	192.000,00
6	Pajak Air Tanah	8.303.900,00	2.361.800,00
7	Pajak Parkir	3.178.000,00	817.960,00
8	Pajak Reklame	47.035.965,00	6.007.806,00
9	Pajak MBLB	130.480.000,00	19.146.400,00
	Jumlah	**6.846.684.862,00**	**2.230.570.460,00**

Saldo piutang dari jasa Investasi Dana Bergulir sebesar Rp25.778.000,00 merupakan jasa dana bergulir (Pengguliran 2005-2008) yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan yang masih berada di masyarakat, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Jasa Investasi dana Bergulir Dinas Pertanian dan Pangan
Per 31 Desember 2020

No	Tahun	Sisa Pinjaman per 31 Desember 2020		
		Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2005	1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00
2.	2006	94.487.000,00	7.278.000,00	101.765.000,00
3.	2007	70.500.000,00	3.000.000,00	73.500.000,00
4.	2008	163.345.000,00	13.900.000,00	177.245.000,00
	Jumlah	**329.332.000,00**	**25.778.000,00**	**355.110.000,00**

Saldo piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dikelola Dinas Perhubungan per 31 Desember 2020 sebesar Rp647.900.000,00 merupakan tunggakan pemakaian kios terminal Bus Tipe A Kebumen sebanyak 47 kios dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel Piutang Kios Terminal per 31 Desember 2020

Jumlah Kios	Total Piutang	Total Angsuran	Sisa Piutang
47 unit	1.250.400.000,00	602.500.000,00	647.900.000,00

Sedangkan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah pada BPKAD sebesar Rp875.000,00 merupakan piutang atas jasa Dana Talangan Pengadaan Pangan yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu dari kelompok tani Karya Utama, Kec.Buayan.

e. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp14.715.007.496,00	Rp3.344.694.766,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Alokasi Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Provinsi yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen sbb.

Tabel Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	SKPD	31-Des-20	31-Des-19	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	PPKD	14.715.007.496,00	3.344.694.766,00	11.370.312.730,00	339,95
	Jumlah	**14.715.007.496,00**	**3.344.694.766,00**	**11.370.312.730,00**	339,95

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun lalu berupa Bagi Hasil Pajak Provinsi sudah disalurkan seluruhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp3.344.694.766,00.
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020 dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 024/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2021, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No	Jenis Bagi Hasil	Kurang Salur (Rp)
1.	PKB	6.719.464.495,00
2.	BBNKB	2.677.503.177,00
3.	PBBKB	5.272.163.593,00
4.	PAP	45.876.231,00
	Jumlah	**14.715.007.496,00**

f. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp9.231.041.650,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan alokasi kurang bayar Dana Transfer yang belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Tabel Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Pusat	SKPD	31-Dec-20 (Rp)	31-Dec-19 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak	PPKD	0,00	8.664.267.285,00	(8.664.267.285,00)	(100,00)
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA	PPKD	0,00	566.774.365,00	(566.774.365,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**9.231.041.650,00**	**(9.231.041.650,00)**	**(100,00)**

5.3.1.1.7 Piutang Lainnya

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp49.081.669.722,00	Rp42.118.746.399,00

Piutang Lainnya merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen di luar Piutang Pajak dan Retribusi sebagai berikut.

Tabel Piutang Lainnya

Uraian	SKPD	31-Des-20 (Rp)	31-Des-19 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang BLUD RSU	RSU Dr. Soedirman	42.586.602.247,00	30.704.897.955,00	11.881.704.292,00	38,70
Piutang BLUD RSU	RSUD Prembun	5.027.997.424,00	8.529.659.043,00	(3.501.661.619,00)	(41,05)
Piutang BLUD Puskesmas	Puskesmas	867.017.650,00	2.284.137.000,00	(1.417.119.350,00)	(62,04)
Piutang Dana Bergulir eks Diperindagkop	PPKD	600.052.401,00	600.052.401,00	-	-
	Jumlah	**49.081.669.722,00**	**42.118.746.399,00**	**6.962.923.323,00**	**16,53**

Piutang BLUD pada RSUD Dr. Soedirman dirinci sebagai berikut.

Tabel Piutang BLUD pada RSUD Dr. Soedirman

NO	Uraian	31-Dec-20 (Rp)	31-Dec-19 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Piutang Umum	2.583.792.175,00	2.443.950.767,00	139.841.408,00	5,72
2	Piutang BPJS	9.535.956.090,00	28.130.890.650,00	(18.594.934.560,00)	(66,10)
3	Piutang Jasa Raharja	22.996.176,00	7.756.090,00	15.240.086,00	196,49
4	Piutang LPSK	2.880.482,00	2.880.482,00	0,00	0,00
5	Piutang Bunga Deposito	41.156.166,00	67.931.505,00	(26.775.339,00)	(39,42)
6	Piutang Radiologi	60.010.175,00	0,00	60.010.175,00	
7	Piutang Sewa	7.143.000,00	10.173.000,00	(3.030.000,00)	(29,78)
8	Piutang Kemenkes	30.075.341.000	0,00	30.075.341.000,00	
9	Piutang Jamkesda	20.644.073,00	29.046.525,00	(8.402.452,00)	(28,93)
10	Piutang kepada PT KAI	131.174,00	1.493.936,00	(1.362.762,00)	(91,22)
11	Piutang TCM	8.350.000,00	10.775.000,00	(2.425.000,00)	(22,51)
12	Piutang JKK	130.486,00	0,00	130.486,00	
13	Piutang PT Menjangan	228.071.250,00	0,00	228.071.250,00	
	Jumlah	**42.586.602.247,00**	**30.704.897.955,00**	**11.653.633.042,00**	**(75,74)**

Piutang BLUD pada RSUD Prembun dirinci sebagai berikut.

NO	Uraian	31-Dec-20 (Rp)	31-Dec-19 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Piutang Umum	97.353.738,00	51.055.394,00	46.298.344,00	90,68
2	Piutang BPJS	4.928.606.686,00	8.467.078.649,00	(3.538.471.963,00)	(41,79)
3	Piutang TCM Laborat	0,00	11.525.000,00	(11.525.000,00)	(100,00)
4	Piutang pendapatan parkir	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**5.027.997.424,00**	**8.529.659.043,00**	**(3.503.698.619,00)**	**(41,08)**

Piutang BLUD pada Puskesmas merupakan pengajuan klaim BPJS atas pelayanan sampai dengan 31 Desember 2020 yang belum diterima pencairannya, dengan rincian per masing-masing Puskesmas sebagai berikut.

Tabel Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2020

No	SKPD	Piutang BPJS (Rp)	Keterangan
1	UPTD Puskesmas Adimulyo	22.655.000,00	Klaim Bl Okt - Des 2020
2	UPTD Puskesmas Alian	37.232.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
3	UPTD Puskesmas Ambal I	31.593.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
4	UPTD Puskesmas Ambal II	18.685.000,00	Klaim Bl Sept - Des 2020
5	UPTD Puskesmas Ayah I	106.114.250,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
6	UPTD Puskesmas Ayah II	19.525.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
7	UPTD Puskesmas Bonorowo	21.153.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
8	UPTD Puskesmas Buayan	15.250.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
9	UPTD Puskesmas Buluspesantren I	9.855.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
10	UPTD Puskesmas Buluspesantren II	30.025.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
11	UPTD Puskesmas Gombong I	36.325.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
12	UPTD Puskesmas Gombong II	1.115.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
13	UPTD Puskesmas Karanganyar	36.292.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
14	UPTD Puskesmas Karanggayam I	21.440.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
15	UPTD Puskesmas Karanggayam II	11.440.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
16	UPTD Puskesmas Karangsambung	19.946.500,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
17	UPTD Puskesmas Kebumen I	18.175.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
18	UPTD Puskesmas Kebumen II	37.610.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
19	UPTD Puskesmas Kebumen III	23.265.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
20	UPTD Puskesmas Klirong I	11.255.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
21	UPTD Puskesmas Klirong II	15.215.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
22	UPTD Puskesmas Kutowinangun	41.324.400,00	Klaim Bl Okt - Des 2020
23	UPTD Puskesmas Kuwarasan	16.562.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
24	UPTD Puskesmas Mirit	64.671.000,00	Klaim Bl Okt - Des 2020
25	UPTD Puskesmas Padureso	27.330.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
26	UPTD Puskesmas Pejagoan	32.340.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
27	UPTD Puskesmas Petanahan	47.346.000,00	Klaim Bl Okt - Des 2020
28	UPTD Puskesmas Poncowarno	23.775.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
29	UPTD Puskesmas Prembun	3.570.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
30	UPTD Puskesmas Puring	8.565.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
31	UPTD Puskesmas Rowokele	18.320.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
32	UPTD Puskesmas Sadang	14.893.500,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
33	UPTD Puskesmas Sempor I	5.925.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
34	UPTD Puskesmas Sempor II	9.510.000,00	Klaim Bl Nov - Des 2020
35	UPTD Puskesmas Sruweng	8.720.000,00	Klaim Bl Des 2020
	Jumlah	**867.017.650,00**	

Piutang Dana Bergulir eks Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi disajikan sebagai berikut.

Tabel Piutang Dana bergulir eks Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi per 31 Desember 2020

No.	Tahun Pengguliran	Saldo		
		Pokok (Rp)	Jasa Pinjaman (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)
I	Pengguliran			
1	Tahun 2000	116.674.500,00	11.711.500,00	128.386.000,00
2	Tahun 2002	45.434.500,00	4.719.500,00	50.154.000,00
3	Tahun 2003	120.474.700,00	13.730.000,00	134.204.700,00
5	Tahun 2005	41.313.455,00	7.179.000,00	48.492.455,00
6	Tahun 2006	37.263.409,00	6.993.700,00	44.257.109,00
7	Tahun 2007	60.633.137,00	7.950.000,00	68.583.137,00
Jumlah		421.793.701,00	52.283.700,00	474.077.401,00
II	Digulirkan Kembali			
1	Tahun 2001	34.005.000,00	3.345.000,00	37.350.000,00
2	Tahun 2002	33.481.000,00	3.350.000,00	36.831.000,00
3	Tahun 2005	8.990.000,00	1.050.000,00	10.040.000,00
5	Tahun 2006	11.435.000,00	1.129.000,00	12.564.000,00
6	Tahun 2007	7.450.000,00	1.840.000,00	9.290.000,00
7	Tahun 2008	16.100.000,00	3.800.000,00	19.900.000,00
Jumlah		111.461.000,00	14.514.000,00	125.975.000,00
Jumlah Keseluruhan		**533.254.701,00**	**66.797.700,00**	**600.052.401,00**

Atas piutang ini pada tahun 2012 telah dilimpahkan pengurusannya ke Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Perkembangan per 31 desember 2020 sebanyak 24 debitur sudah dinyatakan lunas, dan sebanyak 34 debitur dalam kategori Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT).

5.3.1.1.8 Penyisihan Piutang

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp8.695.251.223,75	(Rp7.220.940.055,00)

Penyisihan piutang merupakan estimasi atas jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode penghitungan penyisihan menurut umur piutang (*aging schedule*). Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sesuai jenisnya. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020

Piutang Daerah	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
Piutang Pendapatan:			
a. Piutang Pajak	6.846.684.862,00	3.147.650.837,50	3.699.034.024,50
b. Piutang Retribusi	2.345.872.630,00	521.238.318,00	1.824.634.312,00
c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00
d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.905.123.460,00	1.867.798.920,25	1.037.324.539,75
e. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	14.715.007.496,00	0,00	14.715.007.496,00
Sub Jumlah	**26.812.688.448,00**	**5.536.688.075,75**	**21.276.000.372,25**
Piutang Lainnya:			
a. Piutang BLUD RSU Dr. Soedirman	42.586.602.247,00	2.489.353.305,00	2.489.353.305,00
b. Piutang BLUD RSUD Prembun	5.027.997.424,00	69.157.442,00	69.157.442,00
c. Piutang BLUD Puskesmas/UP3	867.017.650,00	0,00	0,00
d. Piutang Dana Bergulir eks Disperindag	600.052.401,00	600.052.401,00	600.052.401,00
Sub Jumlah	**49.081.669.722,00**	**3.158.563.148,00**	**3.158.563.148,00**
Jumlah	**75.894.358.170,00**	**8.695.251.223,75**	**24.434.563.520,25**

Perhitungan penyisihan per masing-masing jenis piutang berdasarkan umur piutang disajikan sebagai berikut.

a. Penyisihan Piutang Pajak

Tabel Penyisihan Piutang Pajak

NO	URAIAN	UMUR PIUTANG				SALDO AKHIR
		1 s/d 2 Tahun	> 2 s/d 3Tahun	> 3 s/s 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	PBB P2	3.261.620.486,00	1.875.064.670,00	983.172.552,00	385.820.845,00	6.505.678.553,00
2	BPHTB	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	PAJAK HOTEL	82.281.227,00	400.000,00	0,00	0,00	82.681.227,00
4	PAJAK RESTORAN	64.922.217,00	1.700.000,00	305.000,00	0,00	66.927.217,00
5	PAJAK HIBURAN	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6	PAJAK AIR TANAH	5.045.500,00	578.900,00	597.400,00	2.082.100,00	8.303.900,00
7	PAJAK PARKIR	1.538.000,00	370.000,00	650.000,00	620.000,00	3.178.000,00
8	PAJAK REKLAME	37.284.090,00	9.751.875,00	0,00	0,00	47.035.965,00
9	PAJAK MBLB	130.480.000,00	0,00	0,00	0,00	130.480.000,00
	JUMLAH	**3.583.171.520,00**	**1.888.265.445,00**	**986.724.952,00**	**388.522.945,00**	**6.846.684.862,00**
PENYISIHAN PIUTANG		30%	50%	75%	100%	
NILAI PENYISIHAN		1.074.951.456,00	944.132.722,50	740.043.714,00	388.522.945,00	3.147.650.837,50
NET REALIZABLE VALUE (NRV)		**2.508.220.064,00**	**944.132.722,50**	**246.681.238,00**	**0,00**	**3.699.034.024,50**

b. Penyisihan Piutang Retribusi

Tabel Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	OPD	Nilai Piutang 2020	Nilai Penyisihan	NRV Piutang
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	Disperindagsar	332.950.050,00	25.303.350,00	307.646.700,00
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Disporawisata	936.402.580,00	391.314.468,00	545.088.112,00
3.	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	Dishub	1.072.365.000,00	104.620.500,00	967.744.500,00
4.	Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DPU-PR	4.155.000,00	0,00	4.155.000,00
	Jumlah		**2.345.872.630,00**	**521.238.318,00**	**1.824.634.312,00**

Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan disajikan sebagai berikut.

Tabel Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

No.	Obyek Wisata	Piutang Berdsarkan Umur (Rp)					Jumlah (Rp)
		> 5 th	> 3 s/d 5 th	> 2 S/D 3 th	1 s/d 2 th	0 th	
1.	Pasar UPT I				8.960.000,00	144.306.950,00	153.266.950,00
2.	Pasar UPT - UPW II				4.796.000,00	26.586.000,00	31.382.000,00
3.	Pasar UPT - UPW III				70.588.500,00	38.650.000,00	109.238.500,00
4.	Pasar UPT - UPW IV					39.062.600,00	39.062.600,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.344.500,00**	**248.605.550,00**	**332.950.050,00**
% Penyisihan Piutang		100%	75%	50%	30%	0%	
Nilai Penyisihan		0,00	0,00	0,00	25.303.350,00	0,00	25.303.350,00
***Net Realizable Value* (NRV)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.041.150,00**	**248.605.550,00**	**307.646.700,00**

Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemakaian kios di lokasi Obyek Wisata yang dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata disajikan sebagai berikut.

Tabel Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Obyek Wisata	Piutang Berdsarkan Umur (Rp)					Jumlah (Rp)
		> 5 th	> 3 s/d 5 th	> 2 S/D 3 th	1 s/d 2 th	0 th	
1.	Goa Jatijajar	9.648.100,00	1.220.000,00	276.000,00	21.238.400,00	60.266.920,00	92.649.420,00
2.	Pantai Logending	8.210.000,00	1.252.000,00	2.382.000,00	24.349.200,00	12.648.000,00	48.841.200,00
3.	Pantai Suwuk	0,00	181.740.000,00	104.543.000,00	332.355.960,00	45.848.000,00	664.486.960,00
4.	Pantai Petanahan	44.910.000,00	20.948.000,00	2.944.000,00	20.476.000,00	32.427.000,00	121.705.000,00
5.	PAP Krakal	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	1.485.000,00	1.677.000,00
6.	Pantai Karangbolong	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00
7.	Waduk Sempor	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.959.000,00	3.963.000,00
8.	Goa Petruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**62.768.100,00**	**205.160.000,00**	**110.241.000,00**	**398.519.560,00**	**159.713.920,00**	**936.402.580,00**
% Penyisihan Piutang		100%	75%	50%	30%	0%	
Nilai Penyisihan		62.768.100,00	153.870.000,00	55.120.500,00	119.555.868,00	0,00	391.314.468,00
Net Realizable Value (NRV)		**0,00**	**51.290.000,00**	**55.120.500,00**	**278.963.692,00**	**159.713.920,00**	**545.088.112,00**

c. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Sah

No.	Uraian	OPD	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1.	Piutang Denda Pajak Daerah	Bapenda	2.230.570.460,00	1.194.120.920,25	1.036.449.539,75
2.	Jasa Dana Bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan (Dana Perguliran 2005-2008)	PPKD	25.778.000,00	25.778.000,00	0,00
3.	Pemakaian Kios Terminal	Dishub	647.900.000,00	647.900.000,00	0,00
4.	Piutang Jasa Dana Talangan	BPKAD	875.000,00	0,00	875.000,00
	Jumlah		**2.905.123.460,00**	**1.867.798.920,25**	**1.037.324.539,75**

Perhitungan penyisihan piutang denda Pajak Daerah disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Denda PBB P2 dan BPHTB

NO	URAIAN	UMUR PIUTANG				SALDO AKHIR
		1 s/d 2 Tahun	> 2 s/d 3Tahun	> 3 s/s 5 Tahun	> 5 Tahun	
1.	Denda PBB	626.397.526,00	900.031.042,00	471.922.825,00	185.194.006,00	2.183.545.399,00
2.	Denda BPHTB	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
3.	Denda Pajak Hotel	9.815.224,00	192.000,00	0,00	0,00	10.007.224,00
4.	Denda pajak Restoran	6.569.471,00	816.000,00	146.400,00	0,00	7.531.871,00
5.	Denda pajak Hiburan	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
6.	Denda Pajak Air tanah	797.768,00	277.872,00	286.752,00	999.408,00	2.361.800,00
7.	Denda Pajak parkir	30.760,00	177.600,00	312.000,00	297.600,00	817.960,00
8.	Denda Pajak Reklame	1.326.906,00	4.680.900,00	0,00	0,00	6.007.806,00
9.	Denda Pajak MBLB	19.146.400,00	0,00	0,00	0,00	19.146.400,00
	JUMLAH	**664.084.055,00**	**906.367.414,00**	**473.627.977,00**	**186.491.014,00**	**2.230.570.460,00**
PENYISIHAN PIUTANG DENDA		30%	50%	75%	100%	
NILAI PENYISIHAN		199.225.216,50	453.183.707,00	355.220.982,75	186.491.014,00	1.194.120.920,25
NET REALIZABLE VALUE (NRV)		**464.858.838,50**	**453.183.707,00**	**118.406.994,25**	**0,00**	**1.036.449.539,75**

Perhitungan Penyisihan piutang jasa dana bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Dana Bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan

Tahun	Saldo 31 Desember 2019		Angsuran 2020		Saldo 31 Desember 2020	
	Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Pokok (Rp)	Jasa (Rp)
2005	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00
2006	94.487.000,00	7.278.000,00	0,00	0,00	94.487.000,00	7.278.000,00
2007	70.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	70.500.000,00	3.000.000,00
2008	167.345.000,00	13.900.000,00	4.000.000,00	0,00	163.345.000,00	13.900.000,00
Jumlah	**332.432.000,00**	**25.778.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**328.432.000,00**	**25.778.000,00**
Penyisihan > 5 th (100%)					**333.332.000,00**	**25.778.000,00**
***Net Realizable Value* (NRV)**					**0,00**	**0,00**

Perhitungan penyisihan piutang kios terminal disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Kios Terminal

Jumlah Kios	Nilai Piutang (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Piutang (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan		NRV (Rp)
					(%)	Nilai (Rp)	
47 kios	1.250.400.000,00	602.500.000,00	647.900.000,00	> 5 th	100	647.900.000,00	0,00

d. Penyisihan Piutang Lainnya

Tabel Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Piutang Lain-Lain	OPD	Jumlah Piutang	Nilai Penyisihan	NRV
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Piutang BLUD RSU	RSU Dr. Soedirman	42.586.602.247,00	2.489.353.305,00	40.097.248.942,00
2	Piutang BLUD RSU	RSUD Prembun	5.027.997.424,00	69.157.442,00	4.958.839.982,00
3	Piutang BLUD Puskesmas	Puskesmas	867.017.650,00	0,00	867.017.650,00
4	Piutang Dana Bergulir eks Disperindagkop	PPKD	600.052.401,00	600.052.401,00	0,00
	Jumlah		**49.081.669.722,00**	**3.158.563.148,00**	**45.923.106.574,00**

Dari piutang lainnya pada RSUD Dr Soedirman sebesar Rp42.586.602.247,00 hanya piutang umum sebesar Rp2.583.792.175,00 yang diperhitungkan penyisihan piutang, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang Umum RSUD Dr Soedirman

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	NRV
					(Rp)
1.	1 - 3 bl	72.861.940,00	30%	21.858.582,00	51.003.358,00
2.	> 3 - 6 bl	46.912.948,00	50%	23.456.474,00	23.456.474,00
3.	> 6 - 12 bl	79.916.154,00	75%	59.937.115,50	19.979.038,50
4.	> 12 bl	2.384.101.133,00	100%	2.384.101.133,00	0,00
	Jumlah	**2.583.792.175,00**		**2.489.353.304,50**	**94.438.870,50**

Penyisihan Piutang Lainnya pada RSUD Prembun diperhitungkan dari tunggakan piutang pasien umum, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel Penyisihan Piutang Umum RSUD Prembun

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
1.	0 bl	14.197.043,00	0%	0,00	14.197.043,00
2.	1 - 3 bl	10.133.550,00	30%	3.040.065,00	7.093.485,00
3.	> 3 - 6 bl	1.485.114,00	50%	742.557,00	742.557,00
4.	> 6 - 12 bl	24.652.846,00	75%	18.489.634,50	6.163.211,50
5.	> 12 bl	46.885.185,00	100%	46.885.185,00	0,00
	Jumlah	**97.353.738,00**		**69.157.441,50**	**28.196.296,50**

Penyisihan piutang lainnya dana bergulir eks Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebesar 100% dari saldo piutang, karena umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun, yaitu sebesar Rp600.052.401,00. Adapun perhitungan penyisihannya disajikan sebagai berikut.

Tabel Penyisihan Piutang eks Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

No.	Tahun Pengguliran	Pinjaman			Umur Piutang (th)	Penyisihan Piutang		NRV
		Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)		(%)	Nilai (Rp)	(Rp)
I	Pengguliran							
1	2000	116.674.500,00	11.711.500,00	128.386.000,00	> 5 th	100	128.386.000,00	0,00
2	2002	45.434.500,00	4.719.500,00	50.154.000,00	> 5 th	100	50.154.000,00	0,00
3	2003	120.474.700,00	13.730.000,00	134.204.700,00	> 5 th	100	134.204.700,00	0,00
5	2005	41.313.455,00	7.179.000,00	48.492.455,00	> 5 th	100	48.492.455,00	0,00
6	2006	37.263.409,00	6.993.700,00	44.257.109,00	> 5 th	100	44.257.109,00	0,00
7	2007	60.633.137,00	7.950.000,00	68.583.137,00	> 5 th	100	68.583.137,00	0,00
Sub Jumlah		421.793.701,00	52.283.700,00	474.077.401,00			474.077.401,00	0,00
II	Digulirkan Kembali							
10	2001	34.005.000,00	3.345.000,00	37.350.000,00	> 5 th	100	37.350.000	0,00
11	2002	33.481.000,00	3.350.000,00	36.831.000,00	> 5 th	100	36.831.000	0,00
12	2005	8.990.000,00	1.050.000,00	10.040.000,00	> 5 th	100	10.040.000	0,00
13	2006	11.435.000,00	1.129.000,00	12.564.000,00	> 5 th	100	12.564.000	0,00
14	2007	7.450.000,00	1.840.000,00	9.290.000,00	> 5 th	100	9.290.000	0,00
15	2008	16.100.000,00	3.800.000,00	19.900.000,00	> 5 th	100	19.900.000	0,00
Sub Jumlah		111.461.000,00	14.514.000,00	125.975.000,00			125.975.000	0,00
Jumlah		**533.254.701,00**	**66.797.700,00**	**600.052.401,00**			**600.052.401,00**	**0,00**

5.3.1.1.9 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp65.598.889,00	Rp72.036.588,00

Beban dibayar dimuka disajikan sebagai berikut.

Tabel Beban Dibayar di Muka

Uraian	OPD	31-Des-20	31-Des-19	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Sewa Rumah Dinas	RSUD Prembun	9.444.444,00	14.586.833,00	(5.142.389,00)	(35,25)
Asuransi Kendaraan Dinas	BPKAD	56.154.445,00	57.449.755,00	(1.295.310,00)	(2,25)
Jumlah		**65.598.889,00**	**72.036.588,00**	**(6.437.699,00)**	**(8,94)**

Beban dibayar dimuka pada RSUD Prembun secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel Beban Dibayar di Muka pada RSUD Prembun

NO.	URAIAN BEBAN	NO DOKUMEN/BUKTI PENGELUARAN	TGL DOKUMEN	JML BEBAN	JANGKA WAKTU	MASA MANFAAT	SISA MASA MANFAAT	NILAI BEBAN DIBAYAR DIMUKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	00457/1.02.02.02/2019	30-Jun-20	18.888.889	01-07-2020 sd. 30-06-2021	12 bulan	6 bulan	9.444.445
	JUMLAH			**18.888.889**				**9.444.445**

Sedangkan beban dibayar di muka pada BPKAD secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel Beban Dibayar di Muka pada BPKAD

NO.	URAIAN BEBAN	NO DOKUMEN/BUKTI PENGELUARAN	TGL DOKUMEN	JML BEBAN	JANGKA WAKTU	MASA MANFAAT	SISA MASA MANFAAT	NILAI BEBAN DIBAYAR DIMUKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beban Jasa Premi Asuransi Kendaraan Dinas	11.900.0000.93262	29/07/2019	27.996.820	01-08-2019 sd. 01-08-2022	36	20	15.553.789
2	Beban Jasa Premi Asuransi Kendaraan Dinas	11.900.0000.94516	01/08/2019	21.992.305	01-08-2019 sd. 01-08-2021	24	8	7.330.768
3	Beban Jasa Premi Asuransi Kendaraan Dinas	12.000.0000.60097	11/05/2020	49.904.832	23-04-2020 sd 23/04/2022	24	16	33.269.888
	JUMLAH			**99.893.957**				**56.154.445**

5.3.1.1.10 Persediaan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp38.058.366.120,24	Rp35.653.398.103,45

Nilai persediaan merupakan hasil *stok opname* dari persediaan bahan pakai habis, bahan/material dan bahan lainnya yang dilakukan per 31 Desember 2020, yang disajikan dengan harga beli terakhir, sebagai berikut.

Tabel Daftar Persediaan

Uraian	31-Dec-20 (Rp)	31-Dec-19 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bahan Pakai Habis	10.468.170.302,00	5.649.991.525,00	4.818.178.777,00	85,28
Bahan/Material	27.590.195.818,24	29.888.981.578,45	(2.298.785.760,21)	(7,69)
Barang Lainnya	0,00	114.425.000,00	(114.425.000,00)	(100,00)
Jumlah	**38.058.366.120,24**	**35.653.398.103,45**	**2.404.968.016,79**	**6,75**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Persediaan tahun 2020 naik sebesar 6,75% dibandingkan nilai Persediaan tahun 2019. Secara rinci persediaan per 31 Desember 2020 di SKPD disajikan sebagaimana **lampiran 14.**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp150.432.666.979,57	Rp138.846.162.484,71

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari :

Tabel Investasi Jangka Panjang

Uraian	31-Dec-20 (Rp)	31-Dec-19 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	150.397.666.979,57	138.846.162.484,71	11.551.504.494,86	8,32
Jumlah	**150.432.666.979,57**	**138.846.162.484,71**	**11.586.504.494,86**	**8,34**

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp35.000.000,00	Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Kebumen berupa Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan, disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau *Net Ralizable Value (NRV)* setelah dikurangi dengan penyisihan investasi tidak tertagih dengan rincian berikut ini.

Tabel Daftar Investasi Non Permanen Lainnya

Uraian	31-Dec-20 (Rp)	31-Dec-19 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Dana Bergulir (perguliran 2005-2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Talangan (pembiayaan 2020)	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100%
Jumlah	**35.000.000,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	100%

Dana Bergulir pada Dinas Pertanian dan Pangan (pengguliran 2005-2008) per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel Rincian Dana bergulir Pengguliran 2005-2008 per 31 Desember 2020

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal 1 Januari 2020	333.332.000,00
Penerimaan kembali pokok pinjaman di th 2020	4.000.000,00
Saldo akhir per 31 Desember 2020	329.332.000,00
Penyisihan (tahun ke-8)	100%
Nilai Penyisihan	329.332.000,00
Nilai Bersih (NRV) per 31 Desember 2019	0,00

Sedangkan Dana Talangan Pengadaan Pangan yang disalurkan kepada Kelompok Tani melalui Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 sampai dengan akhir tahun 2020 telah disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp1.465.000.000,00, sisanya sebesar Rp35.000.000,00 masih ada di kelompok tani Karya Utama, Kec.Buayan.

Adapun rincian Dana Talangan disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Dana Talangan per 31 Desember 2020

ALAMAT	JUMLAH PINJAMAN		JUMLAH PENGEMBALIAN		SALDO PINJAMAN	
	POKOK	JASA	POKOK	JASA	POKOK	JASA
Podourip, Petanahan	55.000.000,00	1.375.000,00	55.000.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
Mangunweni, Ayah	55.000.000,00	1.375.000,00	55.000.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
Mengkowo, Kebumen	55.000.000,00	1.375.000,00	55.000.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
Bumirejo, Puring	55.000.000,00	1.375.000,00	55.000.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
Kalijirek, Kebumen	55.000.000,00	1.375.000,00	55.000.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
Kedungweru, Ayah	55.000.000,00	1.375.000,00	55.000.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
Pagedangan, Ambal	55.000.000,00	1.375.000,00	55.000.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
Caruban, Adimulyo	55.000.000,00	1.375.000,00	55.000.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
Sukomulyo, Rowokele	55.000.000,00	1.375.000,00	55.000.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
Jogomertan, Petanahan	55.000.000,00	1.375.000,00	55.000.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
Kaliputih, Kutowinangun	55.000.000,00	1.375.000,00	55.000.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
Jatijajar, Ayah	55.000.000,00	1.375.000,00	55.000.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
Tresnorejo, Petanahan	50.000.000,00	1.250.000,00	50.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Kalirejo, Karanggayam	50.000.000,00	1.250.000,00	50.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Kalibagor, Kebumen	50.000.000,00	1.250.000,00	50.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Candiwulan, Kebumen	50.000.000,00	1.250.000,00	50.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Watukelir, Ayah	50.000.000,00	1.250.000,00	50.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Redisari, Rowokele	50.000.000,00	1.250.000,00	50.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Sekarteja, Adimulyo	50.000.000,00	1.250.000,00	50.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Trikarso, Sruweng	45.000.000,00	1.125.000,00	45.000.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
Sidorejo, Ambal	45.000.000,00	1.125.000,00	45.000.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
Caruban, Adimulyo	45.000.000,00	1.125.000,00	45.000.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
Sitirejo, Klirong	45.000.000,00	1.125.000,00	45.000.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
Bocor, Buuspesantren	45.000.000,00	1.125.000,00	45.000.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
Pejengkolan, Padureso	45.000.000,00	1.125.000,00	45.000.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
Sampang, Sempor	45.000.000,00	1.125.000,00	45.000.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
Peneket, Ambal	35.000.000,00	875.000,00	35.000.000,00	875.000,00	0,00	0,00
Kuwaru, Kuwarasan	35.000.000,00	875.000,00	35.000.000,00	875.000,00	0,00	0,00
Tanjungsari, Kutowinangun	35.000.000,00	875.000,00	35.000.000,00	875.000,00	0,00	0,00
Buayan, Buayan	35.000.000,00	875.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	875.000,00
Lerepkebumen, Poncowarno	35.000.000,00	875.000,00	35.000.000,00	875.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.500.000.000,00**	**37.500.000,00**	**1.465.000.000,00**	**36.625.000,00**	**35.000.000,00**	**875.000,00**

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp150.397.666.979,57	Rp138.846.162.484,71

Investasi Jangka Panjang Permanen terdiri dari berikut ini.

Tabel Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Kenaikan/	%
	(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	150.397.666.979,57	138.846.162.484,71	11.551.504.494,86	8,32
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	
Jumlah	**150.397.666.979,57**	**138.846.162.484,71**	**11.551.504.494,86**	**8,32**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri dari penyertaan modal pada tujuh BUMD dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No.	Uraian	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan/	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)	
1.	PD BPR Bank Kebumen	19.426.562.906,00	17.345.297.156,00	2.081.265.750,00	12,00
2.	PD Apotik Luk Ulo	2.099.835.967,00	1.938.762.191,00	161.073.776,00	8,31
3.	PDAM Kab. Kebumen	51.945.666.756,00	47.851.924.128,00	4.093.742.628,00	8,56
4.	PD BPR BKK Kebumen	27.975.601.350,57	26.260.179.009,71	1.715.422.340,86	6,53
5.	PD BKK Jateng	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	0,00	0,00
6.	PT Bank Jateng	46.279.000.000,00	42.779.000.000,00	3.500.000.000,00	8,18
7.	PT PRPP	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**150.397.666.979,57**	**138.846.162.484,71**	**11.551.504.494,86**	**8,32**

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah daerah yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dihitung dengan dua metode penilaian yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Penyertaan modal pada PT Bank Jateng, PD BKK Jateng dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PT PRPP) disajikan menggunakan metode biaya karena kepemilikan saham <20%, sedangkan untuk PDAM, PD Apotik Luk Ulo, PD BPR Bank Kebumen, dan PD BPR/BKK Kebumen menggunakan metode ekuitas.

Nilai investasi dengan metode ekuitas diperoleh dari data Laporan Keuangan Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Sehingga penyajian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan kedua metode tersebut dilihat dari nilai ekuitas yang tersaji pada Laporan Keuangan BUMD adalah sebagai berikut.

Tabel Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas & Metode Biaya

BUMD	Modal Disetor	Ekuitas BUMD	Opini LK BUMD	Prosentase Kepemilikan	Metode Penilaian	Nilai Investasi
	(Rp)	(Rp)				(Rp)
PD BPR Bank Kebumen	12.500.000.000,00	19.426.562.906,00	Audited	100,00%	Ekuitas	19.426.562.906,00
PD Apotik Luk Ulo	1.606.500.000,00	2.099.835.967,00	Audited	100,00%	Ekuitas	2.099.835.967,00
PDAM Kab. Kebumen	39.961.647.118,00	51.945.666.756,00	Audited	100,00%	Ekuitas	51.945.666.756,00
PD BPR BKK Kebumen	15.700.000.000,00	55.233.171.472,00	Audited	50,65%	Ekuitas	27.975.601.350,57
PD BKK Jateng	2.520.000.000,00	276.016.972.618,00	Un-audit	0,73%	Biaya	2.520.000.000,00
PT Bank Jateng	46.279.000.000,00	8.063.669.262,00	Audited	1,21%	Biaya	46.279.000.000,00
PT PRPP	151.000.000,00	47.929.456.083,00	Un-audit	0,30%	Biaya	151.000.000,00
Jumlah	**118.718.147.118,00**	**460.715.335.064,00**				**150.397.666.979,57**

Penambahan modal disetor yang disertakan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.050.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Penambahan Modal Disetor BUMD oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen

BUMD	31 Desember 2019 (Rp)	Tambahan Modal 2020 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Keterangan
PD BPR Bank Kebumen	11.000.000.000,00	1.500.000.000,00	12.500.000.000,00	SP2D No.00295/BTL-NON GJ/Pemby/2020 tanggal 11 Mei 2020
PD Apotik Luk Ulo	1.556.500.000,00	50.000.000,00	1.606.500.000,00	SP2D No.00316/BTL-NON GJ/Pemby/2020 tanggal 19 Peb 2020
PDAM	36.961.647.118,00	3.000.000.000,00	39.961.647.118,00	SP2D No.00301/BTL-NON GJ/Pemby/2020 tanggal 14 Mei 2020
PD BPR/BKK Kebumen	15.700.000.000,00	0,00	15.700.000.000,00	
PD BKK Jateng	2.520.000.000,00	0,00	2.520.000.000,00	
PT Bank Jateng	42.779.000.000,00	3.500.000.000,00	46.279.000.000,00	SP2D No.00116/BTL-NON GJ/Pemby/2020 tanggal 13 Peb 2020
PT PRPP	151.000.000,00	0,00	151.000.000,00	
Jumlah	**110.668.147.118,00**	**8.050.000.000,00**	**118.718.147.118,00**	

5.3.1.3 Aset Tetap

Penyajian Aset Tetap Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Tahapan penyajian Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dilakukan sebagai berikut:

1. Saldo aset tetap audited 2019 dilakukan mapping ke kodefikasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016. Penyajian Aset Tetap hasil mapping menjadi sebagai berikut:

Tabel Mapping Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Saldo Audited 2019	Saldo sesuai Permendagri 108	Bertambah / (Berkurang)
Tanah	777.250.679.277,55	777.250.679.277,55	0,00
Peralatan dan Mesin	765.195.323.365,00	780.433.170.364,00	15.237.846.999,00
Gedung dan Bangunan	1.490.101.861.928,00	1.483.891.048.360,00	(6.210.813.568,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.430.068.733.183,25	2.430.203.942.183,25	135.209.000,00
Aset Tetap Lainnya	133.561.451.585,00	124.399.209.154,00	(9.162.242.431,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.667.817.400.927,14)	(1.670.277.616.118,14)	(2.460.215.191,00)
Jumlah	**3.928.360.648.411,66**	**3.925.900.433.220,66**	**(2.460.215.191,00)**

2. Hasil mapping dilakukan kapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi sesuai Perbup No.94 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan menjadi saldo awal mutasi tambah/(kurang) aset tetap selama Tahun Anggaran 2020. Saldo aset tetap hasil kapitalisasi disajikan sebagai berikut:

Tabel Hasil Mapping Aset Tetap menjadi Saldo Awal Aset Tetap 2020

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo Mapping Permendagri 108	Saldo Hasil kapitalisasi (Saldo Awal)	Bertambah / (Berkurang)
1.	Tanah	777.250.679.277,55	777.250.679.277,55	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	780.433.170.364,00	779.810.510.159,00	(622.660.205,00)
3.	Gedung dan Bangunan	1.483.891.048.360,00	1.483.886.048.360,00	(5.000.000,00)
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.430.203.942.183,25	2.430.203.942.183,25	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	124.399.209.154,00	124.399.209.154,00	0,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.670.294.591.118,14)	(1.668.980.519.974,14)	1.314.071.144,00
	Jumlah	**3.925.883.458.220,66**	**3.926.569.869.159,66**	**686.410.939,00**

Sehingga saldo awal setelah mapping dan kapitalisasi disajikan sebagai berikut:

Tabel Saldo Awal Aset Tetap 2020

No	Nama Aset	Nilai
1	Tanah	777.250.679.277,55
2	Peralatan dan Mesin	779.810.510.159,00
3	Gedung dan Bangunan	1.483.886.048.360,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.430.203.942.183,25
5	Aset Tetap Lainnya	124.399.209.154,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.668.980.519.974,14)
	JUMLAH	**3.926.569.869.159,66**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 disajikan berdasarkan hasil konsolidasi laporan mutasi selama tahun berjalan, disandingkan dengan saldo awal berdasarkan kode barang baru sebagai berikut.

Tabel Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Tanah	773.834.470.627,55	777.250.679.277,55	(3.416.208.650,00)	(0,44)
2.	Peralatan dan Mesin	871.877.327.627,00	779.810.510.159,00	92.066.817.468,00	10,56
3.	Gedung dan Bangunan	1.521.415.829.394,00	1.483.886.048.360,00	37.529.781.034,00	2,47
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.571.424.246.416,25	2.430.203.942.183,25	141.220.304.233,00	5,49
5.	Aset Tetap Lainnya	132.900.631.859,00	124.399.209.154,00	8.501.422.705,00	6,40
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.948.301.932.914,54)	(1.668.980.519.974,14)	(279.321.412.940,40)	14,34
	Jumlah	**3.923.150.573.009,26**	**3.926.569.869.159,66**	**(3.419.296.150,39)**	**(0,09)**

Penjelasan masing-masing jenis aset tetap disajikan sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp.773.834.470.627,55	Rp.777.250.679.277,55

Aset Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp773.834.460.627,55 tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana **lampiran 15.** Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Tanah selama tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Tanah

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31-Des-20 (Rp)
777.250.679.277,55	28.588.816.741,00	32.005.025.391,00	(3.416.208.650)	773.834.470.627,55

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah terjadi karena hal- hal sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Modal	7.607.067.598,00
2	Belanja Modal BLUD	610.704.765,00
3	Mutasi antar OPD	20.034.031.128,00
4	Hibah	301.596.000,00
5	Penambahan dari Reklas	35.417.250,00
	JUMLAH	**28.588.816.741,00**

1) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.607.067.598,00 merupakan belanja modal tanah pada SKPD sebagai berikut

Tabel Belanja Modal Tanah Tahun 2020

No	OPD	Peruntukan Tanah	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan (SMPN 1 Puring)	264.709.340,00
2.	Dinas PU & PR	Stacking Out Tanah Kecamatan Ayah	73.869.100,00
		Stacking Out Tanah untuk Jembatan Bulurejo	49.662.193,00
		Stacking Out Tanah untuk Jembatan Pucung	43.167.047,00
		Tanah untuk Bangunan Air Irigasi di Depokrejo Kebumen	1.769.505.573,00
		Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah	4.028.467.085,00
		Pengadaan Patok Beton Paket 1	49.395.000,00
		Pengadaan Patok Beton Paket 2	49.945.000,00
3.	Dinas Kesehatan	Tanah Bangunan Puskesmas (Kebumen 2)	53.267.120,00
		Tanah Bangunan Puskesmas (Karangsambung)	292.411.800,00
		Tanah Bangunan Puskesmas (Gombong 2)	330.408.040,00
		Tanah Bangunan Puskesmas (Gombong 2)	523.569.000,00
5.	Disporawisata	Apraisal Tanah Karangsambung	78.691.300,00
Jumlah			**7.607.067.598,00**

2) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal BLUD sebesar Rp.610.704.765,00 merupakan belanja modal tanah Rumah Sakit Dr. Soedirman berupa tanah yang akan digunakan untuk poli jiwa.
3) Penambahan Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Tanah antar OPD

No	OPD Asal	OPD Penerima	Harga Perolehan	Keterangan
1	Bagian Pemerintahan	Disporawisata	615.000.000,00	Tanah Tumbak Keris
2	Bagian Pemerintahan	Dinsos PPKB	26.725.250,00	UPT KB Poncowarno
3	Bagian Pemerintahan	Kecamatan Sadang	44.200.000,00	Kecamatan Sadang
4	Bagian Pemerintahan	DPUPR	992.457.925,00	Jalan Jladri
5	Bagian Pemerintahan	DisperkimLH	258.789.850,00	Tanah Makam
6	DPUPR	BPBD	991.592.593,00	Tanah Tempat Evakuasi (Petanahan)
7	DPUPR	PPKD	37.824.000,00	Tanah digunakan untuk BMT
8	DPUPR	Sekretariat DPRD	2.237.919.764,00	Tanah DPRD
9	DPUPR	Kecamatan Karangsambung	2.105.413.070,00	Tanah Kecamatan Karangsambung
10	DPUPR	Kecamatan Sadang	231.333.686,00	Tanah Kecamatan Sadang
11	DPUPR	Kecamatan Karangsambung	94.676.000,00	Tanah Kecamatan Karangsambung
12	DPUPR	Kecamatan Adimulyo	1.158.353.400,00	Tanah Kecamatan Adimulyo
13	BPBD	Dinas Pendidikan	254.600.000,00	Tanah Korwil Kebumen
14	Dinas Pertanian	Dinas Kelautan dan	4.324.348.000,00	Tanah untuk perkebunan
15	PPKD	RSU Prembun	36.848.000,00	Tanah kampung lainnya
16	PPKD	DPUPR	67.814.700,00	Tanah Untuk Jalan Nasional (Jladri)
17	PPKD	Kecamatan Prembun	205.578.000,00	Tanah Lapangan Lainnya (Alun-alun)
18	PPKD	Disporawisata	1.813.904.000,00	Tanah Kompleks Stadion
19	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	4.536.652.890,00	Tanah dari Dinas Pendidikan ke SD Tambakmulyo 3 dan SD Brecong
Jumlah			**20.034.031.128,00**	

4) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah merupakan perolehan hibah tanah pada Kecamatan Mirit berupa Tanah Lapangan seluas 870 m^2 di Desa Tlogodepok yang telah diserahkan oleh Kepala Desa se-Kecamatan Mirit dengan Berita Acara Nomor 594.3/86/I/2009 Tanggal 19 Januari 2009. Harga perolehan atas tanah dimaksud senilai Rp.301.596.000,00 dicatat berdasarkan Surat Keterangan NJOP Nomor 981.1.1/792/VII/2020.

5) Sedangkan penambahan Aset Tetap Tanah karena reklas ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp35.417.250,00 merupakan reklas dari Aset Lainnya (biaya stacking out Pengadaan Tanah Depokrejo Kecamatan Kebumen).

Pengurangan Aset Tanah Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Nilai
1	Mutasi antar OPD	20.034.031.128,00
2	Hibah	2.339.722.750,00
3	Koreksi	9.385.881.873,00
4	Reklas	245.389.640,00
	JUMLAH	**32.005.025.391,00**

1) Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah karena mutasi antar OPD tahun 2020 sebesar Rp20.034.031.128,00 sebagaimana dijelaskan pada tabel penambahan mutasi Aset Tetap Tanah antar SKPD di atas.

2) Pengurangan aset tetap tanah karena hibah sebesar Rp2.339.722.750,00 secara rinci sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Hibah Aset Tetap Tanah

No	OPD	Nilai (Rp)	Dihibahkan Kepada	Nomor SK/Perjanjian
1	Bagian Pemerintahan	26.824.750	Koramil	028/221 Tahun 2020
2	DPUPR	367.926.000	Polres	028/300 Tahun 2020
3	Dinas Perhubungan	424.381.650	Koramil	028/221 Tahun 2020
		125.073.172	Koramil	028/221 Tahun 2020
		1.288.327.178	P3D Kementrian Perhubungan	550/2548
4	PPKD	43.190.000	Koramil	028/221 Tahun 2020
5	Kelurahan Panjer	64.000.000	Polres	028/379 Tahun 2018
	JUMLAH	**2.339.722.750**		

3) Pengurangan aset tetap tanah karena koreksi dobel pencatatan terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah

No	OPD	Nilai (Rp)	Uraian
1	Bagian Pemerintahan	106.500.000,00	pencatatan ganda dengan Kecamatan Bonorowo
		48.100.000,00	pencatatan ganda dengan Kecamatan Sadang
		1.440.000,00	pencatatan ganda dengan Kecamatan Poncowarno
		74.700.000,00	pencatatan ganda dengan Kecamatan Bonorowo
		68.600.000,00	pencatatan ganda dengan Kecamatan Poncowarno
		57.400.000,00	pencatatan ganda dengan Kecamatan Sadang
		40.180.000,00	pencatatan ganda dengan Kecamatan Bonorowo
		435.706.000,00	pencatatan ganda dengan Kecamatan Karanggayam
		60.000.000,00	pencatatan ganda dengan Dinas Pendidikan (SD Padureso)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	387.980.000,00	6 bidang tanah dicatat ganda oleh DPUPR (kompleks workshop)
		7.147.607.873,00	15 bidang tanah jalan pencatatan ganda oleh DPUPR
		99.340.000,00	pengadaan patok (barang persediaan) pada Belanja Modal tanah
4	Kelurahan Bumirejo	561.600.000,00	Tanah pencatatan ganda dengan DPUPR (kompleks workshop)
		10.800.000,00	Tanah pencatatan ganda dengan Disperkim (tanah hutan kota)
5	Kecamatan Pejagoan	285.928.000,00	pencatatan ganda dengan tanah Dinas Pertanian dan Pangan (kompleks Kecamatan Pejagoan)
		9.385.881.873,00	

4) Sedangkan pengurangan Aset Tetap Tanah karena reklasifikasi terdapat pada SKPD berikut:

Tabel Pengurangan Reklas Aset Tanah

No.	SKPD	Nilai	Ket
1.	DPU-PR	73.869.100,00	Biaya stacking-out Pengadaan tanah untuk Gedung kantor Kec.Ayah di desa Candirenggo
		49.662.193,00	Biaya stacking-out Pengadaan tanah untuk Jembatan Bulurejo Kec. Ayah
		43.167.047,00	Biaya stacking-out Pengadaan tanah untuk Jembatan Pucung Kebumen
2.	Disporawisata	78.691.300,00	Biaya stacking-out Pengadaan tanah di Kec. Karangsambung
	Total	**245.389.640,00**	

Tahun 2020 masih terdapat tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dipinjam-pakaikan kepada Pihak lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Tanah yang Dipinjampakaikan

No.	Jenis/Lokasi Aset	Luas Tanah/ Bangunan	Penggunaan
1.	Tanah di Desa Prembun Kecamatan Prembun	70 m^2	Pos Lantas Prembun
2.	Tanah di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan	938 m^2	Asrama, Polsek Petanahan
3.	Tanah di Desa Sitiadi Kecamatan Puring	258 m^2	Polsek Puring
4.	Tanah di Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	160 m^2	Pos Lantas Kebumen
5.	Tanah di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	79 m^2	Pos Lantas Gombong
6.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	120 m^2	Kemenag
7.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	50 m^2	BPN

Sedangkan aset tanah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang disewakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 antara lain sebagaimana **lampiran 16**.

Pemerintah Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan pengamanan aset tanah dengan melakukan pensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah. Dari total tanah milik Pemda sebanyak 2.250 bidang, sebanyak 1.240 bidang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat yang disimpan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. Penambahan sertifikat tanah yang diserahkan selama tahun 2020 sebanyak 49 dokumen sertifikat sebagaimana tabel berikut.

Tabel Penambahan Sertifikat Tanah Tahun 2020

No	Kelurahan/Desa	Luas	No	Penggunaan
1	Argopeni	2927	00008	Perluasan Pasar Hewan
2	Bonorowo	907	00012	UPTD Puskesmas Bonorowo
3	Brecong	2666	00001	SDN 1 Brecong
4	Bumirejo	319	0089	Jalan Umum
5	Bumirejo	483	0091	Jalan Umum
6	Bumirejo	609	0095	Jalan Umum
7	Bumirejo	653	0087	Jalan Umum
8	Bumirejo	712	0090	Jalan Umum
9	Bumirejo	851	0086	Jalan Umum
10	Bumirejo	888	0096	Jalan Umum
11	Bumirejo	898	0085	Jalan Umum
12	Bumirejo	951	0092	Jalan Umum
13	Bumirejo	998	0088	Jalan Umum
14	Bumirejo	1318	0093	Jalan Umum
15	Bumirejo	1767	0094	Jalan Umum
16	Jatiluhur	1108	00142	Tanah Pertanian
17	Jatiluhur	2909	00141	Tanah Pertanian
18	Kebumen	1061	00173	Kantor Inspektorat
19	Kemujan	145	00013	UPTD Puskesmas Adimulyo
20	Kemujan	377	00014	UPTD Puskesmas Adimulyo
21	Padureso	11565	00014	Rencana Pembangunan Pasar
22	Pagebangan	707	00002	Pusekesmas Karanggayam
23	Patukrejo	10860	00011	SMPN 1 Bonorowo
24	Plarangan	201	00083	Kantor Kelurahan Plarangan
25	Plarangan	763	00088	Tanah Makam Kelurahan Plarangan
26	Plarangan	976	00087	Kantor Kelurahan Plarangan dan SDN Plarangan
27	Plarangan	1319	00085	Tanah Makam Kelurahan Plarangan
28	Plarangan	1383	00089	Tanah Pertanian dan TK Kelurahan Plarangan
29	Plarangan	1886	00084	Tanah Makam Kelurahan Plarangan
30	Plarangan	2118	00081	Tanah Makam Kelurahan Plarangan
31	Plarangan	3388	00082	Tanah Makam Kelurahan Plarangan
32	Plarangan	6792	00086	Tanah Makam Kelurahan Plarangan
33	Poncowarno	951	00008	UPTD Puskesmas Poncowarno
34	Sadangkulon	1298	00006	UPTD Puskesmas Sadang
35	Selang	1080	00094	Jalan Umum
36	Tamanwinangun	99	00129	Tanah Pertanian
37	Tamanwinangun	506	00138	Tanah Pertanian
38	Tamanwinangun	597	00128	Tanah Pertanian
39	Tamanwinangun	656	00132	Tanah Pertanian
40	Tamanwinangun	656	00135	Tanah Pertanian
41	Tamanwinangun	715	00137	Tanah Pertanian
42	Tamanwinangun	806	00130	Tanah Pertanian
43	Tamanwinangun	948	00133	Tanah Pertanian
44	Tamanwinangun	978	00139	Tanah Pertanian
45	Tamanwinangun	1096	00134	Tanah Pertanian
46	Tamanwinangun	1395	00131	Tanah Pertanian
47	Tamanwinangun	1698	00136	Tanah Pertanian
48	Wonokriyo	493	00087	Tanah Pertanian
49	Wonokriyo	629	00088	Tanah Pertanian

5.3.1.3.1 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2020	Saldo Awal	31 Desember 2019
Rp.871.877.327.627,00	Rp.779.810.510.159,00	Rp.765.195.323.365,00

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD adalah sebagaimana **lampiran 17**.

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Awal (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
779.810.510.159,00	129.568.228.233,00	37.501.410.765,00	133.114.305.998,00	871.877.327.627,00

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal	40.570.767.532,00
2.	Belanja Modal BOS/BLUD	48.514.195.110,00
3.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	3.115.906.100,00
4.	Mutasi antar OPD	26.145.057.577,00
5.	Perolehan dari Hibah	6.922.073.101,00
6.	Aset yang Belum/Baru Tercatat	1.068.193.616,00
7.	Koreksi Pencatatan	211.990.198,00
8.	Penambahan dari Reklas	3.020.044.999,00
	Jumlah	**129.568.228.233,00**

1) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp40.570.767.532,00 per OPD disajikan dalam tabel **lampiran 18.**
2) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BOS/BLUD sebesar Rp48.514.195.110,00 berasal dari Belanja Modal Dana BOS senilai Rp28.899.428.445,00 dan Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD senilai Rp19.614.766.665,00, dengan rincian tercantum dalam tabel **lampiran 19.**
3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa

No	OPD	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	468	3.056.264.000,00
2	Puskesmas Mirit	3	1.320.000,00
3	Puskesmas Karanggayam I	2	23.710.500,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah dr.	29	19.223.600,00
5	UPTD Pendidikan Kecamatan Rowokele	1	4.928.000,00
6	SMP Negeri 1 Poncowarno	1	3.500.000,00
7	Kecamatan Petanahan	1	6.960.000,00
	Jumlah	**505**	**3.115.906.100,00**

4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena mutasi antar OPD disajikan dalam tabel **lampiran 20.**

5) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin perolehan dari Hibah disajikan dalam tabel **lampiran 21**.

6) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang baru tercatat disajikan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Baru Tercatat

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	175.222.148,00
2	SMP Negeri 7 Kebumen	332.631.667,00
3	SMP Negeri 1 Poncowarno	34.220.501,00
4	SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	31.922.500,00
5	SMP Negeri 3 Karanganyar	242.936.000,00
6	SMP Negeri 3 Gombong	242.936.000,00
7	Kecamatan Padureso	8.324.800,00
	Jumlah	**1.068.193.616,00**

7) Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin karena Koreksi Pencatatan terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Koreksi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman	46.416.000,00
2	Dinas Pendidikan	139.120.598,00
3	SMP Negeri 1 Alian	26.453.600,00
	Jumlah	**211.990.198,00**

8) Mutasi tambah Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	249.773.731,00
2	Dinas Perhubungan	983.776.500,00
3	Puskesmas Ambal I	10.000.000,00
4	Puskesmas Ambal II	3.400.000,00
5	Puskesmas Sempor I	5.000.000,00
6	Dinas Pendidikan	1.070.636.168,00
7	SMP Negeri 7 Kebumen	6.300.000,00
8	SMP Negeri 1 Poncowarno	7.434.000,00
9	SMP Negeri 1 Karangsambung	21.500.000,00
10	SMP Negeri 2 Mirit	16.720.000,00
11	SMP Negeri 1 Kutowinangun	23.300.000,00
12	SMP Negeri 2 Kutowinangun	66.971.000,00
13	SMP Negeri 1 Buluspesantren	4.690.000,00
14	SMP Negeri 2 Buluspesantren	845.000,00
15	SMP Negeri 2 Sruweng	28.630.000,00
16	SMP Negeri 2 Karanggayam	17.315.000,00
17	SMP Negeri 1 Rowokele	21.390.000,00
18	SMP Negeri 2 Rowokele	158.508.500,00
19	SMP Negeri 2 Ayah	21.650.500,00
20	SMP Negeri 3 Satu Atap Ayah	17.409.000,00
21	SMP Negeri 1 Buayan	3.870.000,00
22	SMP Negeri 1 Sadang	8.500.000,00
23	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.926.000,00
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	60.288.250,00
26	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	45.000.000,00
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	37.588.350,00
28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.083.000,00
29	Kelurahan Bumirejo	3.540.000,00
	Jumlah	**3.020.044.999,00**

Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Diusulkan Hapus karena Kondisi Rusak Berat	3.230.387.018,00
2.	Mutasi antar OPD	26.145.057.577,00
3.	Dihibahkan	1.826.557.142,00
5.	Koreksi Pencatatan	5.078.903.000,00
6.	Pengurangan karena Reklas	1.220.506.028,00
	Jumlah	**37.501.410.765,00**

1) Mutasi kurang Aset Peralatan dan Mesin yang di reklas ke Aset Lainnya (usulan penghapusan karena kondisi rusak berat) terdapat pada SKPD sebagaimana **lampiran 22**.

2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena mutasi antar SKPD sama dengan mutasi penambahannya sebagaimana tabel **lampiran 20**.

3) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dihibahkan ke pihak lain sebesar Rp1.826.557.142,00 disajikan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena hibah

No	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.571.775.142,00	Dihibahkan ke Desa
2	Dinas Perhubungan	30.022.000,00	P3D Kementrian Perhubungan
3	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	224.760.000,00	Dihibahlkan ke Polres
	JUMLAH	**1.826.557.142,00**	

Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pompa air yang diserahkan ke Desa. Pada Dinas Perhubungan berkurang karena pelimpahan P3D Terminal Type A kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI sebagaimana Perjanjian Nomor 550/2548 Tanggal 3 November Tahun 2020. Dan hibah pada PPKD berupa Genset untuk Polres Kebumen sesuai SK Hibah Nomor 028/300 Tahun 2020.

4) Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin yang disebabkan karena koreksi pencatatan terdapat pada SKPD sebagai berikut

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Pencatatan

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Bagian Umum	37.279.500,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.500.000,00
3	Dinas Kesehatan	492.777.632,00
4	Puskesmas Ayah I	1.275.000,00
5	Puskesmas Ayah II	764.500,00
6	Puskesmas Puring	9.125.000,00
7	Puskesmas Klirong II	4.400.000,00
8	Puskesmas Buluspesantren I	5.414.750,00
9	Puskesmas Ambal I	7.296.500,00
10	Puskesmas Ambal II	15.749.000,00
11	Puskesmas Prembun	4.200.000,00
12	Puskesmas Padureso	4.210.000,00
13	Puskesmas Kutowinangun	528.000,00
14	Puskesmas Kebumen I	9.407.000,00
15	Puskesmas Kebumen II	7.905.000,00
16	Puskesmas Pejagoan	1.199.000,00
17	Puskesmas Kuwarasan	5.350.000,00
18	Puskesmas Rowokele	4.876.287,00
19	Puskesmas Karangsambung	8.085.000,00
20	Dinas Pendidikan	4.125.614.441,00
21	SMP Negeri 5 Kebumen	7.670.000,00
22	SMP Negeri 2 Karangsambung	1.700.000,00
23	SMP Negeri 1 Ambal	1.175.000,00
24	SMP Negeri 1 Buluspesantren	1.520.000,00
25	SMP Negeri 1 Petanahan	345.000,00
26	SMP Negeri 2 Karanganyar	1.400.000,00
27	SMP Negeri 2 Karanggayam	1.380.000,00
28	SMP Negeri 3 Gombong	62.500,00
29	SMP Negeri 1 Sempor	4.665.000,00
30	SMP Negeri 2 Ayah	847.000,00
31	SMP Negeri 1 Buayan	2.330.000,00
32	SMP Negeri 1 Sadang	12.000.000,00
33	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluar	8.379.000,00
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.581.000,00
35	Dinas Pertanian dan Pangan	46.320.000,00
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	800.000,00
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu S.	9.064.000,00
38	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.089.000,00
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	167.189.990,00
40	Kecamatan Kebumen	2.802.000,00
41	Kecamatan Karangsambung	5.551.600,00
42	Kecamatan Buluspesantren	1.855.000,00
43	Kecamatan Pejagoan	379.500,00
44	Kecamatan Klirong	64.800,00
45	Kecamatan Sruweng	612.000,00
46	Kecamatan Karanganyar	10.956.000,00
47	Kelurahan Karanganyar	115.000,00
48	Kecamatan Adimulyo	609.000,00
49	Kecamatan Gombong	484.000,00
	JUMLAH	**5.078.903.000,00**

5) Rincian pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dilakukan reklasifikasi adalah sebagaimana **lampiran 23**.

5.3.1.3.2 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2020	Saldo Awal	31 Desember 2019
Rp.1.521.415.829.394,00	Rp.1.483.886.048.360,00	Rp.1.490.101.861.928,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.521.415.829.394,00 dirinci per SKPD sebagaimana **lampiran 24**.
Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Awal Mapping	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31-Des-20
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.483.886.048.360,00	235.372.568.373,00	197.842.787.339,00	37.529.781.034,00	1.521.415.829.394,00

Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari berikut.

Tabel Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal	43.164.207.001,00
2.	Belanja Modal BLUD	138.173.800,00
3.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	118.724.000,00
4.	Mutasi antar OPD	186.464.775.616,00
5.	Perolehan dari Hibah	536.387.900,00
6.	Aset yang belum/baru tercatat	3.359.266.000,00
7.	Koreksi pencatatan	1.228.309.456,00
8.	Penambahan dari Reklas	362.724.600,00
	Jumlah	**235.372.568.373,00**

1) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal disajikan sebagai berikut.

Tabel Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.358.327.900,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	76.546.500,00
3	Dinas Perhubungan	1.584.805.919,00
4	Dinas Kesehatan	16.306.660.457,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	1.840.644.000,00
6	Dinas Pendidikan	9.256.694.900,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan	62.179.200,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	221.013.000,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.313.876.400,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	5.969.013.300,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	100.145.425,00
12	Kelurahan Panjer	74.300.000,00
	JUMLAH	**43.164.207.001,00**

2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal BLUD senilai Rp138.173.800,00 secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel Belanja Modal BLUD Gedung dan Bangunan Tahun 2020

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Puskesmas Ayah I	2.600.000,00
2	Puskesmas Buayan	64.490.000,00
3	Puskesmas Ambal I	47.683.800,00
4	Puskesmas Ambal II	23.400.000,00
	JUMLAH	**138.173.800,00**

3) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	SMP Negeri 1 Petanahan	49.700.000,00
2.	Kecamatan Alian	69.024.000,00
	Jumlah	**118.724.000,00**

4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari mutasi antar OPD, disajikan sebagai berikut

Tabel Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan karena Mutasi antar OPD

No.	OPD Asal	OPD Penerima	Nilai (Rp)	Keterangan
1	DPU-PR	Sekretariat DPRD	16.567.443.050,00	
		PPKD	1.895.452.744,00	
		BPKAD	2.122.486.000,00	
		Bagian Umum	1.757.531.000,00	
		Disperkim-LH	4.235.248.634,00	
		Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	104.481.285.757,00	
		Disnaker KUKM	3.808.342.630,00	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	49.455.000,00	
		Disporawisata	1.390.104.000,00	
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.679.936.750,00	
		Satuan Polisi Pamong Praja	182.508.000,00	
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.705.725.100,00	
		Kelurahan Tamanwinangun	1.936.725.000,00	
		Kecamatan Karangsambung	3.391.879.750,00	
		Kecamatan Prembun	206.733.333,00	
		Kecamatan Karanganyar	3.739.044.082,00	
		Kecamatan Sadang	192.239.000,00	
		Kecamatan Poncowarno	1.736.358.000,00	
		Kecamatan Padureso	406.213.333,00	
2	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sempor II	163.869.000,00	
3	Puskesmas Buluspesantren II	PPKD	388.681.000,00	
4	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan (Korwil)	17.570.944.479,00	
		TK Negeri Pembina Kebumen	263.150.919,00	
		TK Negeri Pembina Kuwarasan	62.529.167,00	
		SMP Negeri 6 Kebumen	73.517.000,00	
		SMP Negeri 1 Alian	52.869.000,00	
		SMP Negeri 2 Satu Atap Alian	49.014.000,00	
		SMP Negeri 1 Poncowarno	172.144.000,00	
		SMP Negeri 2 Karangsambung	42.673.000,00	
		SMP Negeri 2 Ambal	149.775.000,00	
		SMP Negeri 2 Sruweng	81.894.000,00	
		SMP Negeri 1 Rowokele	53.535.000,00	
		SMP Negeri 3 Satu Atap Ayah	126.446.000,00	
		SMP Negeri 1 Padureso	69.756.000,00	
5	Dinas Pendidikan (Korwil)	Dinas Pendidikan (Korwil)	15.659.266.888,00	Regrup SD
	JUMLAH		**186.464.775.616,00**	

5) Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari perolehan hibah disajikan pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah

No.	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	SMP Negeri 1 Petanahan	397.042.000,00	Gedung parkir, pos jaga dan toilet (dari komite)
2	SMP Negeri 2 Karanggayam	25.000.000,00	Rehab ruang ketrampilan (dari komite)
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	68.849.900,00	Bangunan Gudang SRG (dari CV Sinergi Karya Nusa)
4	Dinas Pendidikan (Korwil Mirit)	45.496.000,00	Bangunan Mushola SD Pekutan 1 (dari Komite)
	Jumlah	**536.387.900,00**	

6) Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang baru tercatat disajikan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Baru Tercatat

No.	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	478.989.000	Korwil Kebumen
2	Dinas Pendidikan	128.396.000	Korwil Alian
3	Dinas Pendidikan	139.325.000	Korwil Karangsambung
4	Dinas Pendidikan	377.505.000,00	Korwil Pejagoan
5	Dinas Pendidikan	278.650.000,00	Korwil Petanahan
6	Dinas Pendidikan	212.870.000,00	Korwil Karanggayam
7	Dinas Pendidikan	278.650.000,00	Korwil Puring
8	Dinas Pendidikan	248.760.000,00	Korwil Ayah
9	SMP Negeri 1 Prembun	75.000.000,00	Bangunan gedung lama
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.141.121.000,00	Bangunan TPI Tahun 2018/2019
	Jumlah	**3.359.266.000,00**	

7) Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan adalah sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Koreksi Pencatatan

No.	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	665.442.456,00	Koreksi Penggabungan Bangunan
2.	Dinas Pertanian dan Pangan	278.803.000,00	Koreksi Penggabungan Bangunan BPP
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan	284.064.000,00	TPI Tanggulangin, TPI Tambakmulyo
	Jumlah	**1.228.309.456**	

8) Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklas adalah sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Penambahan dari Reklas

No.	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.566.000,00	reklas dari Aset Lainnya (DED)
2.	Dinas Kesehatan	39.886.000,00	reklas dari Aset Lainnya (DED)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	183.635.000,00	reklas dari Aset Lainnya (DED)
4.	Dinas Pendidikan	5.460.000,00	reklas dari Ekstrakomptabel
5.	SMP Negeri 1 Petanahan	6.177.600,00	reklas dari Ekstrakomptabel
	Jumlah	**362.724.600,00**	

Penjelasan atas Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Direklas ke Aset Lain-lain (diusulkan hapus karena	2.298.155.667,00
2.	Mutasi antar OPD	186.464.775.616,00
3.	Hibah	3.916.016.000,00
4.	Koreksi pencatatan	1.286.722.456,00
5.	Reklas	3.877.117.600,00
	Jumlah	**197.842.787.339,00**

1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklas ke Aset Lain-lain atas barang kondisi rusak berat dan diusulkan penghapusan, adalah sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Diusulkan Hapus

No.	OPD	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Puskesmas Puring	3	233.675.000,00
2	Puskesmas Alian	1	84.438.000,00
3	Puskesmas Adimulyo	1	39.390.000,00
4	Puskesmas Sempor II	5	383.356.000,00
5	Dinas Pendidikan	2	55.550.000,00
6	SMP Negeri 1 Prembun	1	122.715.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1.246.227.000,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	1	132.804.667,00
	Jumlah	**19**	**2.298.155.667,00**

2) Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp186.464.775.616,00 karena mutasi antar OPD dijelaskan sebagaimana penambahannya dapat dilihat pada Tabel Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Antara OPD di atas.

3) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena proses hibah senilai Rp3.916.016.000,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

   a. Dinas Perhubungan senilai Rp3.453.992.000,00 karena Pelimpahan dan Penyerahan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI sebagaimana Perjanjian Nomor 550/2548 Tanggal 3 November Tahun 2020.

   b. Puskesmas Kebumen I senilai Rp305.000,00 yang diserahkan ke Pemerintah Desa Kembaran Kecamatan Kebumen sesuai SK Hibah Nomor 028/74 Tahun 2019 tanggal 28 Februari 2019.

4) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Pencatatan

No.	OPD	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	1	723.855.456,00	koreksi dobel catat
2	Dinas Pertanian dan Pangan	2	278.803.000,00	Koreksi Penggabungan
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	284.064.000,00	Koreksi Penggabungan
	Jumlah	**5**	**1.286.722.456,00**	

5) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi dijelaskan sebagai berikut

Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi

No	Nama OPD	Nama Barang	Nilai (Rp)	Reklas Ke
1	DPU-PR	Bangunan Gedung Kantor Permanen	20.443.950,00	Peralatan Mesin (Meja)
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	70.331.700,00	Peralatan Mesin (AC)
2	Dinas Perhubungan	Gedung Pos Jaga Permanen	983.776.500,00	Peralatan Mesin (rambu-rambu)
3	Dinas Kesehatan	Bangunan Klinik/Puskesmas	218.801.000,00	Aset Lainnya (DED)
4	Puskesmas Ayah I	Bangunan Klinik/Puskesmas	2.600.000,00	ekstrakomptabel
5	Puskesmas Buayan	Bangunan Klinik/Puskesmas	64.490.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
6	Puskesmas Ambal I	Bangunan Klinik/Puskesmas	18.844.200,00	Peralatan Mesin dan
7	Puskesmas Ambal II	Bangunan Klinik/Puskesmas	3.400.000,00	Peralatan dan Mesin
8	Disnaker KUKM	Bangunan Gedung Kantor Permanen	62.179.200,00	Aset Lainnya (DED)
9	Disperindag	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	190.907.000,00	Aset Lainnya (DED)
10	BPKAD	Bangunan Gedung Kantor Permanen	60.288.250,00	Peralatan dan Mesin
11	Disporawisata	Bangunan Menara Pengawas Permanen	2.163.972.800,00	Peralatan dan Mesin, Aset
12	Disarpus	Bangunan Gedung Kantor Permanen	17.083.000,00	Peralatan dan Mesin
		Jumlah	**3.877.117.600**	

5.3.1.3.3 Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2020	Saldo Awal	31 Desember 2019
Rp.2.571.424.246.416,00	Rp.2.430.203.942.183,25	Rp.2.430.068.733.183,25

Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada masing-masing OPD sebagaimana **lampiran 25.**

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.430.203.942.183,25	146.937.326.498,00	5.717.022.265,00	141.220.304.233,00	2.571.424.246.416,25

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berasal dari berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal	136.176.943.682,00
2.	Belanja Modal BLUD	4.000.000,00
3.	Mutasi antar OPD	2.187.072.836,00
4.	Hibah	6.345.980.830,00
5.	Penambahan Reklas	2.223.329.150,00
	Jumlah	**146.937.326.498,00**

1) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja Modal tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	126.405.570.724,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	798.827.400,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.083.090.000,00
4	Dinas Perhubungan	4.234.364.940,00
5	Dinas Pendidikan	174.367.000,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	175.749.000,00
7	Inspektorat	86.464.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	201.254.918,00
9	Kecamatan Karangsambung	14.520.000,00
10	Kecamatan Poncowarno	2.735.700,00
	JUMLAH	**136.176.943.682,00**

2) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja BLUD ada pada Puskesmas Bonorowo senilai Rp.4.000.000,00 berupa instalasi jaringan listrik.

3) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Mutasi antar OPD tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena Mutasi antar OPD Tahun 2020

No	OPD Asal	OPD Penerima	Harga Perolehan	Keterangan
1	DPU-PR	Sekretariat DPRD	1.971.815.408	Instalasi listrik gedung
2	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	215.257.428	regrup SD
Jumlah			**2.187.072.836**	

4) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari hibah senilai Rp6.345.980.830,00 berupa Jembatan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 02/BAST/BMN/JBT.RHY/SPJN.I.JTG/III/2020 Tanggal 30 Maret 2020.

5) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi terdapat pada OPD sebagai berikut.

Tabel Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklas

No	OPD	Nilai (Rp)	Reklas dari
1	DPU-PR	40.652.000,00	Aset Lainnya (DED)
2	Disperkim-LH	24.030.000,00	Aset Lainnya (DED)
3	Puskesmas Buayan	64.490.000,00	Gedung dan Bangunan
4	Puskesmas Kebumen III	38.918.000,00	Peralatan dan Mesin
5	Puskesmas Karanggayam I	25.199.350,00	Peralatan dan Mesin
6	SMP Negeri 1 Ayah	18.895.000,00	Peralatan dan Mesin
7	Disporawisata	2.011.144.800,00	Gedung dan Bangunan
	Jumlah	**2.223.329.150,00**	

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan disebabkan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kondisi Rusak Berat	264.125.000,00
2.	Mutasi antar OPD	2.187.072.836,00
3.	Koreksi pencatatan	2.156.183.964,00
4.	Pengurangan karena Reklas	1.109.640.465,00
	Jumlah	**5.717.022.265,00**

1) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena rusak berat diusulkan untuk dihapus senilai Rp.264.125.000,00 yaitu pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

2) Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.187.072.836,00 karena mutasi antar OPD tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan di atas.

3) Mutasi Kurang Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena koreksi sebesar Rp2.156.183.964,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Karena Koreksi

No	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	DPU-PR	1.944.693.346,00	Koreksi dobel catat Jalan
2	Diskominfo	201.254.918,00	Koreksi barang bukan aset (sparepart)
3	Kecamatan Karangsambung	7.500.000,00	koreksi penambahan daya
4	Kecamatan Poncowarno	2.735.700,00	koreksi penambahan daya
JUMLAH		**2.156.183.964,00**	

4) Pengurangan karena reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.109.640.465,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut.

Tabel Pengurangan Karena Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

No	OPD	Nilai (Rp)	Reklas ke
1	DPU-PR	846.613.065,00	Aset Lainnya (DED)
2	Disperkim-LH	71.500.400,00	Aset Lainnya (DED)
3	BPBD	191.527.000,00	Aset Lainnya (DED)
	Jumlah	**1.109.640.465,00**	

5.3.1.3.4 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2020	Saldo Awal	31 Desember 2019
Rp.132.900.631.859,00	Rp.124.399.209.154,00	Rp.133.561.451.585,00

Rincian Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD sebagaimana **lampiran 26**.

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Lainnya selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
124.399.209.154,00	16.074.334.636,00	7.572.911.931,00	8.501.422.705,00	132.900.631.859,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2020 terdiri dari berikut ini.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal	98.930.000,00
2.	Belanja Modal BOS/BLUD	11.913.762.630,00
3.	Mutasi antar OPD	3.651.087.676,00
4.	Perolehan dari Hibah	84.500.000,00
5.	Aset baru tercatat	270.000.000,00
6.	Penambahan karena koreksi	1.112.500,00
7.	Penambahan karena reklas	54.941.830,00
	Jumlah	**16.074.334.636,00**

1) Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.98.930.000,00 berasal dari belanja modal SKPD berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun 2020

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Disperkim-LH	625.000,00	Bahan Perpustakaan
2	SMP Negeri 2 Karanganyar	8.500.000,00	Alat kesenian
3	Dispendukcapil	6.800.000,00	Buku
4	Disporawisata	49.465.000,00	Alat Olahraga
5	Disarpus	30.000.000,00	Buku Agama
6	Kelurahan Bumirejo	3.540.000,00	Alat Olahraga
	Jumlah	**98.930.000,00**	

2) Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS dan Belanja Modal BLUD disajikan sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS/BLUD Tahun 2020

No.	SKPD	Jumlah	Ket
1	Dinas Pendidikan	7.713.025.098,00	BM BOS SDN
2	Dinas Pendidikan	4.195.013.532,00	BM BOS SMPN
3	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	5.724.000,00	BLUD
	JUMLAH	**11.913.762.630,00**	

3) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari mutasi antar OPD senilai Rp.3.651.087.675,00 berupa buku pelajaran dari Dinas Pendidikan ke sekolah (SMP Negeri dan SD Negeri) senilai Rp.1.333.859.137,00 dan karena *regrouping* sekolah dasar senilai Rp.2.317.228.538,00.

Penambahan aset tetap lainnya karena mutasi yang berasal dari Dinas Pendidikan ke sekolah sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Mutasi dari Dinas Pendidikan ke Sekolah

SKPD Asal	SKPD Penerima	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	TK Negeri Pembina Kebumen	9.856.368,00	
	TK Negeri Pembina Kuwarasan	9.856.369,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kebumen	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Alian	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Karangsambung	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Prembun	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Mirit	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kutowinangun	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Ambal	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Buluspesantren	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Pejagoan	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Klirong	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Petanahan	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Sruweng	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Karanganyar	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Karanggayam	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Adimulyo	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kuwarasan	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Puring	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Gombong	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Rowokele	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Ayah	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Buayan	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Sadang	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Poncowarno	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Padureso	50.289.936,00	
	Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Bonorowo	50.289.936,00	
	SMP Negeri 2 Kebumen	9.483.000,00	
	SMP Negeri 5 Kebumen	9.483.000,00	
	SMP Negeri 6 Kebumen	9.483.000,00	
	SMP Negeri 2 Satu Atap Alian	9.483.000,00	
	SMP Negeri 1 Kutowinangun	9.483.000,00	
	SMP Negeri 1 Gombong	9.483.000,00	
JUMLAH		**1.333.859.137,00**	

Selain itu, mutasi berasal dari *regruping* SD secara rinci sebagai berikut:

Tabel Regrouping SD Negeri Tahun 2020

No	Korwil	SD Awal	SD Induk	Nilai (Rp)
1	Korwil Kebumen	SDN 2 Depokrejo	SDN Depokrejo	55.892.359,00
		SDN 2 Kalijirek	SDN Kalijirek	45.780.450,00
		SDN 1 Kalirejo	SDN Kalirejo	41.087.635,00
2	Korwil Alian	SDN 3 Bojongsari	SDN 2 Bojongsari	94.564.915,00
		SDN 1 Karangtanjung	SDN 2 Karangtanjung	88.064.873,00
3	Korwil Karangsambung	SDN 2 Karangsambung	SDN 1 Karangsambung	60.485.427,00
		SDN 3 Wadasmalang	SDN Rowobayem	176.847.489,00
		SDN 2 Kalipuru	SDN 1 Kalipuru	114.918.600,00
4	Korwil Mirit	SDN 2 Selotumpeng	SDN 1 Selotumpeng	114.263.400,00
5	Korwil Buluspesantren	SDN 1 Banjurpasar	SDN 2 Banjurpasar	96.783.960,00
		SDN 3 Waluyo	SDN 2 Waluyo	170.405.831,00
6	Korwil Pejagoan	SDN 1 Kebulusan	SDN 2 Kebulusan	86.069.837,00
		SDN Kedawung 3	SDN Kedawung	197.793.573,00
		SDN Kedawung 2		79.372.539,00
		SDN 1 Peniron	SDN Peniron	20.599.927,00
		SDN 3 Peniron		45.337.963,00
7	Korwil Klirong	SDN 2 Kedungwinangun	SDN 1 Kedungwinangun	62.436.909,00
		SDN 3 Podoluhur	SDN 1 Podoluhur	82.177.854,00
8	Korwil Karanganyar	SDN 3 Karanganyar	SDN 2 Karanganyar	66.115.348,00
		SDN 5 Karanganyar	SDN Karangkemiri	21.799.018,00
		SDN 1 Giripurno	SDN 3 Giripurno	156.745.194,00
9	Korwil Kuwarasan	SDN 3 Sawangan	SDN 1 Sawangan	76.245.965,00
10	Korwil Gombong	SDN 1 Kedungpuji	SDN 2 Kedungpuji	149.460.024,00
		SDN 1 Semondo	SDN 2 Semondo	35.247.068,00
11	Korwil Sempor	SDN 2 Bejiruyung	SDN 1 Bejiruyung	12.271.600,00
12	Korwil Rowokele	SDN 1 Bumiagung	SDN 3 Bumiagung	4.094.500,00
		SDN 3 Pringtutul	SDN 1 Pringtutul	28.184.135,00
13	Korwil Ayah	SDN 2 Demangsari	SDN 3 Demangsari	29.064.281,00
14	Korwil Bonorowo	SDN 2 Mrentul	SDN 1 Mrentul	75.757.355,00
		SDN 2 Bonjokkidul	SDN 1 Bonjokkidul	29.360.509,00
	JUMLAH			**2.317.228.538,00**

4) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari perolehan hibah terletak pada OPD sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Hibah Tahun 2020

No	OPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	79.500.000,00	Alat Kesenian SD 2 Kretek
2	SMP Negeri 1 Kutowinangun	5.000.000,00	Alat Kesenian dari Komite
	Jumlah	**84.500.000,00**	

5) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari aset yang belum/baru tercatat terletak pada Dinas Pendidikan (SD Negeri Menganti pada Korwil Dinas Pendidikan Sruweng), SMP Negeri 1 Karangsambung dan SMP Negeri 2 Sruweng berupa alat kesenian masing-masing senilai Rp.90.000.000,00.

6) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari koreksi senilai Rp.1.112.500,00 ada pada Dinas Pendidikan (Korwil Kecamatan Kebumen dan Korwil Kecamatan Klirong).

7) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi tahun 2020 terletak pada OPD sebagai berikut.

Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Reklasifikasi Tahun 2020

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	42.882.330,00
2	SMP Negeri 1 Kebumen	6.600.000,00
3	SMP Negeri 2 Kutowinangun	660.000,00
4	SMP Negeri 1 Buluspesantren	2.000.000,00
5	SMP Negeri 2 Ayah	2.799.500,00
	JUMLAH	**54.941.830,00**

Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2020 disebabkan oleh berikut ini.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kondisi Rusak Berat/usul hapus	780.391.253,00
2.	Mutasi ke Dinas lain	3.651.087.676,00
3.	Hibah	28.200.000,00
4.	Koreksi	1.381.918.843,00
5.	Reklas	1.731.314.159,00
	Jumlah	**7.572.911.931,00**

1) Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi ke Aset Lainnya karena kondisi rusak berat terletak pada OPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Barang Rusak Berat/Diusulkan hapus Tahun 2020

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	69.621.269,00
2	SMP Negeri 2 Kebumen	58.532.128,00
3	SMP Negeri 5 Kebumen	62.028.851,00
4	SMP Negeri 6 Kebumen	288.000,00
5	SMP Negeri 7 Kebumen	36.309.408,00
6	SMP Negeri 1 Alian	186.569.141,00
7	SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	28.220.988,00
8	SMP Negeri 2 Mirit	23.426.964,00
9	SMP Negeri 1 Klirong	52.237.173,00
10	SMP Negeri 1 Petanahan	12.759.491,00
11	SMP Negeri 1 Karangany ar	65.684.714,00
12	SMP Negeri 2 Karanggay am	155.052.406,00
13	SMP Negeri 2 Adimuly o	9.871.700,00
14	SMP Negeri 1 Sempor	19.789.020,00
	Jumlah	**780.391.253,00**

2) Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.3.651.087.676,00 karena mutasi antar OPD tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel penambahan aset tetap lainnya karena mutasi antar OPD tahun 2020 di atas.

3) Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena hibah ada pada Dinas Perhubungan berupa tanaman senilai Rp.28.200.000,00 karena Pelimpahan dan Penyerahan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI sebagaimana Perjanjian Nomor 550/2548 Tanggal 3 November Tahun 2020.

4) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari koreksi terletak pada OPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Koreksi

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.234.694.301,00
2	SMP Negeri 5 Kebumen	23.530.000,00
3	SMP Negeri 1 Karangsambung	2.500.000,00
4	SMP Negeri 1 Buluspesantren	1.310.000,00
5	SMP Negeri 2 Buluspesantren	500.000,00
6	SMP Negeri 1 Petanahan	530.000,00
7	SMP Negeri 2 Sruweng	12.363.000,00
8	SMP Negeri 2 Karanggayam	17.050.000,00
9	SMP Negeri 1 Sempor	64.567.900,00
10	SMP Negeri 1 Ayah	2.100.000,00
11	SMP Negeri 2 Ayah	313.500,00
12	SMP Negeri 1 Buayan	13.497.272,00
13	SMP Negeri 1 Sadang	4.500.000,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisa	4.462.870,00
	JUMLAH	**1.381.918.843,00**

5) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Reklasifikasi

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.183.662.929,00
2	SMP Negeri 7 Kebumen	7.000.000,00
3	SMP Negeri 1 Poncowarno	7.434.000,00
4	SMP Negeri 1 Karangsambung	21.500.000,00
5	SMP Negeri 2 Karangsambung	2.000.600,00
6	SMP Negeri 2 Mirit	17.960.000,00
7	SMP Negeri 1 Kutowinangun	27.198.000,00
8	SMP Negeri 2 Kutowinangun	66.971.000,00
9	SMP Negeri 1 Buluspesantren	4.690.000,00
10	SMP Negeri 2 Buluspesantren	845.000,00
11	SMP Negeri 2 Sruweng	30.445.000,00
12	SMP Negeri 2 Karanggayam	18.790.000,00
13	SMP Negeri 1 Rowokele	21.390.000,00
14	SMP Negeri 2 Rowokele	219.093.500,00
15	SMP Negeri 2 Ayah	24.013.000,00
16	SMP Negeri 3 Satu Atap Ayah	17.409.000,00
17	SMP Negeri 1 Buayan	3.870.000,00
18	SMP Negeri 1 Sadang	8.500.000,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	45.002.130,00
20	Kelurahan Bumirejo	3.540.000,00
	JUMLAH	**1.731.314.159,00**

5.3.1.3.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 disajikan sebesar Rp0,00.

5.3.1.3.6 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp.1.948.301.932.914,54)	(Rp1.667.817.400.927,14)

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 per jenis akun disajikan sebagai berikut.

Tabel Nilai Akumulasi Penyusutan per Jenis Akun

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	773.834.470.627,55	-	773.834.470.627,55
2.	Peralatan dan Mesin	871.877.327.627,00	(609.373.322.217,00)	262.504.005.410,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.521.415.829.394,00	(320.357.802.186,00)	1.201.058.027.208,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.571.424.246.416,25	(1.018.570.808.511,54)	1.552.853.437.904,71
5.	Aset Tetap Lainnya	132.900.631.859,00	-	132.900.631.859,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-		-
	Jumlah	**5.871.452.505.923,80**	**(1.948.301.932.914,54)**	**3.923.150.573.009,27**

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD disajikan sebagaimana **lampiran 27**.

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp113.882.152.525,70	Rp.116.762.634.581,00

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kebumen disajikan secara neto setelah diperhitungkan akumulasi amortisasi, sebagai berikut.

Tabel Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2020	31 desember 2019	Kenaikan/	%
	(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)	
Tagihan jangka Panjang	-	-	-	-
Kemitraaan dengan Fihak Ketiga	16.134.562.688,00	16.134.562.688,00	0,00	-
Aset Tidak berwujud	8.903.097.510,70	8.741.274.141,00	161.823.369,70	1,85
Aset Lain-lain	88.844.492.327,00	91.886.797.752,00	(3.042.305.425)	(3,31)
Jumlah	**113.882.152.525,70**	**116.762.634.581,00**	(2.880.482.055)	(2,47)

5.3.1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp16.134.562.688,00	Rp16.134.562.688,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset Bangun Guna Serah atau *Built Operate Transfer* (*BOT*). Aktiva lain-lain Built Operate Transfer adalah penyertaan Pemerintah Kabupaten dalam kemitraannya dengan pihak ketiga. Adapun nilai penyertaan sampai dengan tahun 2020 dan perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)
Tanah Pemkab HPL No.2, seluas 34.877m², di Pasar Gombong Wonokriyo	15.379.170.688,00
Tanah Pemkab HPL No.3, seluas 1.628m², di Pasar Gombong Wonokriyo	755.392.000,00
Jumlah	**16.134.562.688,00**

Nilai *Built Operate Transfer* di atas merupakan *Built Operate Transfer* pada pembangunan pasar Wonokriyo Gombong. Sesuai Surat Perjanjian Nomor 511.2.1336 dan 081.KBBP-SI/X/1995 tanggal 10 Oktober 1995 yang dikuatkan dengan Keputusan Kementrian Dalam Negeri nomor 644.133-166 tanggal 5 Maret 1996 antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan PT Karsa Bayu Bangun Prakasa dalam pembangunan pasar Wonokriyo Gombong, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyertakan modal berupa tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen seluas 39.805m^2 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima meter persegi) senilai Rp4.962.112.500,00. Atas perjanjian kerjasama tersebut tidak diperoleh data nilai pembangunan Pasar Wonokriyo Gombong. Kemitraan ini disepakati sesuai dengan masa perjanjian adalah 30 (tiga puluh) tahun.

Pada tahun 2011 dilakukan koreksi penilaian atas tanah yang diserahkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tahun penyusunan neraca awal yaitu sebesar Rp17.552.192.000,00. Hal ini dilakukan karena tanah diserahkan sebelum neraca awal. Tahun 2014 dilakukan koreksi tambah atas aset tanah yang mitrakan sebesar Rp755.392.000,00 sehingga total nilai kemitraan dengan pihak ketiga menjadi sebesar Rp18.307.584.000,00.

Pada tahun 2018, aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dikoreksi kurang seluas 4.928m^2 atau senilai Rp2.173.021.312,00 direklas ke Aset Tetap Tanah, dengan adanya pelepasan hak pengelolaan yang dilakukan oleh PT Karsa Bayu Bangun Perkasa atas tanah untuk Pasar Wonokriyo Blok J, K, dan L akibat kebakaran yang terjadi pada tahun 2017.

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp8.903.097.510,70	Rp8.741.274.141,00

Aset Tidak Berwujud secara rinci disajikan sebagai berikut

Tabel Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
DED	11.584.391.073,00	10.101.732.018,00	1.482.659.055,00	12,80
Software	3.001.878.030,00	3.001.397.430,00	480.600,00	0,02
Jumlah Nilai Perolehan	**14.586.269.103,00**	**13.103.129.448,00**	**1.483.139.655,00**	**10,17**
Amortisasi	(5.683.171.592,30)	(4.361.855.307,00)	(1.321.316.285,30)	23,25
Jumlah Nilai Buku	**8.903.097.510,70**	**8.741.274.141,00**	**161.823.369,70**	**1,82**

Rincian aset tidak berwujud per OPD disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD Per 31 Desember 2020

No	OPD	DED (Rp)	Software (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	237.427.000,00		237.427.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.550.000,00		44.550.000,00
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	899.803.300,00	121.110.000,00	1.020.913.300,00
4	Dinas Kesehatan	224.758.400,00		224.758.400,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.095.995.913,00		9.095.995.913,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan P3A	41.804.000,00		41.804.000,00
7	Dinas Perhubungan	109.993.800,00	181.945.900,00	291.939.700,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	618.338.000,00		618.338.000,00
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan	121.093.400,00		121.093.400,00
10	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga	33.127.500,00		33.127.500,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun		33.000.000,00	33.000.000,00
12	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	48.070.000,00		48.070.000,00
13	Rumah Sakit Umum dr.Soedirman	47.250.560,00	772.174.000,00	819.424.560,00
14	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		416.096.000,00	416.096.000,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		62.215.000,00	62.215.000,00
16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		105.862.000,00	105.862.000,00
17	Bagian Hukum		80.473.300,00	80.473.300,00
18	Bagian Organisasi		54.340.000,00	54.340.000,00
19	Bagian Pembangunan		165.210.000,00	165.210.000,00
20	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		40.257.800,00	40.257.800,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika		350.317.150,00	350.317.150,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		229.338.180,00	229.338.180,00
23	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan	62.179.200,00	94.055.000,00	156.234.200,00
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		35.000.000,00	35.000.000,00
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		194.258.100,00	194.258.100,00
26	Puskesmas Karanggayam II		4.000.000,00	4.000.000,00
27	Unit Pengobatan Penyakit Paru		3.500.000,00	3.500.000,00
28	Kecamatan Kutowinangun		5.000.000,00	5.000.000,00
29	Dinas Pendidikan (Korwil Kebumen/SD.N Sumberadi)		9.000.000,00	9.000.000,00
30	SMP Negeri 1 Ayah		3.696.000,00	3.696.000,00
31	SMP Negeri 1 Gombong		275.000,00	275.000,00
32	SMP Negeri 2 Gombong		24.454.000,00	24.454.000,00
33	SMP Negeri 1 Klirong		5.600.000,00	5.600.000,00
34	SMP Negeri 1 Petanahan		6.500.000,00	6.500.000,00
35	SMP Negeri 1 Prembun		2.200.000,00	2.200.000,00
36	SMP Negeri 2 Karangsambung		2.000.600,00	2.000.600,00
	JUMLAH	**11.584.391.073,00**	**3.001.878.030,00**	**14.586.269.103,00**

Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD disajikan sebagai berikut.

Tabel Amortisasi Aset Tak Berwujud per OPD per 31 Desember 2020

No	OPD	Nilai Perolehan (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	237.427.000,00	51.282.700,00	186.144.300,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.550.000,00	17.820.000,00	26.730.000,00
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan	1.020.913.300,00	402.917.830,00	617.995.470,00
4	Dinas Kesehatan	224.758.400,00	24.263.060,00	200.495.340,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	9.095.995.913,00	3.233.157.434,50	5.862.838.478,50
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	41.804.000,00	25.082.400,00	16.721.600,00
7	Dinas Perhubungan	291.939.700,00	104.578.810,00	187.360.890,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	618.338.000,00	288.900.400,00	329.437.600,00
9	Dinas Perumahan dan Kawasan	121.093.400,00	26.987.240,00	94.106.160,00
10	Dinas Sosial dan Pengendalian	33.127.500,00	16.563.750,00	16.563.750,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	33.000.000,00	6.600.000,00	26.400.000,00
12	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	48.070.000,00	28.842.000,00	19.228.000,00
13	Rumah Sakit Umum dr.Soedirman	819.424.560,00	485.847.368,00	333.577.192,00
14	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	416.096.000,00	333.614.900,00	82.481.100,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	62.215.000,00	23.136.000,00	39.079.000,00
16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	105.862.000,00	48.415.600,00	57.446.400,00
17	Bagian Hukum	80.473.300,00	40.236.650,00	40.236.650,00
18	Bagian Organisasi	54.340.000,00	27.170.000,00	27.170.000,00
19	Bagian Pembangunan	165.210.000,00	82.686.600,00	82.523.400,00
20	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	40.257.800,00	12.077.340,00	28.180.460,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	350.317.150,00	165.166.220,00	185.150.930,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	229.338.180,00	110.874.690,00	118.463.490,00
23	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi,	156.234.200,00	38.443.420,00	117.790.780,00
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan	35.000.000,00	21.000.000,00	14.000.000,00
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	194.258.100,00	47.492.920,00	146.765.180,00
26	Puskesmas Karanggayam II	4.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00
27	Unit Pengobatan Penyakit Paru	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00
28	Kecamatan Kutowinangun	5.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
29	Dinas Pendidikan (Korwil Kebumen/SD.N Sumberadi)	9.000.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00
30	SMP Negeri 1 Ayah	3.696.000,00	1.478.400,00	2.217.600,00
31	SMP Negeri 1 Gombong	275.000,00	165.000,00	110.000,00
32	SMP Negeri 2 Gombong	24.454.000,00	4.890.800,00	19.563.200,00
33	SMP Negeri 1 Klirong	5.600.000,00	1.120.000,00	4.480.000,00
34	SMP Negeri 1 Petanahan	6.500.000,00	4.550.000,00	1.950.000,00
35	SMP Negeri 1 Prembun	2.200.000,00	660.000,00	1.540.000,00
36	SMP Negeri 2 Karangsambung	2.000.600,00	200.060,00	1.800.540,00
		14.586.269.103,00	**5.683.171.592,50**	**8.903.097.510,50**

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp.88.844.492.327,00	Rp91.886.797.752,00

Aset Lain-lain disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Aset lain-Lain

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Kenaikan / (penurunan)	%
Aset Lain-lain	100.327.952.610,00	108.566.460.559,00	8.238.507.949,00	7,59
Akumulasi Penyusutan	(11.483.460.283,00)	(16.679.662.807,00)	(5.196.202.524,00)	31,15
Nilai buku	**88.844.492.327,00**	**91.886.797.752,00**	**3.042.305.425,00**	**3,31**

Aset Lain-lain per OPD disajikan dengan nilai akumulasi penyusutannya dengan rincian sebagaimana **lampiran 28**.

Aset lain-lain terdiri dari Aset lainnya berupa tanah jalan (JJLS) dan jalan desa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum diserahkan ke desa senilai Rp.84.629.745.229,00 dan Barang Rusak Berat yang telah dihentikan penggunaannya oleh OPD namun belum dihapuskan dari daftar Barang Inventaris senilai Rp. 15.698.207.381,00.

Bertambah dan berkurangnya Aset Lain-lain selama tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
108.566.460.559,00	6.734.351.323,00	14.972.859.272,00	(8.238.507.949,00)	100.327.952.610,00

Penambahan Aset Lain-lain selama tahun 2020 senilai Rp.6.734.351.323,00 terdiri dari

1. Penambahan barang rusak berat senilai Rp6.573.058.938,00 berada pada OPD sebagaimana **lampiran 29.**
2. Penambahan Aset lain-lain karena mutasi OPD lain senilai Rp161.292.385,00 yang secara rinci sebagai berikut:

Tabel Penambahan Aset Lain-lain karena Mutasi OPD lain

No	OPD Asal	OPD Penerima	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	71.366.385,00	Regrup SD
2	Dispermades P3A	PPKD	78.000.000,00	
3	BKPPD	PPKD	3.000.000,00	
4	Kecamatan Gombong	Dinsos PPKB	8.926.000,00	
			161.292.385,00	

Pengurangan Aset Lain-lain terdiri dari:

Tabel Pengurangan Aset lain-lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghapusan (terbit SK)	14.070.474.102,00
3.	Mutasi antar OPD	161.292.385,00
4.	Hibah	3.000.000,00
5.	Koreksi	415.193.704,00
6.	Reklas	322.899.081,00
	Jumlah	**14.972.859.272,00**

1) Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp14.070.474.102,00 merupakan aset rusak berat yang sudah terbit SK Penghapusan.

2) Pengurangan karena mutasi antar OPD senilai Rp.161.292.385,00 secara rinci dapat dilihat pada tabel penambahan aset lainnya karena mutasi antar OPD tahun 2020 di atas.

3) Pengurangan karena hibah senilai Rp.3.000.000,00 ada pada Dinas Perhubungan karena Pelimpahan dan Penyerahan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI sebagaimana Perjanjian Nomor 550/2548 Tanggal 3 November Tahun 2020.

4) Pengurangan Aset Lain-lain karena koreksi senilai Rp.415.193.704,00 secara rinci ada pada OPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Lain-lain karena koreksi

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	DPU-PR	259.945.000,00	dobel catat
2	Puskesmas Kuwarasan	11.928.400,00	koreksi salah catat
3	Dinas Pendidikan	103.725.504,00	dobel catat
4	SMP Negeri 2 Ayah	1.365.100,00	koreksi ekstra
5	Disnaker KUKM	15.014.700,00	dobel catat dengan Dinsos
6	Kecamatan Karangsambung	18.215.000,00	dobel catat dengan Dinsos
7	Kecamatan Karanganyar	5.000.000,00	koreksi salah catat
	JUMLAH	**415.193.704,00**	

5) Pengurangan karena reklas Aset Lain-lain karena senilai Rp.322.899.081,00 secara rinci ada pada OPD sebagai berikut.

Tabel Pengurangan Aset Lain-lain karena reklas

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.998.081,00	suku cadang, reklas menambah aset tetap
2	Dinas Pendidikan	9.975.000,00	reklas ke aset tetap, digunakan kembali
3	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.926.000,00	reklas ke aset tetap, digunakan kembali
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000,00	reklas ke aset tetap, digunakan kembali
5	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	45.000.000,00	reklas ke aset tetap, digunakan kembali
	JUMLAH	**322.899.081,00**	

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp44.681.218.516,00	Rp28.013.032.839,83

Kewajiban merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dibagi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Kewajiban

Uraian	31-Dec-20 (Rp)	31-Dec-19 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kewajiban Jangka Pendek	44.681.218.516,00	28.013.032.839,83	16.668.185.676,17	59,50
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**44.681.218.516,00**	**28.013.032.839,83**	**16.668.185.676,17**	**59,50**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp44.681.218.516,00	Rp28.013.032.839,83

Kewajiban Jangka Pendek secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31-Dec-20 (Rp)	31-Dec-19 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	34.314.950,00	130.874.639,00	(96.559.689,00)	(73,78)
Pendapatan diterima Dimuka	1.248.346.951,00	981.745.192,83	266.601.758,17	27,16
Utang Beban	19.829.579.048,00	13.590.043.826,00	6.239.535.222,00	45,91
Utang Jangka Pendek Lainnya	23.568.977.567,00	13.310.369.182,00	10.258.608.385,00	77,07
Jumlah	**44.681.218.516,00**	**28.013.032.839,83**	**16.668.185.676,17**	**59,50**

Kewajiban Jangka Pendek dibandingkan tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar 59,49%, antara lain disebabkan Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Desember 2020 dan Insentif Tenaga Kesehatan COVID-19 dibayarkan di tahun berikutnya sehingga menambah utang beban di TA 2020.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp34.314.950,00	Rp130.874.639,00

Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per OPD per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga

No.	SKPD	Jml Utang PFK (Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	%	Ket
		2020	2019			
1.	Puskesmas Kutowinangun	0,00	856.682,00	(856.682,00)	(100,00)	
2.	Puskesmas Petanahan	2.070.000,00	50.000,00	2.020.000,00	4.040,00	Dana Prolanis
3.	Dinas Pendidikan	11.674.932,00	129.968.957,00	(118.294.025,00)	(91,02)	Pajak telat setor (BOS)
4.	SMPN 1 Adimulyo	41.325,00	0,00	41.325,00	100,00	Pajak telat setor
5.	SMPN 3 Satap Karangsambung	136.400,00	0,00	136.400,00	100,00	Pajak telat setor
6.	Puskesmas Ambal II	1.147.100,00	0,00	1.147.100,00	100,00	Dana Prolanis
7.	Puskesmas Buluspesantren II	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00	100,00	Dana Prolanis
8.	Puskesmas Klirong I	2.127.100,00	0,00	2.127.100,00	100,00	Dana Prolanis
9.	Puskesmas Sadang	885.850,00	0,00	885.850,00	100,00	Dana Prolanis
10.	RSUD Prembun	14.651.243,00	0,00	14.651.243,00	100,00	Utang PFK Askes
	Jumlah	**34.314.950,00**	**130.875.639,00**	**(96.560.689,00)**	**(73,78)**	

Utang Perhitungan Pihak ketiga dibandingkan tahun sebelumnya turun sebesar 73,78%, hal ini disebabkan penyetoran pajak dana BOS lebih tertib, sehingga tingkat keterlambatan penyetoran pajak menurun.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.248.346.951,00	Rp981.745.192,83

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2020 diterima OPD sebagai berikut.

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per OPD

No.	OPD	Jml Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)	
		2020	2019
1.	RSUD Dr Soedirman	181.495.000,00	153.496.500,00
2.	Bag Umum Setda	57.497.400,00	37.368.000,00
3.	Kec Kebumen	90.330.906,00	56.627.952,00
4.	Kec Karanganyar	201.911.700,00	93.450.300,00
5.	Kec Gombong	135.583.000,00	45.919.208,00
6.	BPKAD	317.030.720,00	360.132.660,83
7.	Bapenda	264.498.225,00	234.750.572,00
	Jumlah	**1.248.346.951,00**	**981.745.192,83**

Pendapatan diterima dimuka pada RSUD dr Soedirman berasal dari pendapatan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD Dr.Soedirman

No.	Nama Pihak Ketiga	No.Perjanjian	Jangka Waktu	Masa	Sisa masa	Nilai Perjanjian	Disetor tgl	Jml Pendapatan
1.	PT MAC SARANA JAYA	026/MSD/ADD-RSUDDS/XII/2015	1 Apr'15 - 1 Apr'25	120	51	275.000.000,00	1 Peb'16	116.875.000,00
2.	UNRIYO	445/00016.30/PKS/I/2019	2 jan'19 - 1 Jan'22	36	12	3.000.000,00	27 Mar'19	1.000.000,00
3.	Universitas Jend A.Yani Yogyakarta	445/02537/PKS/VIII/2019	1 Agust'19 - 1 agust'22	36	19	6.000.000,00	21 Sept'19	3.166.666,67
4.	AKADEMI ANALIS KESEHATAN	445/00465/PKS/II/2019	13 Peb'19 - 12 Peb'22	36	13	750.000,00	22 Maret'19	270.833,33
5.	UNSOED	445/3059.4/PKS/XII/2018	17 des'18 - 17 Des'21	36	12	750.000,00	17 Jan'19	250.000,00
6.	STIKES MADANI YOGYAKARTA	445/0459a/PKS/XII/2019	23 des'19 - 22 Des'24	60	48	5.000.000,00	9 Maret 2020	4.000.000,00
7.	STIKES Al IRSYAD CILACAP	3245/386/03.1	20 des'19 - 19 Des'22	36	21	7.500.000,00	15 Okt 2020	4.375.000,00
8.	SMK TAMTAMA KARANGANYAR KBM	050/I.03/05-EA/PSG/2019	1 Peb '20 - 1 Peb'22	24	13	500.000,00	19 Agust 2020	270.833,33
9.	AKADEMI KOMUNITAS AL KAHFI	001/KSO/B/AK. Al Kahfi/III/2020	11 Mar'20 - 10 Mar 2023	36	26	750.000,00	17 Sept 2020	541.666,67
10.	uNIVERSITAS ALMA ATA	007/B/Mou/UAA/II/2020	21 Peb 20 - 20 Peb 25	60	50	7.500.000,00	19 Agust 2020	6.250.000,00
11.	BNI CAB KEBUMEN	KBM/SEWA/003	1 April 20 - 31 maret 25	60	51	50.000.000,00	1 April 2020	42.500.000,00
12.	AKHMAD BINTARTO	445/2557/PKS/VIII/2020	1 Agust'20 - 31 Juli'2021	12	7	3.420.000,00	3 Sept 2020	1.995.000,00
							JUMLAH	**181.495.000,00**

Pendapatan diterima dimuka pada Bagian Umum Setda Kebumen berasal dari sewa tempat untuk Kantin, Koperasi dan ATM Bank Jateng di kompleks Setda Kebumen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Bag.Umum Setda Kebumen

No.	Nama Pihak Ketiga	No.Perjanjian	Jangka Waktu	Masa manfaat (bln)	Sisa masa manfaat (bln)	Nilai Perjanjian	Disetor tgl	Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka
1.	Koperasi SAGU	030/2323	16 Sept'20 - 15 Sept'21	12	8	4.428.000,00	21 Des 2020	2.952.000,00
2.	Koperasi SAGU	030/2324	16 Sept'20 - 15 Sept'21	12	8	5.940.000,00	22 Des 2020	3.960.000,00
3.	Dharma Wanita Kab Kebumen	030/2325	16 Sept'20 - 15 Sept'21	12	8	5.184.000,00	30 Nov 2020	3.456.000,00
4.	Dharma Wanita Kab Kebumen	030/2326	16 Sept'20 - 15 Sept'21	12	8	3.780.000,00	30 Nov 2020	2.520.000,00
5.	Bank Jateng	030/1470	1 Juli'18 - 30 Juni'23	60	30	32.670.000,00	5 Nov'18	16.335.000,00
6.	Bank Jateng	030/1192.1	1 April'20 - 31 Maret'25	60	51	33.264.000,00	4 Juni 2020	28.274.400,00
							JUMLAH	**57.497.400,00**

Pendapatan diterima dimuka pada Kecamatan Kebumen, Karanganyar dan Gombong berasal dari pendapatan sewa tanah eks bengkok kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Kecamatan

No	OPD	Tgl SK Perjanjian	Jangka waktu	Pendapatan Sewa	Masa Manfaat	Sisa Masa Manfaat	Pendapatan Diterima Dimuka
1.	Kecamatan Karanganyar		1 tahun	403.823.400,00	12	6	201.911.700,00
2.	Kecamatan Gombong	17 Juni 2020	1 tahun	271.166.000,00	12	6	135.583.000,00
3.	Kecamatan Kebumen	1 Juli 2020	1 tahun	180.661.812,00	12	6	90.330.906,00
						Jumlah	**427.825.606,00**

Pendapatan diterima dimuka pada BPKAD Kab Kebumen berasal dari pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk sewa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKAD Kebumen

No	Nama Pihak Ketiga	No Perjanjian	Jangka Waktu	Masa Manfaat	Sisa Masa Manfaat	Nilai Sewa	Jml Pendapatan Diterima Di muka
1	PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk	050/040/ I/2018	1/10/2017 s/d 30/09/2022	60	21	131.400.000,00	45.990.000
2	Nur zubaidi	031/0377,1/02/2018	19/02/2018 s/d 19/02/2021	36	2	10.800.000,00	600.000
3	BPD Jateng Cab.Kebumen	0038/HT.01.02/008/2018	1/03/2018 s/d 28/02/2021	36	2	11.497.500,00	638.750
4	H.S Yudiantoro	030/1512 dan 014/HT.01.06/008/	29/05/2019 s/d 30/05/2022	36	17	12.000.000,00	5.666.667
5	Parmono	030/1512 dan 014/HT.01.06/008/	16/05/2019 sd 17/05/2022	36	17	48.000.000,00	22.666.667
6	Margono A.Md	030/3288/TAHUN 2018 dan 001/61/AL Amin/12.22/2018	01/01/2019 sd 31/12/2023 (pembayaran per tahun)	12	12	16.537.500,00	16.537.500
7	Murdiyati	030/3287/TAHUN 2018	01/01/2019 sd 31/12/2021	36	12	9.855.000,00	3.285.000
8	Sutrisno, SE	030/3290 Tahun 2018	01/01/2019 sd 31/12/2023	48	24	192.172.500,00	96.086.250
9	Drs.H. Sholeh Said	030/032 Tahun 2019	02/06/2019 sd 01/06/2024	60	42	13.736.475,00	9.615.533
10	H.Nur Zubaidi	031/03771/02/2018 dan	19/02/2018 sd 18/02/2021	36	2	10.800.000,00	600.000
11	Puji Hartono	028/2407	01/01/2019 sd 31/12/2023	60	36	35.000.000,00	21.000.000
12	PD. Apotek Lukulo	038/PKS/AP.L/ /2020	1/01/ 2020 s/d 31/12/2024	60	48	19.710.000,00	15.768.000
13	Sewa Rumah ATM Bank Jateng	o30/1833/Tahun 2020 dan 2295/ht.01.06/008/2020	15/06/020 sd 14/06/2023	36	30	12.000.000,00	10.000.000
14	Sewa Rumah ATM Bank Jateng		15/06/020 sd 14/06/2023	36	30	12.000.000,00	10.000.000
15	Sewa Rumah ATM Bank Jateng		15/06/020 sd 14/06/2023	36	30	12.000.000,00	10.000.000
16	Sewa Rumah ATM Bank Jateng		15/06/020 sd 14/06/2023	36	30	12.000.000,00	10.000.000
17	Sewa Rumah ATM Bank Jateng		15/06/020 sd 14/06/2023	36	30	12.000.000,00	10.000.000
18	Sewa Rumah ATM Bank Jateng		15/06/020 sd 14/06/2023	36	30	12.000.000,00	10.000.000
19	Zein Mutaan,SE	028/1168 Tahun 2019	1/04/2020 s/d 31/03/2024	48	39	7.623.000,00	6.193.688
20	Mundiri	030/1729/ Tahun 2020	5/05/2020 s/d 4/05/2022	24	16	1.824.000,00	1.216.000
21	Lukman Hakim	031/2095	1/06/2020 s/d 31/05/2025	12	5	7.600.000,00	3.166.667
22	Jessica Faustin Poerwoko	028/2928,1/Tahun/2020	1 jan 2021 s.d 31 des 2021	12	12	8.000.000,00	8.000.000
						Jumlah	**317.030.720**

Pendapatan diterima dimuka pada Bapenda Kab Kebumen berasal dari Pajak Reklame dengan rincian sebagaimana **lampiran 30**.

5.3.2.1.3 Utang Beban

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp19.829.579.048,00	Rp13.590.043.826,00

Utang Beban merupakan kewajiban-kewajiban yang masih harus dibayar yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum ditunaikan oleh OPD, yang disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Utang Beban

Uraian	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan/	%
	(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)	
Utang Beban Pegawai	6.502.629.851,00	5.851.819.112,00	650.810.739,00	11,12
Utang Beban Barang dan Jasa	13.326.949.197,00	5.758.063.114,00	7.568.886.083,00	131,45
Utang Beban Bansos	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Beban Transfer	0,00	1.980.161.600,00	(1.980.161.600,00)	(100,00)
Jumlah	**19.829.579.048,00**	**13.590.043.826,00**	**6.239.535.222,00**	**45,91**

Utang Beban Pegawai per 31 Desember 2020 merupakan jasa pelayanan yang belum direalisasikan oleh Puskesmas dan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2020 yang belum dibayarkan.

Utang Beban Barang dan Jasa merupakan beban atas pemakaian daya dan jasa kantor dan jasa lainnya termasuk utang jasa/insentif Tenaga Kesehatan COVID-19 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Rincian Utang Beban per SKPD disajikan dalam **lampiran 31.**

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek lainnya

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp23.568.977.567,00	Rp13.310.369.182,00

Utang jangka Pendek lainnya merupakan utang jangka pendek pada RSUD Dr. Soedirman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Utang Jangka Pendek RSUD Dr. Soedirman per 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Uji Laboratorium	189.318.633,00
2.	Utang pengadaan BM Alat Kedokterna	46.416.000,00
3.	Utang Bahan Bakar Minyak	1.993.500,00
4.	Utang pengadaan Obat & BMHP	2.895.193.994,00
5.	Utang Gaji Pegawai Non PNS	799.161.380,00
6.	Utang Jasa Pelayanan	19.636.231.060,00
7.	Utang Perjalanan Dinas (rujukan)	663.000,00
	Jumlah	**23.568.977.567,00**

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp4.467.978.765.969,00	Rp4.454.310.805.714,17

Ekuitas per 31 Desember 2020 diuraikan sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)	
Ekuitas Awal			4.454.310.805.714,17
Surplus/defisit - LO			9.772.889.574,11
Dampak komulatif yang menambah ekuitas:			
1	Penyesuaian atas saldo investasi permanen per 31 Desember 2020 dengan metode	3.501.504.494,86	
2	Penyesuaian aset tetap karena reklas kode rekening	5.800.030.729,00	
3	Penambahan aset tetap karena reklas ke ekstrakompatable	1.147.933.689,00	
4	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap	32.423.897.665,00	
5	Penyesuaian atas akumulasi penyusutan rusak berat	1.679.431.785,00	
6	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap atas mapping kode sesuai Permendagri	29.495.442.813,00	
7	Penambahan karena mutasi antar SKPD	238.452.134.133,00	
8	Penambahan karena hibah dari pihak lain	12.891.874.931,00	
9	Penambahan aset tetap karena barang jasa menjadi aset	178.366.100,00	
10	Penambahan aset lainnya - DED atau aset tidak berwujud	1.896.712.323,00	
11	Penyesuaian amortisasi aset tidak berwujud	21.016.900,00	
12	Penambahan baru ditemukan atau baru dicatat	4.629.402.316,00	
13	Penambahan aset lainnya - rusak berat	22.584.148.099,00	
14	Penyesuaian aset tetap karena koreksi	1.394.996.154,00	
15	Penyesuaian atas beban pos luar biasa penanganan covid-19 (pindahan beban luar	6.823.031.533,00	
16	Penyesuaian aset tetap karena Barang Jasa menjadi Aset (Belanja BTT)	3.056.264.000,00	
17	Penyesuaian aset tetap atas mapping kode sesuai Permendagri 108	5.596.292.366.138,80	
18	Penyesuaian nilai utang jaspel	291.473.509,00	
Jumlah Dampak komulatif yang menambah ekuitas:		**5.962.560.027.312,66**	
Dampak komulatif yang mengurangi ekuitas:			
1	Pengurangan aset tetap karena usul hapus	6.889.756.765,00	
2	Pengurangan aset lainnya - rusak berat	1.653.484.037,00	
3	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap	20.657.780.792,14	
4	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap atas mapping kode sesuai Permendagri	19.206.430.646,00	
5	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap karena kapitalisasi	566.217.483,00	
6	Penyesuaian akumulasi penyusutan rusak berat	9.315.956.715,00	
7	Koreksi kurang aset tetap karena dobel catat	572.400.000,00	
8	Koreksi kurang aset tetap karena mutasi antar SKPD	238.384.739.833,00	
9	Pengurangan aset karena dihibahkan ke pihak lain	8.746.890.892,00	
10	Penyesuaian beban luar biasa yang di pindahkan ke BPBD (BTT Covid-19)	9.879.295.533,00	
11	Penyesuaian aset tetap karena koreksi	18.450.921.940,00	
12	Penyesuaian aset tetap karena reklas kode rekening	11.816.496.822,00	
13	Pengurangan aset tetap karena reklas ke ekstrakompatable	1.687.963.812,00	
14	Penyesuaian karena Kapitalisasi Aset Tetap	864.998.652,00	
15	Penyesuaian nilai piutang	1.099.441.764,00	
16	Penyesuaian aset tetap atas mapping kode sesuai Permendagri 108	5.608.872.180.945,80	
Jumlah Dampak komulatif yang mengurangi ekuitas:		**5.958.664.956.631,94**	
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya (Koreksi Tambah – Koreksi Kurang)			**3.895.070.680,72**
Ekuitas Akhir			**4.467.978.765.969,00**

Dengan demikian bahwa kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen selama tahun 2020 bertambah sebesar Rp13.667.960.254,83 sehingga total kekayaan bersih per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.467.978.765.969,00.

5.4 Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan – LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp2.374.540.345.445,63	Rp2.414.979.239.178,82

Pendapatan - LO Kabupaten Kebumen yang tersaji dalam Laporan Operasional adalah Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Pendapatan – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah - LO	412.847.732.520,63	525.341.339.804,82	(112.493.607.284,19)	(21,41)
Pendapatan Transfer - LO	1.820.566.476.365,00	1.882.428.936.333,00	(61.862.459.968,00)	(3,29)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	141.126.136.560,00	7.208.963.041,00	133.917.173.519,00	1.857,65
Jumlah	**2.374.540.345.445,63**	**2.414.979.239.178,82**	**(40.438.893.733,19)**	**(1,67)**

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2020 turun sebesar Rp40.438.893.733,19 atau sebesar 1,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kabupaten Kebumen sebagaimana tergambar pada diagram berikut.

Grafik Komposisi Pendapatan – LO Tahun 2020

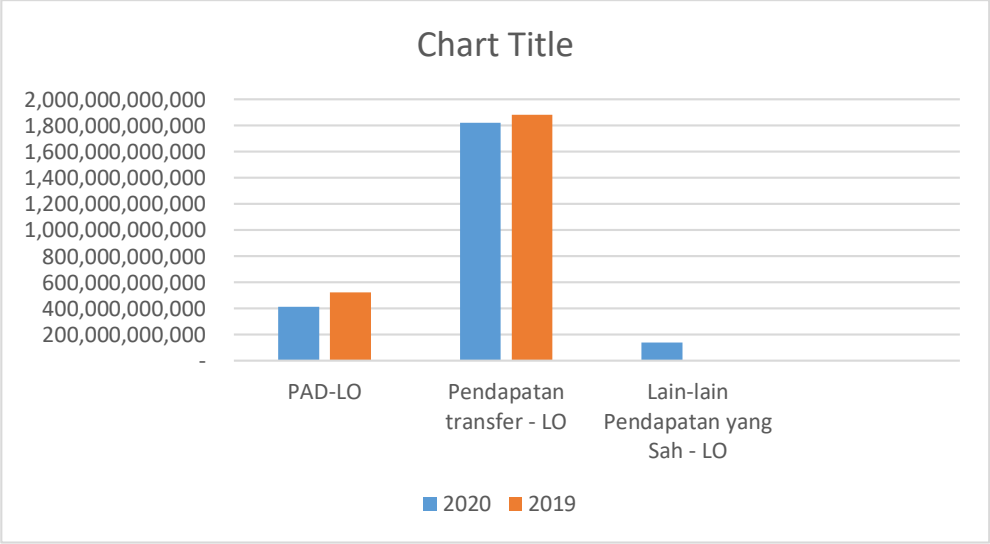

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp412.847.732.520,63	Rp525.341.339.804,82

Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
Pajak Daerah - LO	102.244.578.080,00	103.793.194.372,00	(1.548.616.292,00)	(1,49)
Retribusi Daerah - LO	23.070.297.163,83	27.806.000.986,34	(4.735.703.822,51)	(17,03)
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan - LO	12.515.457.668,00	6.297.570.767,00	6.217.886.901,00	98,73
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	275.017.399.608,80	387.444.573.679,48	(112.427.174.070,68)	(29,02)
Jumlah	**412.847.732.520,63**	**525.341.339.804,82**	**(112.493.607.284,19)**	**(21,41)**

Perbandingan per jenis Pendapatan Asli Daerah - LO dari tahun sebelumnya tergambar pada grafik berikut.

Grafik Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2020

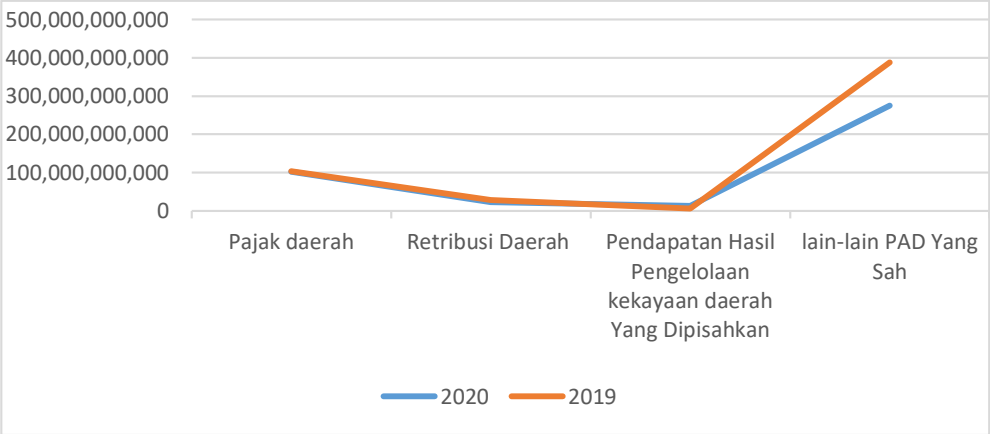

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp102.244.578.080,00	Rp103.793.194.372,00

Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2020 terdiri dari.

Tabel Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Hotel – LO	1.170.134.383,00	1.879.430.319,00	(709.295.936,00)	(37,74)
Pajak Restoran – LO	6.779.091.367,00	7.873.081.522,00	(1.093.990.155,00)	(13,90)
Pajak Hiburan – LO	260.934.284,00	393.741.976,00	(132.807.692,00)	(33,73)
Pajak Reklame – LO	1.182.873.365,00	1.034.656.625,00	148.216.740,00	14,33
Pajak Penerangan Jalan – LO	29.779.901.282,00	32.492.302.082,00	(2.712.400.800,00)	(8,35)
Pajak Parkir – LO	394.623.093,00	317.271.717,00	77.351.376,00	24,38
Pajak Air Tanah – LO	279.050.357,00	380.388.950,00	(101.338.593,00)	(26,64)
Pajak Sarang Burung Walet – LO	2.000.000,00	10.050.000,00	(8.050.000,00)	(80,10)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	1.639.699.529,00	5.218.036.259,00	(3.578.336.730,00)	(68,58)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan –	49.814.117.482,00	41.249.455.958,00	8.564.661.524,00	20,76
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.942.152.938,00	12.944.778.964,00	(2.002.626.026,00)	(15,47)
Jumlah	**102.244.578.080,00**	**103.793.194.372,00**	**(1.548.616.292,00)**	**(1,49)**

Pendapatan Pajak – LO dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, yang untuk tahun 2020 turun sebesar 1.548.616.292,00 atau sebesar 1,49 % dibandingkan tahun sebelumnya.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp23.070.297.163,83	Rp27.806.000.986,34

Pendapatan Retibusi Daerah – LO Tahun 2020 sebesar Rp23.070.297.163,83 terdiri dari

Tabel Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	268.178.500,00	198.745.250,00	69.433.250,00	34,94
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	1.048.462.600,00	943.905.700,00	104.556.900,00	11,08
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	1.173.995.000,00	1.172.679.000,00	1.316.000,00	0,11
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	5.456.032.200,00	4.041.803.900,00	1.414.228.300,00	34,99
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	654.714.000,00	778.312.500,00	(123.598.500,00)	(15,88)
Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO	45.276.000,00	60.984.000,00	-15708000,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	1.211.472.000,00	949.416.000,00	262.056.000,00	27,60
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	2.270.561.443,83	2.653.526.119,34	(382.964.675,51)	(14,43)
Retribusi Tempat Pelelangan – LO	2.013.456.198,00	2.127.458.032,00	(114.001.834,00)	(5,36)
Retribusi Terminal – LO	79.163.600,00	153.213.300,00	(74.049.700,00)	(48,33)
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	3.384.771.500,00	4.156.200.200,00	(771.428.700,00)	(18,56)
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	680.000,00	1.960.000,00	(1.280.000,00)	(65,31)
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	16.572.500,00	27.770.000,00	(11.197.500,00)	(40,32)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	2.874.226.800,00	7.698.989.900,00	(4.824.763.100,00)	(62,67)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	613.655.000,00	605.412.500,00	8.242.500,00	1,36
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	1.932.379.822,00	2.197.519.585,00	(265.139.763,00)	(12,07)
Retribusi Izin Trayek – LO	26.700.000,00	38.105.000,00	(11.405.000,00)	(29,93)
Jumlah	**23.070.297.163,83**	**27.806.000.986,34**	**(4.735.703.823)**	**(17,03)**

Pendapatan Retribusi Daerah – LO mengalami penurunan dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi – LO tahun sebelumnya, secara umum hal ini karena dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD

No.	OPD	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	268.178.500,00	198.745.250,00	69.433.250,00	34,94
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.360.174.122,00	2.768.041.460,00	(407.867.338,00)	(14,73)
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	764.553.500,00	511.396.000,00	253.157.500,00	49,50
4	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	98.105.000,00	113.604.000,00	(15.499.000,00)	(13,64)
5	Dinas Perhubungan	2.038.103.600,00	2.280.046.300,00	(241.942.700,00)	(10,61)
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.436.358.615,00	1.183.878.493,00	252.480.122,00	21,33
7	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata	3.456.627.900,00	8.801.799.670,00	(5.345.171.770,00)	(60,73)
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.459.802.698,00	2.414.724.832,00	45.077.866,00	1,87
9	Dinas Pertanian dan Pangan	698.570.500,00	705.142.000,00	(6.571.500,00)	(0,93)
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.991.104.700,00	8.102.101.400,00	889.003.300,00	10,97
11	Bagian Umum	99.316.600,00	199.811.000,00	(100.494.400,00)	(50,29)
12	Kecamatan Kebumen	11.892.400,00	54.391.715,00	(42.499.315,00)	(78,14)
13	Kecamatan Alian	0,00	2.422.000,00	(2.422.000,00)	(100,00)
14	Kecamatan Prembun	2.120.000,00	3.061.500,00	(941.500,00)	(30,75)
15	Kecamatan Mirit	1.117.600,00	698.000,00	419.600,00	60,11
16	Kecamatan Kutowinangun	1.214.000,00	1.889.000,00	(675.000,00)	(35,73)
17	Kecamatan Ambal	700.000,00	10.427.000,00	(9.727.000,00)	(93,29)
18	Kecamatan Buluspesantren	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(100,00)
19	Kecamatan Pejagoan	3.272.000,00	4.501.000,00	(1.229.000,00)	(27,31)
20	Kecamatan Klirong	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	(100,00)
21	Kecamatan Petanahan	1.732.200,00	906.000,00	826.200,00	91,19
22	Kecamatan Sruweng	691.000,00	1.508.000,00	(817.000,00)	(54,18)
23	Kecamatan Karanganyar	1.217.200,00	13.941.000,00	(12.723.800,00)	(91,27)
24	Kecamatan Kuwarasan	0,00	1.032.000,00	(1.032.000,00)	(100,00)
25	Kecamatan Puring	0,00	560.000,00	(560.000,00)	(100,00)
26	Kecamatan Gombong	10.980.500,00	17.754.750,00	(6.774.250,00)	(38,15)
27	Kecamatan Sempor	3.321.000,00	5.310.000,00	(1.989.000,00)	(37,46)
28	Kecamatan Buayan	197.000,00	315.000,00	(118.000,00)	(37,46)
29	Kecamatan Rowokele	0,00	257.000,00	(257.000,00)	(100,00)
30	Kecamatan Ayah	635.000,00	1.265.000,00	(630.000,00)	(49,80)
31	Kecamatan Sadang	0,00	912.400,00	(912.400,00)	(100,00)
32	Kecamatan Padureso	0,00	2.635.475,00	(2.635.475,00)	(100,00)
33	Kecamatan Bonorowo	2.028.000,00	3.025.000,00	(997.000,00)	(32,96)
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	357.083.528,83	398.198.741,34	(41.115.212,51)	(10,33)
Jumlah		**23.070.297.163,83**	**27.806.000.986,34**	**(4.735.703.822,51)**	**(17,03)**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp12.515.457.668,00	Rp6.297.570.767,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp12.515.457.668,00 yang Dipisahkan terdiri dari.

Tabel Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik	12.515.457.668,00	6.297.570.767,00	6.217.886.901,00	98,73
Jumlah	**12.515.457.668,00**	**6.297.570.767,00**	**6.217.886.901,00**	**98,73**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

No	Uraian	Jumlah (Rp
1	PD. BPR BKK Kebumen	3.731.198.675,00
2	Bank Jateng	8.782.974.368,00
3	Bank Jateng/ PBGN Laba	1.284.625,00
	Jumlah	**12.515.457.668,00**

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp275.017.399.608,80	Rp387.444.573.679,48

Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2020 sebesar Rp275.017.399.608,80 terdiri dari berikut.

Tabel Rincian Lain-lain PAD yang Sah LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak	1.342.174.490,00	781.423.477,00	560.751.013,00	71,76
Penerimaan Jasa Giro – LO	3.896.010.559,00	7.358.931.704,00	(3.462.921.145,00)	(47,06)
Pendapatan Bunga – LO	12.795.027.102,00	17.827.703.907,00	(5.032.676.805,00)	(28,23)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	65.896.066,00	261.886.277,00	(195.990.211,00)	(74,84)
Pendapatan Denda Pajak – LO	836.567.870,00	320.991.288,00	515.576.582,00	160,62
Pendapatan Denda Retribusi – LO	370.377.740,00	453.321.200,00	(82.943.460,00)	(18,30)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan –LO	43.035.400,00	0,00	43.035.400,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian –LO	821.104.559,00	1.374.233.566,00	(553.129.007,00)	(40,25)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah –	1.352.715,00	0,00	1.352.715,00	0,00
Pendapatan BLUD – LO	253.303.696.220,00	226.793.215.999,48	26.510.480.220,52	11,69
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	752.553.333,80	1.015.032.305,00	(262.478.971,20)	(25,86)
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO	748.978.554,00	933.521.985,00	(184.543.431,00)	(19,77)
Hasil dari pengelolaan dana bergulir	40.625.000,00	35.165.000,00	5.460.000,00	15,53
Dana BOS		130.289.146.971,00	(130.289.146.971,00)	(100,00)
Jumlah	**275.017.399.608,80**	**387.444.573.679,48**	**(112.427.174.070,68)**	**(29,02)**

Pendapatan BLUD – LO merupakan pendapatan dari entitas yang telah menerapkan PPK-BLUD sebagaimana berikut.

Tabel Pendapatan BLUD-LO

No.	OPD	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Puskesmas Adimulyo	1.688.776.689,00	1.582.855.525,00	105.921.164,00	6,69
2.	Puskesmas Alian	3.523.530.927,00	3.430.415.158,00	93.115.769,00	2,71
3.	Puskesmas Ambal I	2.154.446.652,00	2.131.290.168,00	23.156.484,00	1,09
4.	Puskesmas Ambal II	1.469.765.516,00	1.327.096.450,00	142.669.066,00	10,75
5.	Puskesmas Ayah I	2.348.445.193,00	2.836.605.754,00	(488.160.561,00)	(17,21)
6.	Puskesmas Ayah II	1.556.390.539,00	1.421.233.896,00	135.156.643,00	9,51
7.	Puskesmas Bonorowo	1.337.441.677,00	1.234.620.251,00	102.821.426,00	8,33
8.	Puskesmas Buayan	2.708.784.919,00	2.350.341.493,00	358.443.426,00	15,25
9.	Puskesmas Buluspesantren I	1.334.553.121,00	1.461.767.019,00	(127.213.898,00)	(8,70)
10.	Puskesmas Buluspesantren II	1.114.173.074,00	1.177.162.425,00	(62.989.351,00)	(5,35)
11.	Puskesmas Gombong I	1.673.008.114,00	1.561.439.525,00	111.568.589,00	7,15
12.	Puskesmas Gombong II	1.138.197.128,00	994.861.432,00	143.335.696,00	14,41
13.	Puskesmas Karanganyar	2.935.221.118,00	2.718.068.421,00	217.152.697,00	7,99
14.	Puskesmas Karanggayam I	2.226.397.439,00	1.950.717.337,00	275.680.102,00	14,13
15.	Puskesmas Karanggayam II	1.130.938.753,00	1.039.163.758,00	91.774.995,00	8,83
16.	Puskesmas Karangsambung	2.775.656.217,00	2.959.656.726,00	(184.000.509,00)	(6,22)
17.	Puskesmas Kebumen I	2.110.203.144,00	2.150.547.113,00	(40.343.969,00)	(1,88)
18	Puskesmas Kebumen II	2.460.878.999,00	2.113.396.004,00	347.482.995,00	16,44
19.	Puskesmas Kebumen III	1.705.983.320,00	1.598.641.339,00	107.341.981,00	6,71
20.	Puskesmas Klirong I	2.222.407.301,00	2.148.765.612,00	73.641.689,00	3,43
21.	Puskesmas Klirong II	1.362.849.589,00	1.232.908.623,00	129.940.966,00	10,54
22.	Puskesmas Kutowinangun	3.094.438.374,00	3.085.217.165,00	9.221.209,00	0,30
22.	Puskesmas Kuwarasan	2.206.952.573,00	1.952.813.490,00	254.139.083,00	13,01
23.	Puskesmas Mirit	2.849.536.499,00	2.823.652.515,00	25.883.984,00	0,92
24.	Puskesmas Padureso	1.369.533.611,00	1.230.798.368,00	138.735.243,00	11,27
25.	Puskesmas Pejagoan	3.176.769.854,00	3.264.732.996,00	(87.963.142,00)	(2,69)
26.	Puskesmas Petanahan	3.161.677.050,00	3.067.494.027,00	94.183.023,00	3,07
27.	Puskesmas Poncowarno	1.245.031.059,00	1.002.237.448,00	242.793.611,00	24,23
28.	Puskesmas Prembun	1.294.105.981,00	1.295.513.437,00	(1.407.456,00)	(0,11)
29.	Puskesmas Puring	2.397.676.685,00	2.247.574.980,00	150.101.705,00	6,68
30.	Puskesmas Rowokele	2.328.299.625,00	2.046.185.453,00	282.114.172,00	13,79
31	Puskesmas Sadang	1.511.672.728,00	1.350.928.699,00	160.744.029,00	11,90
32.	Puskesmas Sempor I	2.305.509.034,00	2.303.396.166,00	2.112.868,00	0,09
33.	Puskesmas Sempor II	1.315.333.687,00	1.099.766.467,00	215.567.220,00	19,60
34.	Puskesmas Sruweng	2.254.738.349,00	2.166.978.401,00	87.759.948,00	4,05
35.	Pengobatan Penyakit Paru	54.754.823,00	240.325.370,68	(185.570.547,68)	(77,22)
36.	RSUD dr. Sudirman	153.555.241.802,00	135.125.334.877,80	18.429.906.924,20	13,64
37.	RSUD Prembun	28.204.375.057,00	23.068.712.110,00	5.135.662.947,00	0,00
Jumlah		**253.303.696.220,00**	**226.793.215.999,48**	**26.510.480.220,52**	**11,69**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp1.820.566.476.365,00	Rp1.882.428.936.333,00

Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.820.566.476.365,00 adalah sebagai berikut.

Tabel Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.614.994.363.444,00	1.697.618.197.493,00	(82.623.834.049,00)	(4,87)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	45.243.665.000,00	34.569.662.000,00	10.674.003.000,00	0,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO	142.336.837.332,00	140.304.876.840,00	2.031.960.492,00	1,45
Bantuan Keuangan – LO	17.991.610.589,00	9.936.200.000,00	8.055.410.589,00	81,07
Jumlah	**1.820.566.476.365,00**	**1.882.428.936.333,00**	**(61.862.459.968,00)**	**(3,29)**

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan transfer LO tahun 2020 turun sebesar Rp61.862.459.968,00 atau sebesar 3.29% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan transfer terbesar tahun 2020 yakni pada Pos Transfer Pemerintah Pusat LO turun sebesar Rp82.623.834.049,00 atau sebesar 4,87%.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp1.614.994.363.444,00	Rp1.697.618.197.493,00

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2020 sebesar Rp1.614.994.363.444,00 disajikan sebagai berikut.

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak - LO	24.632.630.136,00	29.474.059.085,00	(4.841.428.949,00)	(16,43)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.282.867.172,00	1.916.090.965,00	(633.223.793,00)	(33,05)
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.197.504.293.000,00	1.279.681.428.000,00	(82.177.135.000,00)	(6,42)
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	391.574.573.136,00	386.546.619.443,00	5.027.953.693,00	1,30
Jumlah	**1.614.994.363.444,00**	**1.697.618.197.493,00**	(82.623.834.049,00)	**(4,87)**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2020 sebesar Rp24.632.630.136,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Bagi hasil PBB Sektor Pertambangan	2.511.818.420,00	6.754.904.922,00	(4.243.086.502,00)	(62,81)
Bagi Hasil PBB Sektor Perhutanan	1.410.544.622,00	2.129.552.578,00	(719.007.956,00)	(33,76)
Bagi Hasil PPH	14.217.691.487,00	12.539.192.904,00	1.678.498.583,00	13,39
Bagi hasil cukai tembakau	6.492.575.607,00	8.050.408.681,00	(1.557.833.074,00)	(19,35)
Jumlah	**24.632.630.136,00**	**29.474.059.085,00**	**(4.841.428.949,00)**	**(16,43)**

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.282.867.172,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	154.061.331,00	259.658.626,00	(105.597.295,00)	(40,67)
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO	13.058.772,00		13.058.772,00	
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi	383.553,00		383.553,00	
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	613.971.097,00	764.460.992,00	(150.489.895,00)	(19,69)
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	56.090.685,00	148.235.258,00	(92.144.573,00)	(62,16)
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	391.185.516,00	675.297.109,00	(284.111.593,00)	(42,07)
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	48.791.038,00	41.402.160,00	7.388.878,00	17,85
Bagi Hasil SDA Mineral Batubara	5.325.180,00	27.036.820,00	(21.711.640,00)	(80,30)
Jumlah	**1.282.867.172,00**	**1.916.090.965,00**	**(633.223.793,00)**	**(33,05)**

Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.197.504.293.000,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Dana Alokasi Umum	1.197.504.293.000,00	1.279.681.428.000,00	(82.177.135.000,00)	(6,42)
Jumlah	**1.197.504.293.000,00**	**1.279.681.428.000,00**	**(82.177.135.000,00)**	**(6,42)**

Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO tahun 2020 sebesar Rp391.574.573.136,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
DAK Pendidikan SD/SDLB - LO	3.854.743.000,00	5.611.536.400,00	(1.756.793.400,00)	(31,31)
DAK Pendidikan SMP - LO	1.617.537.000,00	1.136.545.000,00	480.992.000,00	42,32
SKB - LO	1.130.217.000,00	1.851.441.388,00	(721.224.388,00)	(38,95)
Perpustakaan Daerah - LO	0,00	485.127.378,00	(485.127.378,00)	(100,00)
Pelayanan Dasar - LO	11.784.850.708,00	2.171.579.947,00	9.613.270.761,00	442,69
Pelayanan Rujukan - LO	3.510.946.673,00	3.836.770.025,00	(325.823.352,00)	(8,49)
Pelayanan Kefarmasian - LO	2.806.271.583,00	3.777.355.737,00	(971.084.154,00)	(25,71)
Keluarga Berencana - LO	989.910.927,00	1.063.651.500,00	(73.740.573,00)	(6,93)
Penurunan Stunting - LO	31.240.000,00	2.491.999.300,00	(2.460.759.300,00)	(98,75)
Pengendalian Penyakit - LO	2.347.384.602,00	3.557.939.000,00	(1.210.554.398,00)	(34,02)
Penguatan Intervensi Stunting - LO	1.285.973.712,00	0,00	1.285.973.712,00	#DIV/0!
Air Minum - LO	4.538.883.000,00	3.492.258.000,00	1.046.625.000,00	29,97
Sanitasi - LO	3.412.500.000,00	6.492.000.000,00	(3.079.500.000,00)	(47,44)
Pertanian- LO	1.785.000.000,00	4.478.593.315,00	(2.693.593.315,00)	(60,14)
Kelautan dan Perikanan - LO	998.716.070,00	1.374.221.038,00	(375.504.968,00)	(27,32)
Lingkungan Hidup - LO	0,00	278.355.000,00	(278.355.000,00)	(100,00)
Pariwisata - LO	2.937.746.000,00	1.061.233.650,00	1.876.512.350,00	176,82
Jalan - LO	14.930.348.000,00	20.820.374.000,00	(5.890.026.000,00)	(28,29)
Sarpras Irigasi dan Air Minum - LO	2.337.216.000,00	3.409.482.000,00	(1.072.266.000,00)	(31,45)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	328.790.425.161,00	311.170.586.615,00	17.619.838.546,00	5,66
Bidang Perumahan dan Permukiman	2.149.398.000,00	2.972.290.000,00	(822.892.000,00)	(27,69)
Pasar - LO	0,00	4.714.371.000,00	(4.714.371.000,00)	(100,00)
Industri Kecil dan Menengah - LO	335.265.700,00	298.909.150,00	36.356.550,00	12,16
Jumlah	**391.574.573.136,00**	**386.546.619.443,00**	**5.027.953.693,00**	**1,30**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp45.243.665.000,00	Rp34.569.662.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO tahun 2020 secara rinci dapat dilihat berikut ini.

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Dana Insentif Daerah - LO	45.243.665.000,00	34.569.662.000,00	10.674.003.000,00	30,88
Jumlah	**45.243.665.000,00**	**34.569.662.000,00**	**10.674.003.000,00**	**30,88**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO tahun 2020 naik sebesar Rp10.674.003.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan ini merupakan Dana Insentif Daerah yang diterima pemerintah kabupaten Kebumen Tahun 2020.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp142.336.837.332,00	Rp140.304.876.840,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya - LO Tahun 2020 sebesar Rp142.336.837.332,00 merupakan pendapatan dari.

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Bagi hasil Pajak - LO	142.336.837.332,00	140.304.876.840,00	2.031.960.492,00	1,45
Jumlah	**142.336.837.332,00**	**140.304.876.840,00**	**2.031.960.492,00**	**1,45**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya - LO tahun 2020 naik sebesar Rp2.031.960.492,00 atau sebesar 1,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Pemerintah daerah Lainnya merupakan hak Pemerintah daerah atas Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dari Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, PBBKB, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	33.462.854.991,00	34.990.646.828,00	(1.527.791.837,00)	(4,37)
Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.407.589.057,00	24.353.225.229,00	(6.945.636.172,00)	(28,52)
Bagi Hasil dari Pajak Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.151.310.931,00	35.624.880.513,00	(5.473.569.582,00)	(15,36)
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air	276.699.601,00	322.719.905,00	(46.020.304,00)	(14,26)
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	61.038.382.752,00	45.013.404.365,00	16.024.978.387,00	35,60
Jumlah	**142.336.837.332,00**	**140.304.876.840,00**	**2.031.960.492,00**	1,45

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan – LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp17.991.610.589,00	Rp9.936.200.000,00

Pendapatan Bantuan Keuangan - LO Tahun 2020 merupakan bantuan keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen dari Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari berikut ini.

Tabel Pendapatan Bantuan Keuangan – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
TMMD	837.000.000,00	720.000.000,00	117.000.000,00	16,25
Bantuan Keuangan Pendidikan	290.000.000,00	77.000.000,00	213.000.000,00	100,00
Bantuan Sarana dan Prasarana	16.864.610.589,00	9.139.200.000,00	7.725.410.589,00	84,53
Jumlah	**17.991.610.589,00**	**9.936.200.000,00**	**8.055.410.589,00**	**81,07**

5.4.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp141.126.136.560,00	Rp7.208.963.041,00

Rincian Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah - LO				
Hibah Air Minum	0,00	4.452.000.000,00	(4.452.000.000,00)	(100,00)
Hibah Air Limbah	0,00	2.424.000.000,00	(2.424.000.000,00)	(100,00)
Hibah IPDMIP	344.043.553,00	228.963.041,00	115.080.512,00	50,26
Hibah SAIIG	1.049.600.000,00	104.000.000,00	945.600.000,00	909,23
Hibah Dana BOS	135.114.333.007,00	0,00	135.114.333.007,00	0,00
Hibah Kemendikbud	4.618.160.000,00	0,00	4.618.160.000,00	0,00
Jumlah	**141.126.136.560,00**	**7.208.963.041,00**	**133.917.173.519,00**	**1.857,65**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah LO tahun 2020 naik sebesar Rp133.917.173.519,00 atau sebesar 1.857,65% dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan Hibah dana BOS – LO tahun sebelumnya disajikan pada Kelompok Lain-lain PAD Yang Sah – LO. Dan adanya penerimaan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 sebesar Rp4.618.160.000,00 yang langsung diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar (SMPN dan SDN) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Penerimaan Hibah dari Kemendikbud - SDN

No	Sekolah Penerima	Kecamatan	Jenis Hibah		Jumlah
			Uang	Barang	
1	SDN Kemujan	Adimulyo	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
2	SDN Banyuroto	Adimulyo	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
3	SDN Tepakyang	Adimulyo	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
4	SDN 1 Ambalresmi	Ambal	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
5	SDN Sumberjati	Ambal	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
6	SDN Benerwetan	Ambal	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
7	SDN Bonorowo	Bonorowo	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
8	SDN 1 Bocor	Buluspesantren	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
9	SDN Tambakrejo	Buluspesantren	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
10	SDN 2 Mergosono	Buayan	5.435.000,00	84.165.000,00	89.600.000,00
11	SDN Pakuran	Buayan	5.435.000,00	84.165.000,00	89.600.000,00
12	SDN 1 Banyumudal	Buayan	5.435.000,00	84.165.000,00	89.600.000,00
13	SDN 1 Buayan	Buayan	5.435.000,00	84.165.000,00	89.600.000,00
14	SDN Tambakprogaten	Klirong	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
15	SDN Kaligending	Karangsambung	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
16	SDN 1 Gunungsari	Karangsambung	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
17	SDN 1 Karanggayam	Karanggayam	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
18	SDN 2 Logandu	Karanggayam	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
19	SDN Gumawang	Kuwarasan	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
20	SDN 2 Kuwarasan	Kuwarasan	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
21	SDN 2 Lembupurwo	Mirit	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
22	SDN 2 Sarwogadung	Mirit	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
23	SDN Singoyudan	Mirit	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
24	SDN 1 Munggu	Petanahan	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
25	SDN 1 Jogomertan	Petanahan	5.435.000,00	86.865.000,00	92.300.000,00
26	SDN 1 Sitiadi	Puring	5.435.000,00	86.865.000,00	92.300.000,00
27	SDN 2 Krandegan	Puring	5.435.000,00	86.865.000,00	92.300.000,00
28	SDN 1 Waluyorejo	Puring	5.435.000,00	86.865.000,00	92.300.000,00
29	SDN 2 Bumirejo	Puring	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
30	SDN 2 Kedaleman Wetan	Puring	5.435.000,00	86.865.000,00	92.300.000,00
31	SDN 4 Kedawung	Pejagoan	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
32	SDN 1 Prigi	Pejagoan	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
33	SDN Soka	Poncowarno	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
34	SDN Sidototo	Padureso	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
35	SDN 1 Kretek	Rowokele	5.435.000,00	84.165.000,00	89.600.000,00
36	SDN 1 Pucangan	Sadang	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
37	SDN 1 Jatinegoro	Sempor	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
38	SDN Pekuncen	Sempor	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
39	SDN 1 Tunjungseto	Sempor	5.435.000,00	88.250.000,00	93.685.000,00
40	SDN 3 Sidoagung	Sruweng	5.435.000,00	84.165.000,00	89.600.000,00
41	SDN 1 Giwangretno	Sruweng	5.435.000,00	84.165.000,00	89.600.000,00
42	SDN Jabres	Sruweng	5.435.000,00	84.165.000,00	89.600.000,00
43	SDN Klepusanggar	Sruweng	5.435.000,00	84.165.000,00	89.600.000,00
Jumlah			**233.705.000,00**	**3.751.060.000,00**	**3.984.765.000,00**

Tabel Rincian Penerimaan Hibah dari Kemendikbud - SDN

No.	Sekolah Penerima	Kecamatan	Jenis Hibah		Jumlah
			Uang	Barang	
1	SMPN 2 Karangsambung	Karangsambung	0,00	90.485.000,00	90.485.000,00
2	SMPN 2 Satap Alian	Alian	0,00	90.485.000,00	90.485.000,00
3	SMPN 2 Satap Poncowarno	Poncowarno	0,00	90.485.000,00	90.485.000,00
4	SMPN 3 Satap Ayah	Ayah	0,00	90.485.000,00	90.485.000,00
5	SMPN 3 Satap Karangsambung	Karangsambung	0,00	90.485.000,00	90.485.000,00
6	SMPN 4 Satap Karangsambung	Karangsambung	0,00	90.485.000,00	90.485.000,00
7	SMPN 3 Satap Sempor	Sempor	0,00	90.485.000,00	90.485.000,00
		Jumlah	**0,00**	**633.395.000,00**	**633.395.000,00**

Sedangkan Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2020 disajikan sebagaimana berikut.

Tabel Pendapatan Hibah Dana BOS - LO

NO	OPD	Jumlah
1	BOS Sekolah Dasar Negeri	97.127.709.713,00
2	BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri	37.986.623.294,00
Jumlah		135.114.333.007,00

5.4.2 Beban

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp2.349.586.425.201,52	Rp2.342.754.928.558,44

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai - LO	1.170.472.518.961,00	1.192.143.623.118,00	(21.671.104.157,00)	(1,82)
Beban Persediaan	81.804.694.190,21	82.930.983.968,15	(1.126.289.777,94)	(1,36)
Beban Jasa	385.005.690.989,00	380.655.730.383,00	4.349.960.606,00	1,14
Beban Pemeliharaan	44.337.716.290,00	55.086.254.735,00	(10.748.538.445,00)	(19,51)
Beban Perjalanan Dinas	25.802.705.996,00	47.099.396.526,00	(21.296.690.530,00)	(45,22)
Beban Hibah	122.978.836.872,00	91.027.595.845,00	31.951.241.027,00	35,10
Beban Bantuan Sosial	34.639.637.162,00	41.392.080.465,00	(6.752.443.303,00)	(16,31)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	290.793.520.472,56	280.660.730.096,29	10.132.790.376,27	3,61
Beban Penyisihan Piutang	1.474.311.168,75	3.653.789.922,00	(2.179.478.753,25)	(59,65)
Beban Transfer	192.276.793.100,00	168.104.743.500,00	24.172.049.600,00	14,38
Jumlah	**2.349.586.425.201,52**	**2.342.754.928.558,44**	**6.831.496.643,08**	**0,29**

5.4.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp1.170.472.518.961,00	Rp1.192.143.623.118,00

Beban Pegawai tahun 2020 terdiri dari.

Tabel Rincian Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan	980.693.682.618,00	1.010.538.087.365,00	(29.844.404.747,00)	(2,95)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	71.986.915.087,00	65.008.231.297,00	6.978.683.790,00	10,74
Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kdh/WKdh	17.483.700.000,00	16.942.960.000,00	540.740.000,00	3,19
Beban Insentif Pajak	274.347.446,00	5.089.915.600,00	(4.815.568.154,00)	(94,61)
Beban Insentif Retribusi	37.591.938,00	638.304.885,00	(600.712.947,00)	(94,11)
Beban Lembur	3.567.742.814,00	5.425.585.403,00	(1.857.842.589,00)	(34,24)
Beban Pegawai BLUD	25.046.053.710,00	20.932.105.704,00	4.113.948.006,00	19,65
Beban Honorarium PNS	12.094.026.450,00	19.350.749.498,00	(7.256.723.048,00)	(37,50)
Beban Honorarium Non PNS	34.817.161.527,00	32.597.880.167,00	2.219.281.360,00	6,81
Beban Pegawai BOS	24.471.297.371,00	15.619.803.199,00	8.851.494.172,00	56,67
Jumlah	**1.170.472.518.961,00**	**1.192.143.623.118,00**	**(21.671.104.157,00)**	**(1,82)**

Untuk Rincian Beban Pegawai per SKPD/Unit Kerja tahun 2020 sebagaimana terlampir pada **lampiran 32**

5.4.2.2 Beban Persediaan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp81.804.694.190,21	Rp82.930.983.968,15

Beban Persediaan tahun 2020 sebesar Rp81.804.694.190,21 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Rincian Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bahan Pakai Habis	24.375.807.750,00	19.222.745.358,00	5.153.062.392,00	26,81
Beban Persediaan Bahan/ Material	21.733.664.727,21	15.196.175.849,15	6.537.488.878,06	43,02
Beban Cetak dan Penggandaan	8.304.720.117,00	11.011.012.431,00	(2.706.292.314,00)	(24,58)
Beban Makanan dan Minuman	25.069.927.396,00	34.161.831.680,00	(9.091.904.284,00)	(26,61)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	452.284.800,00	682.236.650,00	(229.951.850,00)	(33,71)
Beban Pakaian Kerja	1.014.863.400,00	1.247.022.000,00	(232.158.600,00)	(18,62)
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	234.407.500,00	510.998.000,00	(276.590.500,00)	(54,13)
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	619.018.500,00	898962000,00	(279.943.500,00)	100,00
Jumlah	**81.804.694.190,21**	**82.930.983.968,15**	**(1.126.289.777,94)**	**(1,36)**

Untuk Rincian Beban Persediaan per SKPD/Unit Kerja tahun 2020 sebagaimana terlampir pada **lampiran 33**

5.4.2.3 Beban Jasa

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp385.005.690.989,00	Rp380.655.730.383,00

Beban Jasa tahun 2020 sebesar Rp385.005.690.989,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Rincian Beban Jasa

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	57.842.464.609,00	65.971.205.453,00	(8.128.740.844,00)	(12,32)
Beban Premi Asuransi	16.146.192.175,00	47.416.760,00	16.098.775.415,00	33.951,66
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	577.372.178,00	1.701.123.067,00	(1.123.750.889,00)	(66,06)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	318.476.381,00	1.455.610.724,00	(1.137.134.343,00)	(78,12)
Beban Sewa Alat Berat	183.555.000,00	195.427.500,00	(11.872.500,00)	(6,08)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	604.304.900,00	1.848.190.809,00	(1.243.885.909,00)	(67,30)
Beban Jasa Konsultasi	5.715.305.500,00	5.615.784.500,00	99.521.000,00	1,77
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	20.500.000,00	35.500.000,00	(15.000.000,00)	(42,25)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.299.009.354,00	8.256.842.863,00	(5.957.833.509,00)	(72,16)
Beban Barang Dana BOS	72.714.779.407,00	78.552.809.463,00	(5.838.030.056,00)	(7,43)
Beban Jasa Pihak Ketiga	14.195.714.023,00	13.005.080.431,00	1.190.633.592,00	9,16
Beban Barang Dan Jasa BLUD	184.543.971.260,00	178.083.638.213,00	6.460.333.047,00	3,63
Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	893.000.000,00	1.328.025.000,00	(435.025.000,00)	(32,76)
Beban Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.951.046.202,00	24.559.075.600,00	4.391.970.602,00	17,88
Jumlah	**385.005.690.989,00**	**380.655.730.383,00**	**4.349.960.606,00**	**1,14**

Untuk Rincian Beban Jasa per SKPD/Unit Kerja tahun 2020 sebagaimana terlampir pada **lampiran 34**

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp44.337.716.290,00	Rp55.086.254.735,00

Beban Pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp44.337.716.290,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Rincian Beban Pemeliharaan

Beban	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	9.567.872.655,00	10.573.881.563,00	(1.006.008.908,00)	(9,51)
Beban Pemeliharaan	34.769.843.635,00	44.512.373.172,00	(9.742.529.537,00)	(21,89)
Jumlah	**44.337.716.290,00**	**55.086.254.735,00**	**(10.748.538.445,00)**	**(19,51)**

Untuk Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD/Unit Kerja tahun 2020 sebagaimana terlampir pada **lampiran 35 .**

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp25.802.705.996,00	Rp47.099.396.526,00

Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 sebesar Rp25.802.705.996,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas

Beban	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	25.802.705.996,00	47.099.396.526,00	(21.296.690.530,00)	(45,22)
Jumlah	**25.802.705.996,00**	**47.099.396.526,00**	**(21.296.690.530,00)**	**(45,22)**

Untuk Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD/Unit Kerja tahun 2020 sebagaimana terlampir pada **lampiran 36 .**

5.4.2.6 Beban Bunga

Tahun 2020	Tahun 2019
0,00	0,00

Tahun Anggaran 2020 tidak ada beban bunga.

5.4.2.7 Beban Subsidi

Tahun 2020	Tahun 2019
0,00	0,00

Tahun Anggaran 2020 tidak ada beban subsidi.

5.4.2.8 Beban Hibah

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp122.978.836.872,00	Rp91.027.595.845,00

Beban Hibah secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Hibah

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hibah Barang kepada Pemerintah	150.000.000,00	807.000.000,00	(657.000.000,00)	100,00
Hibah kepada Kelompok Masyarakat	42.266.203.135,00	59.928.559.845,00	(17.662.356.710,00)	(29,47)
Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	80.562.633.737,00	0,00	80.562.633.737,00	100,00
Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	0,00	1.612.268.000,00	(1.612.268.000,00)	100,00
Hibah kepada Sekolah Swasta	0,00	25.629.768.000,00	(25.629.768.000,00)	(100,00)
Hibah kepada Lembaga Keagamaan	0,00	3.050.000.000,00	(3.050.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	**122.978.836.872,00**	**91.027.595.845,00**	**31.951.241.027,00**	**35,10**

Beban Hibah Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban Hibah–Kepada Pemerintah senilai Rp150.000.000,00 merupakan realisasi hibah kepada Polres dan KODIM 0709 untuk penanganan COVID-19 yang direalisasikan melalui Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) masing-masing sebesar Rp75.000.000,00.

b. Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat tahun 2020 sebesar Rp42.266.203.135,00 dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Hibah kepada Kelompok Kemasyarakatan per SKPD

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	2.340.943.650,00
2	DPU-PR	3.390.699.100,00
3	Disperkim-LH	99.844.200,00
4	Disporaw isata	297.990.600,00
5	Dinlutkan	6.710.396.695,00
6	Distapang	28.286.045.490,00
7	Disperindag	335.265.700,00
8	Kel. Panjatan	91.800.200,00
9	Kel. Karangany ar	48.294.000,00
10	kel. Gombong	94.712.600,00
11	Kel. Wonokriy o	13.278.200,00
12	Kec. Sadang	6.932.700,00
13	BPKAD	550.000.000,00
	Jumlah	**42.266.203.135,00**

Untuk Rincian Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat per SKPD/Unit Kerja tahun 2020 sebagaimana terlampir pada **lampiran 37.**

c. Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Kemasyarakatan tahun 2020 sebesar Rp80.562.633.737,00 dilaksanakan oleh SKPD dengan rincian sebagai sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Hibah kepada Badan.Lembaga/Organisasi Swasta Kemasyarakatan

OPD Pengelola	Uraian Hibah	Realisasi
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan		
Kesbangpol	Belanja Hibah KPU Kebumen	44.061.371.000,00
	Belanja Hibah Bawaslu Kebumen	12.266.525.000,00
	Jumlah	**56.327.896.000,00**
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta		
Disporawisata	Hibah kepada KONI	888.145.737,00
Disporawisata	Hibah kepada NPC	100.000.000,00
Disporawisata	Hibah kepada KNPI	100.000.000,00
Dinsos PPKB	Hibah kepada DHC BPK 45 Kebumen	25.000.000,00
Bagian Kesra	Hibah kepada BAZNAS	100.000.000,00
	Jumlah	**1.213.145.737,00**
Belanja Hibah kepada Sekolah Swasta		
Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD	327.992.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	18.556.800.000,00
	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket A	39.000.000,00
	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket B	258.000.000,00
	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket C	1.324.800.000,00
	Jumlah	**20.506.592.000,00**
Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan		
Bagian Kesra	Belanja Hibah kepada Gereja	50.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Madin	72.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Masjid	1.400.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Mushola	768.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren	105.000.000,00
	Belanja Hibah kepada TPQ	120.000.000,00
	Jumlah	**2.515.000.000,00**
TOTAL		**80.562.633.737,00**

5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp34.639.637.162,00	Rp41.392.080.465,00

Beban Bantuan Sosial secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bansos kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	3.105.500.000,00	3.101.120.000,00	4.380.000,00	0,14
Beban Bansos kepada Masyarakat	31.534.137.162,00	38.290.960.465,00	(6.756.823.303,00)	(17,65)
Jumlah	**34.639.637.162,00**	**41.392.080.465,00**	**(6.752.443.303,00)**	**(16,31)**

a. Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp3.105.500.000,00 merupakan beban atas beasiswa kurang mampu yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial kepada Organaisasi Sosial Kemasyarakatan

No.	Uraian Bansos	Nilai (Rp)
1.	Beban Bantuan Beasiswa Kurang Mampu SD/MI	1.711.200.000,00
2.	Beban Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SMP/MTS	1.394.300.000,00
Jumlah		**3.105.500.000,00**

b. Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebesar Rp31.534.137.162,00 disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Bansos kepada Masyarakat Miskin	30.955.137.162,00
2.	Beban Bansos kepada Korban bencana Alam	414.000.000,00
3.	Beban bansos Yang Tidak direncanakan	165.000.000,00
	Jumlah	**31.534.137.162,00**

Rincian Beban Bansos Kepada Masyarakat per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat per SKPD

No	Uraian	SKPD	Jumlah
1	Beban Bansos kepada Masyarakat Miskin	BPBD	325.000.000,00
2		Dinsos-PPKB	406.444.770,00
3		Disnaker KUKM	804.210.760,00
4		Dinlutkan	1.910.660.932,00
5		Distapang	59.062.500,00
6		Kel.Tamanwinangun	14.840.000,00
7		Kel. Karanganyar	51.972.600,00
8		Kel. Gombong	125.247.800,00
9		Kel. Wonokriyo	108.947.800,00
10		PPKD	27.148.750.000,00
11	Beban Banos kepada Korban Bencana Alam	PPKD	414.000.000,00
12	Beban Bansos Yang Tidak Direncanakan	PPKD	165.000.000,00
		Jumlah	**31.534.137.162,00**

Untuk Rincian Beban Bansos Kepada Masyarakat per SKPD/Unit Kerja tahun 2020 sebagaimana terlampir pada **lampiran 38.**

5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp290.793.520.472,56	Rp280.660.730.096,29

Beban penyusutan dan amortisasi merupakan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset lainnya berupa *software* dan DED yang ada di OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan	102.679.494.118,00	96.429.637.736,00	6.249.856.382,00	6,48
Beban Penyusutan Gedung dan	29.904.220.546,00	30.035.989.778,00	(131.769.232,00)	(0,44)
Beban Penyusutan Jalan. Irigasi dan	156.809.047.823,26	152.868.502.257,49	3.940.545.565,77	2,58
Beban Amortisasi Aset Tdak Berwujud	1.400.757.985,30	1.326.600.324,80	74.157.660,50	5,59
Jumlah	**290.793.520.472,56**	**280.660.730.096,29**	**10.132.790.376,27**	**3,61**

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per OPD/Unit Kerja tahun 2020 sebagaimana terlampir pada **lampiran 39.**

5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp1.474.311.168,75	Rp3.653.789.922,00

Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 sebesar Rp1.474.311.168,75 merupakan beban penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terdapat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	1.308.075.867,75	3.406.689.424,00	(2.098.613.556,25)	(61,60)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	166.235.301,00	247.100.498,00	(80.865.197,00)	(32,73)
Jumlah	**1.474.311.168,75**	**3.653.789.922,00**	**(2.179.478.753,25)**	**(59,65)**

Rincian Beban Penyisihan Piutang per OPD/Unit Kerja tahun 2020 terdapat pada berikut.

Tabel Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD

OPD	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
RSUD dr. Soedirman	166.235.301,00	247.100.498,00	(80.865.197,00)	(32,73)
RSUD Prembun	22.858.931,00	43.455.585,00	(20.596.654,00)	(47,40)
Dinas Perhubungan	94.620.500,00	(28.200.000,00)	122.820.500,00	(435,53)
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata	126.784.180,00	89.210.988,00	37.573.192,00	42,12
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.693.800,00	14.609.550,00	(3.915.750,00)	100,00
PPKD (Bendahara Umum Daerah)		(1.040.000,00)	1.040.000,00	(100,00)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.053.118.456,75	3.288.653.301,00	(2.235.534.844,25)	(67,98)
Jumlah	**1.474.311.168,75**	**3.653.789.922,00**	**(2.179.478.753,25)**	**(59,65)**

5.4.2.12 Beban Transfer

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp192.276.793.100,00	Rp168.104.743.500,00

Rincian Beban Transfer untuk tahun 2020 terdiri dari berikut ini.

Tabel Rincian Beban Transfer

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	9.657.463.900,00	9.981.797.400,00	(324.333.500,00)	(3,25)
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.870.292.800,00	5.520.713.100,00	(1.650.420.300,00)	(29,90)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	176.684.160.400,00	151.240.308.000,00	25.443.852.400,00	16,82
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	2.064.876.000	-	2.064.876.000,00	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.361.925.000,00	(1.361.925.000,00)	(100,00)
Jumlah	**192.276.793.100,00**	**168.104.743.500,00**	**24.172.049.600,00**	**14,38**

Beban Transfer tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp24.172.049.600,00 atau 14,38% bila dibandingkan dengan transfer tahun sebelumnya.

Dari Pendapatan-LO sebesar Rp2.374.540.345.445,63 dan Beban sebesar Rp2.349.586.425.201,52 dihasilkan surplus dari operasi sebesar Rp24.953.920.244,11.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Tahun 2020	Tahun 2019
(Rp14.871.500.954,00)	(Rp15.409.101.888,00)

Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan yang bersumber dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp14.871.500.954,00) adalah sebagai berikut.

Tabel Defisit Kegiatan Non Operasional

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	1.210.699.490,00	653.873.477,00	556.826.013,00	85,16
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	16.082.200.444,00	16.062.975.365,00	19.225.079,00	0,12
Jumlah	**(14.871.500.954,00)**	**(15.409.101.888,00)**	**537.600.934,00**	**(3,49)**

Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO 2020 sebesar Rp1.210.699.490,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	974.815.589,00	292.590.478,00	682.225.111,00	233,17
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	235.883.901,00	361.282.999,00	(125.399.098,00)	(34,71)
Jumlah	**1.210.699.490,00**	**653.873.477,00**	**556.826.013,00**	**85,16**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO 2020 sebesar Rp16.082.200.444,00 berasal dari penghapusan aset tetap kondisi rusak berat, yang secara rinci sebagai berikut:

Tabel Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

No	Uraian	No SK Hapus	Jumlah
1	SK Bupati tentang Penghapusan BMD Karena Hibah	028/263 Tahun 2020	468.990.000,00
2	SK Sekda tentang Penghapusan BMD Badan, Dinas, Bagian dan Sekwan	028/235/KEP/2020	3.114.837.695,00
3	SK Sekda tentang Penghapusan Kendaraan Dinas	028/240/KEP/2020	1.508.652.653,00
4	SK Sekda tentang Penghapusan BMD Bagian Umum, Dinkes, Puskesmas & RSUD	028/241/KEP/2020	3.033.683.675,00
5	SK Sekda tentang Penghapusan BMD SMP, Kecamatan & Kelurahan	028/242/KEP/2020	1.310.208.802,00
6	SK Sekda tentang Penghapusan BMD Disdik, TK Pembina Negeri dan Korwil Biddik	028/246/KEP/2020	2.614.604.684,00
7	SK Sekda tentang Penghapusan BMD Korwil Biddik	028/247/KEP/2020	2.705.157.373,00
8	SK Bupati tentang Penghapusan BMD Karena Hibah	028/491 Tahun 2020	1.326.065.562,00
Jumlah			**16.082.200.444,00**

5.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2020 yang mempunyai karakteristik kejadian tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	309.529.716,00	570.000,00	308.959.716,00	54.203,46
Jumlah	**(309.529.716,00)**	**(570.000,00)**	**(308.959.716,00)**	**54.203,46**

5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa – LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp0,00	Rp0,00

Tahun Anggaran 2019 tidak ada pendapatan luar biasa.

5.4.4.2 Beban Luar Biasa

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp309.529.716,00	Rp570.000,00

Beban Luar Biasa 2020 sebesar Rp309.529.716,00 merupakan beban atas pengembalian kelebihan pendapatan Retribusi IMB TA 2019 an. Elsa Aspiana Larasati, Desa Ambalkebrek Kec.Ambal, sebesar Rp1.181.000,00 yang dikeluarkan dengan SP2D No.00111/BTL-NON-GJ/BLJ.TT.DUGA/2020 dan pengembalian sisa Dana Desa tahun 2019 yang berada di RKUD sebesar Rp308.348.716,00 yang dikeluarkan dengan SP2D No.00851/BTL-NON-GJ/BLJ.TT.DUGA/2020.

Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp309.529.716,00. Dengan demikian, surplus/defisit-LO yang dihasilkan selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.772.889.574,11.

5.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menggambarkan kenaikan atau penurunan ekuitas pada periode tahun pelaporan.

Jumlah Ekuitas awal Tahun 2020 sebesar Rp4.454.310.805.714,17 merupakan ekuitas per 31 Desember 2019.

Surplus/Defisit LO sebesar Rp9.772.889.574,11 merupakan Surplus-LO tahun 2020 yang dijelaskan pada Laporan Operasional tahun 2020.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2020 sebesar Rp3.895.070.680,72 merupakan koreksi ekuitas lainnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Koreksi Ekuitas Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Koreksi Tambah	
1	Penyesuaian atas saldo investasi permanen per 31 Desember 2020 dengan metode	3.501.504.494,86
2	Penyesuaian aset tetap karena reklas kode rekening	5.800.030.729,00
3	Penambahan aset tetap karena reklas ke ekstrakompatable	1.147.933.689,00
4	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap	32.423.897.665,00
5	Penyesuaian atas akumulasi penyusutan rusak berat	1.679.431.785,00
6	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap atas mapping kode sesuai Permendagri	29.495.442.813,00
7	Penambahan karena mutasi antar SKPD	238.452.134.133,00
8	Penambahan karena hibah dari pihak lain	12.891.874.931,00
9	Penambahan aset tetap karena barang jasa menjadi aset	178.366.100,00
10	Penambahan aset lainnya - DED atau aset tidak berwujud	1.896.712.323,00
11	Penyesuaian amortisasi aset tidak berwujud	21.016.900,00
12	Penambahan baru ditemukan atau baru dicatat	4.629.402.316,00
13	Penambahan aset lainnya - rusak berat	22.584.148.099,00
14	Penyesuaian aset tetap karena koreksi	1.394.996.154,00
15	Penyesuaian atas beban pos luar biasa penanganan covid-19 (pindahan beban luar	6.823.031.533,00
16	Penyesuaian aset tetap karena Barang Jasa menjadi Aset (Belanja BTT)	3.056.264.000,00
17	Penyesuaian aset tetap atas mapping kode sesuai Permendagri 108	5.596.292.366.138,80
18	Penyesuaian nilai utang jaspel	291.473.509,00
Jumlah Koreksi Tambah		**5.962.560.027.312,66**
	Koreksi Kurang	
1	Pengurangan aset tetap karena usul hapus	6.889.756.765,00
2	Pengurangan aset lainnya - rusak berat	1.653.484.037,00
3	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap	20.657.780.792,14
4	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap atas mapping kode sesuai Permendagri	19.206.430.646,00
5	Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap karena kapitalisasi	566.217.483,00
6	Penyesuaian akumulasi penyusutan rusak berat	9.315.956.715,00
7	Koreksi kurang aset tetap karena dobel catat	572.400.000,00
8	Koreksi kurang aset tetap karena mutasi antar SKPD	238.384.739.833,00
9	Pengurangan aset karena dihibahkan ke pihak lain	8.746.890.892,00
10	Penyesuaian beban luar biasa yang di pindahkan ke BPBD (BTT Covid-19)	9.879.295.533,00
11	Penyesuaian aset tetap karena koreksi	18.450.921.940,00
12	Penyesuaian aset tetap karena reklas kode rekening	11.816.496.822,00
13	Pengurangan aset tetap karena reklas ke ekstrakompatable	1.687.963.812,00
14	Penyesuaian karena Kapitalisasi Aset Tetap	864.998.652,00
15	Penyesuaian nilai piutang	1.099.441.764,00
16	Penyesuaian aset tetap atas mapping kode sesuai Permendagri 108	5.608.872.180.945,80
Jumlah Koreksi Kurang		**5.958.664.956.631,94**
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya (Koreksi Tambah – Koreksi Kurang)		**3.895.070.680,72**

Ekuitas Akhir sebesar Rp4.467.978.765.969,00 menunjukan bahwa kekayaan bersih yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2020 sebesar tersebut.

5.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2020 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

Saldo Awal Kas atau saldo kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp202.798.793.055,18. Terjadi kenaikan saldo kas selama tahun 2020 sebesar Rp17.072.726.959,80 sehingga saldo akhir Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp219.871.520.014,98 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Kas per 31 Desember 2020

Rincian Kas	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/(penurunan) (Rp)
Kas di Kas Daerah	142.972.001.462,00	150.395.584.664,00	(7.423.583.202,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	206.799,00	13.592.215,00	(13.385.416,00)
Kas di Bendahara Peneimaan	34.633.880,00	54.699.800,00	(20.065.920,00)
Kas di BLUD	71.363.739.445,98	43.835.358.019,98	27.528.381.426,00
Kas Lainnya - BOS	5.500.938.428,00	8.499.558.356,20	(2.998.619.928,20)
Jumlah	**219.871.520.014,98**	**202.798.793.055,18**	**17.072.726.959,80**

Kenaikan saldo kas selama tahun 2020 sebesar Rp17.072.726.959,80 berasal dari:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	312.844.636.176,80
2.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(287.590.349.528,00)
3.	Arus kas bersih aktivitas pendanaan	(8.085.000.000,00)
4.	Arus kas bersih aktivitas Transitoris	(96.559.689,00)
	Jumlah	**17.072.726.959,80**

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi diikhtisarkan sebagai berikut.

Tabel Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	2.761.776.315.138,80	2.817.841.110.063,68
Arus Kas Keluar	2.448.931.678.962,00	2.443.708.650.599,00
Arus Kas Netto Aktivitas operasi	**312.844.636.176,80**	**374.132.459.464,68**

5.6.1.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Arus kas masuk aktivitas operasi terdiri dari :

Tabel Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	100.877.584.517,00	110.614.568.810,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	22.068.306.403,00	27.141.726.792,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.727.758.649,00	14.210.376.188,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	263.141.614.724,80	256.542.888.062,68
5.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.624.225.405.094,00	1.688.387.155.843,00
6.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	450.269.534.000,00	429.981.020.600,00
7.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	130.966.524.602,00	143.529.063.756,00
8.	Bantuan Keuangan	17.991.610.589,00	9.936.200.000,00
9.	Pendapatan Hibah	136.507.976.560,00	137.498.110.012,00
Jumlah		**2.761.776.315.138,80**	**2.817.841.110.063,68**

Arus Kas Masuk sebesar Rp2.761.776.315.138,80 tersebut termasuk pendapatan yang diterima Badan Layanan Umum Daerah dan pendapatan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima langsung Sekolah (SMP dan SD Negeri) pada tahun anggaran 2020.

Pendapatan dari Badan Layanan Umum dirinci sebagai berikut.

Tabel Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	RSUD Dr. Soedirman	139.615.424.048,00
2.	RSUD Prembun	30.353.850.912,00
3.	Puskesmas dan UP3	71.804.408.157,00
	Jumlah	**241.773.683.117,00**

Sedangkan pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima langsung melalui rekening Sekolah adalah sebesar Rp135.114.333.007,00.

5.6.1.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Arus Kas keluar dari aktivitas operasi terdiri atas berikut.

Tabel Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.169.696.600.650,00	1.186.788.783.406,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	512.619.955.329,00	561.475.416.983,00
3.	Belanja Hibah	122.828.836.872,00	91.027.595.845,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	34.314.637.162,00	41.392.080.465,00
5.	Belanja Tak Terduga	10.188.825.249,00	570.000,00
6.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.657.463.900,00	9.981.797.400,00
7.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.870.292.800,00	5.520.713.100,00
8.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	0,00	0,00
9.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	583.690.191.000,00	546.159.768.400,00
10.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.064.876.000,00	1.361.925.000,00
Jumlah		**2.448.931.678.962,00**	**2.443.708.650.599,00**

Arus kas keluar dari Aktivitas operasi sebesar Rp2.448.931.678.962,00 tersebut sudah termasuk belanja operasi pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan UPTD Puskesmas/UP3 dan belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Belanja BLUD Tahun 2020

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Belanja Pegawai BLUD	25.059.731.710,00
2.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	168.816.840.592,00
Jumlah		**193.876.572.302,00**

Sedangkan belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang dilaporkan oleh Satuan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel Belanja Operasi BOS Tahun 2019

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Belanja Pegawai BOS	24.471.297.371,00
2.	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.714.779.407,00
Jumlah		**97.186.076.778,00**

5.6.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-keuangan lainnya. Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berkurang sebesar Rp287.590.349.528,00.

Tabel Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	1.210.699.490,00	653.873.477,00
Arus Kas Keluar	288.801.049.018,00	365.840.794.028,00
Arus Kas Netto Aktivitas Investasi	**(287.590.349.528,00)**	**(365.186.920.551,00)**

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi berkurang sebesar Rp287.590.349.528,00 menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 dari aktivitas investasi mengurangi saldo kas sebesar Rp287.590.349.528,00.

5.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp1.210.699.490,00 merupakan hasil penjualan Barang Milik Daerah yang sudah dihapus dari daftar barang inventaris dari Peralatan Mesin, Bangunan Gedung dan Aset Tetap Lainnya, masing-masing sebagai berikut.

Tabel Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Tahun 2020

No.	Aktivitas Investasi	Nilai (Rp)
1.	Hasil penjualan Peralatan/Mesin	974.815.589,00
2.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	235.883.901,00
3.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00
Jumlah		**1.210.699.490,00**

5.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus kas keluar dari aktivitas investasi merupakan total belanja modal Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp288.801.049.018,00 termasuk didalamnya belanja modal pada Badan Layanan Umum Daerah dan belanja modal yang bersumber dana Bantuan Operasional Sekolah. Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi dirinci sebagai berikut.

Tabel Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Modal Tanah	8.217.772.363,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.087.259.542,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.302.380.801,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	136.180.943.682,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.012.692.630,00
6.	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00
	Jumlah	**288.801.049.018,00**

Arus kas keluar aktivitas investasi dari Belanja Modal yang bersumber Dana Badan Layanan Umum Daerah dirinci sebagai berikut.

Tabel Rincian Belanja Modal BLUD Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Modal Tanah	610.704.765,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.617.063.565,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.173.800,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	4.000.000,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.724.000,00
6.	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	-
	Jumlah	**20.375.666.130,00**

Sedangkan arus kas keluar investasi dari Belanja Modal yang bersumber dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilaporkan Satuan Pendidikan dirinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Belanja Modal Dana BOS Tahun 2020

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	28.899.428.445,00
2.	Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS	11.908.038.630,00
	Jumlah	40.807.467.075,00

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan berkurang sebesar Rp8.085.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pembiayaan	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	1.465.000.000,00	1.500.000.000,00
Arus Kas Keluar	9.550.000.000,00	9.470.000.000,00
Arus Kas Netto Aktivitas pendanaan	**(8.085.000.000,00)**	**(7.970.000.000,00)**

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan berkurang sebesar Rp8.085.000.000,00 menunjukkan bahwa selama tahun 2020 dari aktivitas pendanaan mengurangi saldo kas sebesar tersebut.

5.6.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan tahun 2020 sebesar Rp1.465.000.000,00 adalah penerimaan kembali pokok pinjaman dana talangan yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan.

5.6.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp9.550.000.000,00 merupakan Penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah dan penyaluran dana talangan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penyertaan Modal pada Bank Jateng	3.500.000.000,00
2.	Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Kebumen	1.500.000.000,00
3.	Penyertaan modal pada PDAM	3.000.000.000,00
4.	Penyertaan Modal pada PD Apotik Luk Ulo	50.000.000,00
5.	Penyaluran dana Talangan	1.500.000.000,00
	Jumlah	**9.550.000.000,00**

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2020 berkurang sebesar Rp96.559.689,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Non Anggaran	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	159.227.636.716,00	156.164.303.603,00
Arus Kas Keluar	159.324.196.405,00	156.432.197.654,00
Arus Kas Netto Aktivitas	**(96.559.689,00)**	**(267.894.051,00)**

5.6.4.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk aktivitas transitoris sebesar Rp159.227.636.716,00 terdiri dari berikut.

Tabel Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris Tahun 2020

Uraian	Nilai (Rp)
Penerimaan perhitungan fihak ketiga	159.154.521.526,00
Kiriman uang masuk penutupan rekening BLUD UP3	14.626.390,00
Kiriman uang masuk pengembalian Dana Desa	58.488.800,00
Jumlah	**159.227.636.716,00**

5.6.4.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris

Arus Arus kas keluar Aktivitas Transitoris tahun 2020 sebesar Rp159.324.196.405,00 terdiri dari pengeluaran perhitungan fihak ketiga, kiriman uang keluar dari penutupan BLUD UP3 dan kiriman uang keluar atas penyetoran Dana Desa ke Rekening Kas Umum Negara, masing-sebagai berikut:

Tabel Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris Tahun 2020

Uraian	Nilai (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	159.251.081.215,00
Kiriman uang keluar atas penutupan rekening BLUD UP3	14.626.390,00
Kiriman uang keluar atas penyetoran sisa dana Desa ke RKUN	58.488.800,00
Jumlah	**159.324.196.405,00**

Dari keempat arus kas tersebut di atas, terjadi kenaikan saldo kas selama Tahun 2020 sebesar Rp17.072.726.959,80 ditambah dengan saldo awal Kas sebesar Rp202.798.793.055,18 sehingga diperoleh saldo akhir Kas sebesar Rp219.871.520.014,98.

Saldo Kas sebesar tersebut terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	Rp.	142.972.001.462,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	34.633.880,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	206.799,00
Kas di BLUD	Rp.	71.363.739.445,98
Kas Lainnya - BOS	Rp.	5.500.938.428,00
Kas Lainnya - Lainnya	Rp.	0,00
Jumlah	**Rp.**	**219.871.520.014,98**

5.7 Pengungkapan Lainnya

1) Penanganan Bencana Non Alam (COVID-19)

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat baik dari sisi sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Perkembangan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Indonesia menuntut Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penanganan yang komprehensif. Untuk itu Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 mengambil tindakan dan menginstruksikan kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga Negara, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan penanganan melalui *Refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Selanjutnya Presiden dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020 menetapkan bencana non alam atas penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.

Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait penanganan COVID-19. Kebijakan tersebut antara lain :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
c. Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri kuangan Nomor 119/2813 SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan daya Beli masyarakat dan Perekonomian Nasional.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD.

Peraturan-peraturan tersebut memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian APBD dalam rangka penanggulangan COVID-19 melalui *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2020.

Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang pergeseran anggaran dan terakhir ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Pelaksanaan APBD untuk perceptan penganganan COVID-19 juga diamanatkan untuk dipercepat, oleh sebab itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran tentang Penjelasan atas pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19. Surat Edaran ini menegaskan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yang mengatur pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bisa dilakukan dengan swakelola.

Status tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Kebumen ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati Nomor 360/195 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Kabupaten Kebumen, yang menetapkan kondisi tanggap darurat COVID-19 selama 66 hari sejak 25 Maret 2020 sampai dengan 25 Mei 2020. Status tanggap darurat tersebut diperpanjang dengan Keputusan Bupati Nomor 360/274 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Kabupaten Kebumen, yang menetapkan perpanjangan status tanggap darurat COVID-19 sejak 30 Mei 2020 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya status bencana Non alam *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) sebagai Bencana nasional.

Dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan mengalokasikan anggaran melalui *refocusing* dan penggeseran anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengamanan sosial serta Belanja Tak terduga, sebagai berikut:

Tabel Alokasi APBD untuk Pendanaan COVID-19

APBD Yang Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19 Berdasarkan Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
A. Belanja Tidak Terduga (BTT)	**10.448.725.000,00**	**9.879.295.533,00**
1. Bidang Kesehatan	8.993.725.000,00	8.427.861.533,00
2. Bidang Sosial	1.130.000.000,00	1.126.434.000,00
3. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	325.000.000,00	325.000.000,00
B. Belanja Kegiatan pada OPD	**46.697.695.750,00**	**39.547.282.558,00**
1. Bidang Kesehatan	31.499.995.750,00	27.443.847.878,00
a. Belanja Pegawai	129.122.000,00	108.520.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa	20.741.023.650,00	17.752.340.052,00
c. Belanja Modal	10.620.025.100,00	9.512.313.566,00
d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
e. Belanja Lainnya	9.825.000,00	70.673.760,00
2. Bidang Sosial	15.197.700.000,00	12.103.434.680,00
a. Belanja Pegawai	0,00	0,00
b. Belanja Barang dan Jasa	155.700.000,00	155.034.680,00
c. Belanja Modal	0,00	0,00
d. Belanja Bantuan Sosial	13.700.000.000,00	10.606.400.000,00
e. Belanja Lainnya	0,00	0,00
3. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	1.342.000.000,00	1.342.000.000,00
a. Belanja Pegawai	0,00	0,00
b. Belanja Barang dan Jasa	1.342.000.000,00	1.342.000.000,00
c. Belanja Modal	0,00	0,00
d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
e. Belanja Lainnya	0,00	0,00
C. Total BTT dan Kegiatan OPD	**57.146.420.750,00**	**49.426.578.091,00**

Dalam penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Kebumen, Bupati Kebumen telah membentuk Gugus Tugas dengan Keputusan Bupati No.440.1/165 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten kebumen, yang dirubah dengan Keputusan Bupati No.440.1/205 Tahun 2020 yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. Gugus Tugas COVID-19 mengelola rekening guna menampung sumber dana lainnya untuk penanganan COVID-19 yang berasal dari pihak ketiga/masyarakat, melalui Rekening Bank Jateng No3-008-25039-1 An. PENANGANAN COVID-19 DI KEBUMEN.

Laporan penerimaan sumbangan berupa uang yang diterima melalui rekening tersebut maupun yang berupa barang, diadministrasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Adapun data penerimaan bantuang uang dan barang yang disalurkan melalui Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

Tabel

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2020 (Gugus Tugas COVID-19)

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	PEMBUKAAN REKENING PD BPR KEBUMEN	100.000	
2.	PD BPR KEBUMEN	25.000.000	Bank
3.	EFISIENSI	1.000.000	Tunai
4.	SKN	25.000.000	tunai
5.	BANK JATENG	40.000.000	Bank
6.	KARYAWAN BANK JATENG	10.000.000	Bank
7.	BKK KEBUMEN	50.000.000	Bank
8.	IBI CAB KEBUMEN	5.000.000	tunai
9.	RITA PASARAYA	2.000.000	bank
10.	PT.MITRA PAMITA SELAERAS (SAMPURNA SEMPOR)	5.000.000	Bank
11.	PDAM KEBUMEN	30.000.000	Bank
12.	BPJS KAB KEBUMEN	3.497.100	bank
13.	PAGUYUBAN APOTIK	10.000.000	tunai
14.	KORPRI KAB KEBUMEN	15.000.000	tunai
15.	JADI BARU	20.000.000	Bank
16.	TAMPA NAMA (ATM)	100.000	Bank
17.	TAMPA NAMA (ATM)	100.000	Bank
18.	TAMPA NAMA (ATM)	100.000	Bank
19.	Setoran TN	50.000	Bank
20.	Bunga Bank	354.801	
	TOTAL	**242.301.901**	

Sumbangan tersebut telah direalisasikan untuk penggunaan sebagai berikut:

Tabel
Penggunaan Sumbangan Pihak Ketiga/masyarakat tahun 2020 (Gugus Tugas COVID-19)

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Belanja Gaji SDM PSC (8 Orang X Rp 2.000.000,-)	16.000.000,00	
2.	Belanja Gaji SDM PSC (8 Orang X Rp 2.000.000,-)	16.000.000,00	
3.	Pembayaran THL Posco Covid bulan Juni Rp 16.000.000,-	16.000.000,00	
4.	Konsumsi rapid Pasar (26 kec x Rp 1.000.000,-)	26.000.000,00	
5.	Konsumsi Rapid di Panti	22.120.000,00	
6.	Sosialisasi paket Jogo tonggo	13.000.000,00	
7.	Konsumsi bongkar dan paket jogo tonggo	3.000.000,00	
8.	Pembayarn warga Kbm 21 org di Jakarta tahap 1	7.000.000,00	
9.	Pembayarn warga Kbm 21 org di Jakarta tahap 2	10.000.000,00	
10.	Administrasi bank dan pajak	69.960,00	
	TOTAL	**129.189.960,00**	

Saldo dana sumbangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp113.111.941,00 (pada rekening bank). Sedangkan penerimaan sumbangan barang yang diterima/disalurkan melalui Gugus Tugas COVID-19 2020 sebagai berikut:

Tabel
Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan Barang Tahun 2020 (Gugus Tugas COVID-19)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Aset Tetap (A)	13.070.000,00
2.	Pakai habis kesehatan (P)	1.747.898.634,00
3.	Bahan Makanan (M)	11.134.091,00
4.	Obat (O)	105.000,00
	Jumlah	**1.772.207.725,00**

2) Penanganan Bencana Alam

Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda, pada penghujung Tahun 2020 Kabupaten Kebumen juga mengalami bencana alam banjir dan tanah longsor. Penetapan tanggap darurat bencana dikeluarkan Bupati melalui Keputusan Bupati Nomor 360/389 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Kebumen Tahun 2020, yang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 8 November 2020. Yang selanjutnya disusul dengan penerbitan Keputusan Bupati Nomor 360/394 Tahun 2020 tanggal 9 November 2020 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Kebumen.

Dalam rangka penanganan bencana alam ini, Bupati Kebumen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku OPD yang mempunyai fungsi penanganan kebencanaan menerima sumbangan dari Pihak Ketiga dan masyarakat yang dikelola

langsung untuk penanganan kegawatdaruratan kebencanaan. Sumbangan yang diterima berupa uang maupun barang diadministrasikan oleh BPBD.

Data penerimaan sumbangan dalam rangka penanganan kegawat-daruratan kebencanaan dilaporkan sebagai berikut:

Tabel
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2020 (Bencana Alam)

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Terima Donasi dari KKB	12.500.000,00	tunai
2.	Terima Donasi dari PSWK	2.000.000,00	tunai
3.	Terima Donasi dari Muhamadiyah Purworejo	2.500.000,00	tunai
4.	Terima Donasi dari PWK	8.215.000,00	tunai
5.	Terima Donasi dari PLN	6.000.000,00	tunai
6.	Terima Donasi dari KKN UIN	3.383.000,00	tunai
7.	Terima Donasi dari Kebumen Berbagi	1.750.000,00	tunai
8.	Terima Donasi dari HMK UNSOED	6.231.000,00	tunai
9.	Terima Donasi dari Arif H	17.500.000,00	tunai
10.	Terima Donasi dari Teguh Kristiyanto	5.000.000,00	tunai
11.	Terima Donasi dari RAPI Kebumen	5.000.000,00	tunai
12.	Terima Donasi dari Mahasiswa UI	2.000.000,00	tunai
13.	Terima CSR di Bank BNI	5.000.000,00	tunai
14.	Terima Uang Hasil Lelang	7.500.000,00	tunai
15.	Terima Donasi dari Hamba Allah	1.000.000,00	bank
16.	ATM OTH TRFD BRI	5.000.000,00	bank
17.	Terima CSR di Bank BNI	5.000.000,00	bank
18.	Terima CSR di Bank Jateng	1.000.000,00	tunai
19.	Terima Donasi dari HARPI Kebumen	1.650.000,00	tunai
18.	Penerimaan Bunga Bank	80.427,00	
	TOTAL	**98.309.427,00**	

Sumbangan tersebut telah direalisasikan untuk penggunaan sebagai berikut:

Tabel
Penggunaan Sumbangan Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2020 (Bencana Alam)

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Bayar PC	11.648.000,00	penanganan bencana tanah longsor di Desa Karangduwur Ayah
2.	Bayar PC CV.SSA Panjer	13.500.000,00	penanganan bencana tanah longsor di Desa Kalirejo, Karanggayam
3.	Bayar BBM Kalirejo	1.400.000,00	penanganan bencana tanah longsor di Desa Kalirejo, Karanggayam
4.	Bayar PC CV.Sumber Bangunan	13.500.000,00	penanganan bencana tanah longsor di Desa Karangduwur dan desa Pasir, Ayah
5.	Bayar PC CV.Permata Tugu Kaliari	2.329.600,00	penanganan bencana tanah longsor di Desa Wonoharjo, Rowokele
6.	Biaya administrasi bank	38.574,80	
	TOTAL	**42.416.174,80**	

Saldo dana sumbangan kebencanaan yang belum digunakan sebesar Rp55.893.252,20 berada pada Bendahara CSR BPBD – tunai sebesar Rp1.650.000,00 dan pada rekening bank sebesar Rp54.243.252,20.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah agar substansinya dapat selaras dengan tujuan otonomi yang didasarkan pada asas kewenangan, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas;
e. Badan; dan
f. Kecamatan.

Susunan perangkat daerah terbagi menjadi 3 tipe :

a. Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan dengan kategori beban kerja besar.

b. Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang dan Kecamatan dengan kategori beban kerja kecil.

c. Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja kecil.

Untuk Rinciannya adalah sevagai berikut :

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A
d. Dinas berjumlah 17 dengan rincian tipe sebagai berikut:
   1) Dinas Tipe A : 5 Dinas
   2) Dinas tipe B : 10 Dinas
   3) Dinas Tipe C : 2 Dinas
e. Badan berjumlah 4 dengan rincian tipe sebagai berikut :
   1) Badan Tipe A : 2 Badan
   2) Badan Tipe B : 2 Badan
f. Kecamatan : 26 Kecamatan tipe A

Nomenklatur SKPD pada penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2020 disajikan sesuai tabel berikut.

Tebel Nomenklatur SKPD pada Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2020

No.	Kode SKPD	Nama SKPD
	1.01.	BIDANG PENDIDIKAN
1.	1.01.1	Dinas Pendidikan.
	1.02.	BIDANG KESEHATAN
2.	1.02.1	Dinas Kesehatan
3.	1.02.2.1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedirman
4.	1.02.2.2	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun
	1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6.	1.03.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.04	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	1.04.1	Dinas Perumahan dan Kawasasn Permukiman dan Lingkungan Hidup
	1.05	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.	1.05.1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	1.05.2	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.06	BIDANG SOSIAL
10.	1.06.1	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.01	BIDANG TENAGA KERJA
11.	2.01.1	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.06	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
12.	2.06.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.07	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
13.	2.07.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.09	BIDANG PERHUBUNGAN
14.	2.09.1	Dinas Perhubungan
	2.10	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.12	BIDANG PENANAMAN MODAL
16.	2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.13	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Di Tahun Anggaran 2020 terdapat 38 entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu 35 Puskesmas, 1 Unit Pengobatan Paru dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode SKPD	Nama SKPD
1	1.02.1.1	Puskesmas Adimulyo
2	1.02.1.2	Puskesmas Alian
3	1.02.1.3	Puskesmas Ambal I
4	1.02.1.4	Puskesmas Ambal II
5	1.02.1.5	Puskesmas Ayah I
6	1.02.1.6	Puskesmas Ayah II
7	1.02.1.7	Puskesmas Bonorowo
8	1.02.1.8	Puskesmas Buayan
9	1.02.1.9	Puskesmas Buluspesantren I
10	1.02.1.10	Puskesmas Buluspesantren II
11	1.02.1.11	Puskesmas Gombong I
12	1.02.1.12	Puskesmas Gombong II
13	1.02.1.13	Puskesmas Karanganyar
14	1.02.1.14	Puskesmas Karanggayam I
15	1.02.1.15	Puskesmas Karanggayam II
16	1.02.1.16	Puskesmas Karangsambung
17	1.02.1.17	Puskesmas Kebumen I
18	1.02.1.18	Puskesmas Kebumen II
19	1.02.1.19	Puskesmas Kebumen III
20	1.02.1.20	Puskesmas Klirong I
21	1.02.1.21	Puskesmas Klirong II
22	1.02.1.22	Puskesmas Kutowinangun
23	1.02.1.23	Puskesmas Kuwarasan
24	1.02.1.24	Puskesmas Mirit
25	1.02.1.25	Puskesmas Padureso
26	1.02.1.26	Puskesmas Pejagoan
27	1.02.1.27	Puskesmas Petanahan
28	1.02.1.28	Puskesmas Poncowarno
29	1.02.1.29	Puskesmas Prembun
30	1.02.1.30	Puskesmas Puring
31	1.02.1.31	Puskesmas Rowokele
32	1.02.1.32	Puskesmas Sadang
33	1.02.1.33	Puskesmas Sempor I
34	1.02.1.34	Puskesmas Sempor II
35	1.02.1.35	Puskesmas Sruweng
36	1.02.1.36	Pengobatan Penyakit Paru
37	1.02.1.37	RSUD dr. Sudirman
38	1.02.1.38	RSUD Prembun
		Jumlah

Namun dalam tahun berjalan, Unit Pengobatan Penyakit Paru (UP3) dicabut status BLUD-nya, dengan Keputusan Bupati Nomor 060/26.4 Tahun 2020 tentang Pencabutan

Penerapan Pol Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Kabupaten Kebumen selama tahun 2020 memperoleh beberapa prestasi diantaranya.

Rincian Penghargaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Nama Penghargaan
1.	Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 dari Kementerian Keuangan.
2.	Juara II Tingkat Nasional Inovasi New Normal Life Sektor Hotel dari Kementerian Dalam Negeri
3.	Juara II Tingkat Nasional Inovasi New Normal Life Sektor Pasar Modern dari Kementerian Dalam Negeri
4.	Top 45 Inovasi Publik Kampung Garam Kebumen dari Kementerian PAN & RB
5.	Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dengan Nilai B dari Kementerian PAN & RB
6.	Sertipikat Adipura dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 2017 - 2018
7.	Penghargaan kabupaten Sangat Inovatif (Innovative Government Award) Tahun 2020 dari Kementerian dalam Negeri
8.	Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan status kinerja "Sangat Tinggi" Tahun 2020
9.	Juara I Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Jawa Tengah Tahun 2020
10.	Juara I Lomba Perpustakaan Umum kabupaten/Kota Tingkat Jawa Tengah tahun 2020
11.	Juara II Jogo Tonggo Desa dan Kelurahan Tingkat Jawa Tengah Tahun 2020
12.	Penghargaan Good Design Indonesia (GDI) Best (Mangkok Anyaman Pandan) Tahun 2020
13.	Juara II Lomba Satgas JOGO TONGGO Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jateng Tahun 2020 (Desa Jatimulyo Petanahan)
14.	Juara III Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Jateng Kategori Kelurahan Tahun 2020 (Kelurahan Panjer)
15.	Juara III Lomba Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi (PPE) Tingkat Provinsi Jateng Tahun 2020 (Desa Pakuran)
16.	Juara 1 Lomba Cipta Menu Beragam, Beregizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal Tingkat Provinsi Jateng Tahun 2020
17.	TPKAD Award Tahun 2020 Kategori Kabupaten/Kota dengan Implementasi Terbaik dalam Program Pembiayaan Mikro Berbiaya Rendah bagi UKM
18.	BUMD Penyelenggara Perusahaan Air Minum terbaik se Provinsi Jateng atas nama Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa
19.	TOP BUMD Awards Tahun 2020 sektor BPR atas nama PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan.

BUPATI KEBUMEN,

H. ARIF SUGIYANTO, SH